



**BAPPELITBANG**  
KABUPATEN TAPIN



# KAJIAN STRATEGI

PENINGKATAN ANGKA  
HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH  
DI KABUPATEN TAPIN

## 2023



©r.ie84

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

©Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Tapin

@estarlitbang\_tapin

[www.e-starlitbang.tapinkab.go.id](http://www.e-starlitbang.tapinkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut. Dengan pendidikan yang sungguh-sungguh diarahkan pada pencapaian fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terhormat, unggul, dan diperhitungkan dalam pergaulan dan persaingan dunia.

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Sementara itu, pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan merupakan landasan bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Pendidikan juga merupakan kunci dalam mengembangkan pengetahuan dan kualitas kemampuan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan yang berperan dalam menentukan kualitas pendidikan.

Indikator keberhasilan pendidikan yang diukur dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, menunjukkan belum optimalnya pendidikan di Kabupaten Tapin. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan indikator tersebut. Dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Tapin, melalui kajian ini disusun strategi untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa datang akan sangat ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, melalui kajian ini diharapkan pemerintah daerah dapat merefleksikannya dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tapin.

Rantau, 12 Desember 2023

**Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Penelitian dan  
Pengembangan, Kabupaten Tapin**



Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE, ME  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19840522 200803 1 0001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.3.1. Lingkup Waktu	2
1.3.2. Lingkup Wilayah	2
1.3.3. Lingkup Substansi	2
1.4. Keluaran	3
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>4</b>
2.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)	4
2.2. RLS dan Performa Ekonomi Daerah	6
2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi RLS dan HLS	7
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	<b>10</b>
3.1. Metode dan Pendekatan	10
3.2. Unit Amatan	10
3.3. Unit Analisis	11
3.4. Metode Pengumpulan Data	11
3.5. Metode Analisis Data	12
3.6. Desain Penelitian	14
<b>BAB 4 GAMBARAN WILAYAH KABUPATEN TAPIN</b>	<b>16</b>
4.1. Kondisi Geografis Wilayah	16
4.1.1. Kondisi Topografi	19
4.1.2. Kondisi Klimatologi	19
4.1.3. Jenis Tanah	20
4.1.4. Kondisi Hidrologi	20
4.1.5. Guna Lahan	21
4.2. Demografi	23
4.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk	23
4.2.2. Kepadatan Penduduk	24
4.2.3. Rasio Jenis Kelamin	26
4.2.4. Rasio Ketergantungan	26
4.2.5. Penduduk Angkatan Kerja	27
4.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	28
4.2.7. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	29
4.2.8. Indeks Pembangunan Manusia	32
4.3. Kondisi Pendidikan	36
4.3.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	36
4.3.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	39
4.3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	42
4.3.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)	42
4.3.5. Angka Partisipasi Murni (APM)	43
4.3.6. Angka Putus Sekolah	44



4.3.7.	Fasilitas Pendidikan	45
4.3.8.	Akreditasi Sekolah	55
4.3.9.	Rasio Tenaga Pendidik	55
4.4.	Kondisi Ekonomi	59
4.4.1.	PDRB Kabupaten Tapin	59
4.4.2.	Tipologi Perekonomian di Kabupaten Tapin	62
4.4.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	64
4.4.4.	Indeks Gini	65
4.4.5.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin	66
4.5.	Kondisi Sosial	68
4.5.1.	Budaya Masyarakat	68
4.5.2.	Garis Kemiskinan	69
4.5.3.	Jumlah Penduduk Miskin	71
4.5.4.	Persentase Penduduk Miskin (PO)	72
4.5.5.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	74
4.5.6.	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	76
4.5.7.	Gap antar Kelompok Pengeluaran	78
<b>BAB 5</b>	<b>HASIL KAJIAN</b>	<b>80</b>
5.1.	Analisis Kondisi Pendidikan Kabupaten Tapin	80
5.1.1.	Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan SD/Sederajat	80
5.1.2.	Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan SMP/Sederajat	81
5.1.3.	Jumlah dan Sebaran Sarana SMA/Sederajat	82
5.1.4.	Proyeksi RLS dan HLS	87
5.1.5.	Angka Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan Sekolah	88
5.1.6.	Aksesibilitas Sarana Pendidikan	92
5.2.	Analisis Pendidikan Berdasarkan Tipologi Wilayah	94
5.2.1.	Analisis Sebaran Pendidikan menurut Tipologi Perkotaan	94
5.2.2.	Analisis Spasial Angka Putus Sekolah pada Jenjang SD/Sederajat	96
5.2.3.	Analisis Spasial Anak SD Tidak Melanjutkan ke SMP/Sederajat	101
5.2.4.	Analisis Spasial Angka Putus Sekolah pada Jenjang SMP/Sederajat	105
5.2.5.	Analisis Spasial Anak SMP Tidak Melanjutkan ke SMA/Sederajat	108
5.2.6.	Analisis Spasial Angka Putus Sekolah pada Jenjang SMA/Sederajat	112
5.3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi RLS dan HLS	115
5.4.	Strategi untuk Meningkatkan RLS dan HLS	120
<b>BAB 6</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>122</b>
6.1.	Kesimpulan	122
6.2.	Limitasi Kajian	123
6.3.	Rekomendasi	123

## DAFTAR TABEL

2.1	Konversi Ijazah Terakhir menjadi lama sekolah (tahun)	5
3.1	Kebutuhan dan Metode Pengumpulan Data	12
4.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tapin	16
4.2	Topografi Kabupaten Tapin	19
4.3	Jenis Tanah di Kabupaten Tapin	20
4.4	Tutupan Lahan Kabupaten Tapin	21
4.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin	23
4.6	Kepadatan Penduduk Kabupaten Tapin	24
4.7	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Tapin	26
4.8	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	30
4.9	Perbandingan Komponen dan Pertumbuhan IPM	33
4.10	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional	36
4.11	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional	39
4.12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tapin	42
4.13	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin	43
4.14	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin	43
4.15	Jumlah APS dan ATS di Kabupaten Tapin	44
4.16	Jumlah Fasilitas Pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Tapin	45
4.17	Fasilitas Pendidikan Sekolah Informal di Kabupaten Tapin 2023	46
4.18	Jenjang dan Akreditasi Sekolah Kabupaten Tapin Tahun 2023	55
4.19	Jenjang dan Akreditasi Sekolah Kabupaten Tapin Tahun 2022	55
4.20	Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) Kabupaten Tapin 2018-2022	60
4.21	Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) Kabupaten Tapin 2018-2022	61
4.22	Tipologi Perekonomian di Kabupaten Tapin	63
4.23	Indeks Gini Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Selama 5 Tahun	65
4.24	Kondisi Garis Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan	70
4.25	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan	71
4.26	Jumlah Penduduk dengan Kategori Kemiskinan Ekstrem yang Menerima Bantuan di Kabupaten Tapin	74
4.27	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	75
4.28	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)	76
4.29	Persentase Penduduk berdasarkan Kelompok Pengeluaran Dilihat dari Kelompok Umur, Kemampuan Membaca dan Kepemilikan Ijazah	79
5.1	Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Tapin Tahun 2021/2022	80
5.2	Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Tapin Tahun 2021/2022	81
5.3	Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Tapin Tahun 2021/2022	82
5.4	Persentase Anak Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2020	89
5.5	Jumlah Anak Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan di Kabupaten Tapin Tahun 2020	91
5.6	Ketersediaan Transportasi Umum Menuju Sekolah	92
5.7	Keterjangkauan Sekolah dengan Berjalan Kaki	93

5.8	Biaya Transportasi kurang dari 500.000	93
5.9	Kemudahan Akses	94
5.10	Alasan Tidak Melanjutkan Sekolah ke SMP Tahun 2020	10 2
5.11	Alasan Tidak Melanjutkan Sekolah ke SMA Tahun 2020	10 8
5.12	Ketercukupan Fasilitas Sekolah	11 7
5.13	Kondisi Fasilitas Sekolah	11 7

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi RLS dan HLS	8
3.1	Tahapan Penelitian	13
3.2	Bagan Penelitian Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Lama Sekolah	15
4.1	Peta Administrasi Kecamatan	17
4.2	Peta Administrasi Kelurahan dan Desa	18
4.3	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tapin	22
4.4	Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Tapin	24
4.5	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tapin	25
4.6	Piramida Penduduk Kabupaten Tapin	27
4.7	Grafik Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	27
4.8	Grafik Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	28
4.9	Grafik Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja	29
4.10	Grafik Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2022	29
4.11	Grafik Jumlah Penduduk yang Menganggur Kabupaten Tapin Tahun 2012-2022	30
4.12	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka	31
4.13	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Selatan	31
4.14	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	32
4.15	IPM Kabupaten Tapin	32
4.16	Grafik Perbandingan IPM	33
4.17	Perbandingan Komponen IPM Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional	34
4.18	Peta Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan	35
4.19	Grafik Rata-rata Lama Sekolah	37
4.20	Grafik Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah	37
4.21	Peta Rata Lama Sekolah Kalimantan Selatan	38
4.22	Grafik Perbandingan Rata Lama Sekolah	40
4.23	Grafik Perbandingan Rata Lama Sekolah	40
4.24	Peta Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Selatan	41
4.25	Peta Persebaran Pendidikan Kabupaten Tapin	47
4.26	Peta Persebaran TK/PAUD Kabupaten Tapin	48
4.27	Peta Persebaran SD Kabupaten Tapin	49
4.28	Peta Persebaran SMP Kabupaten Tapin	50
4.29	Peta Persebaran SMA Kabupaten Tapin	51
4.30	Peta Persebaran Pondok Pesantren Kabupaten Tapin	52
4.31	Peta Persebaran Pendidikan Khusus Kabupaten Tapin	53
4.32	Peta Persebaran Perpustakaan Kabupaten Tapin	54
4.33	Peta Rasio Guru SD per Kecamatan	56
4.34	Peta Rasio Guru SMP per Kecamatan	57
4.35	Peta Rasio Guru SMA per Kecamatan	58

4.36	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin se Provinsi Kalimantan Selatan	64
4.37	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten se Provinsi Kalimantan Selatan	64
4.38	Grafik Indeks Gini se-Kalimantan Selatan	65
4.39	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	66
4.40	Peta Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan	67
4.41	Kondisi Pernikahan Dini di Kabupaten Tapin Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	69
4.42	Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	70
4.43	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Tapin/Kota di Kalimantan Selatan	72
4.44	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	73
4.45	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022 Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	73
4.46	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tapin Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	75
4.47	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	76
4.48	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	77
4.49	Indeks Keparahan Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	77
5.1	Grafik Jumlah SD/MI/SDLB di Kabupaten Tapin	81
5.2	Grafik Jumlah SMP/MTs/SMPLB di Kabupaten Tapin	82
5.3	Grafik Jumlah SMA/SMK/MA/SMALB di Kabupaten Tapin	83
5.4	Peta Persebaran Sekolah Dasar di Kabupaten Tapin	84
5.5	Peta Persebaran Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tapin	85
5.6	Peta Persebaran Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tapin	86
5.7	Grafik Proyeksi RLS tahun 2032 pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	87
5.8	Grafik Proyeksi RLS tahun 2032 pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	88
5.9	Grafik Proyeksi IPM tahun 2032 pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	88
5.10	Peta Persebaran SD dibandingkan Persebarannya Menurut Tipologi Perkotaan	94
5.11	Peta Persebaran SMP dan SMA dibandingkan Persebarannya Menurut Tipologi Perkotaan	95
5.12	Peta Overlay Jumlah Anak Putus Sekolah dengan Persebaran dan Jangkauan Sekolah Dasar per Kecamatan	97
5.13	Peta Overlay Jumlah Anak Putus Sekolah dengan Persebaran dan Jangkauan Sekolah Dasar per Desa	98
5.14	Peta Jumlah Anak Putus Sekolah pada Kecamatan Tapin Selatan (Overlay Jangkauan Pelayanan dengan Permukiman)	99
5.15	Peta Jumlah Anak Putus Sekolah pada Kecamatan Bakarangan (Overlay Jangkauan Pelayanan dengan Permukiman)	100

5.16	Peta Jangkauan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Tapin Utara	101
5.17	Peta Persebaran Anak Tidak Melanjutkan SMP, Overlay Jangkauan Pelayanan SMP terhadap Permukiman per Kecamatan	103
5.18	Peta Persebaran Anak Tidak Melanjutkan SMP, Overlay Jangkauan Pelayanan SMP terhadap Permukiman per Desa	104
5.19	Peta Jangkauan Pelayanan SMP pada Kecamatan Candi Laras Selatan	106
5.20	Kondisi Jalan Menuju SMP di Kecamatan Candi Laras Selatan	106
5.21	Peta Jumlah Anak Putus Sekolah SMP per Kecamatan, Overlay antara Jangkauan Pelayanan dan Permukiman	107
5.22	Peta Persebaran Anak Tidak Melanjutkan SMA, Overlay Jangkauan Pelayanan SMA Terhadap Permukiman per Kecamatan	110
5.23	Peta Persebaran Anak Tidak Melanjutkan SMA, Overlay Jangkauan Pelayanan SMA Terhadap Permukiman per Desa	111
5.24	Peta Jangkauan Pelayanan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tapin	112
5.25	Peta Persebaran Anak Putus Sekolah SMA, Overlay Jangkauan Pelayanan SMA terhadap Permukiman per Kecamatan	114
5.26	Jumlah Sekolah yang Mengisi Kuesioner Berdasarkan Kecamatan	115
5.27	Akses Terhadap Sekolah Menurut Kepala Sekolah	116
5.28	Akses Terhadap Sekolah Menurut Komite Sekolah	116
5.29	Alasan Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan Sekolah	118
5.30	Tingkat Kepentingan Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Bersekolah	118
5.31	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Bersekolah	119
5.32	Strategi Akselerasi Peningkatan RLS dan HLS Kabupaten Tapin	120

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Salah satu keberhasilan pembangunan, dapat diukur melalui pencapaian pembangunan manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM Kabupaten Tapin selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 69,53 pada tahun 2018 menjadi 71,02 pada tahun 2022, namun masih di bawah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan (BPS, 2019).

Indeks pendidikan dibentuk oleh dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan lamanya masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa mendatang.

Sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan di Kabupaten Tapin, rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2022 menunjukkan angka 7,95 tahun atau setara dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu, data harapan lama sekolah menunjukkan angka 12,04 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau D1. Data rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah Kabupaten Tapin menunjukkan perkembangan yang lambat setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang bagaimana strategi peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Tapin.

## 1.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin adalah:

1. Melakukan analisis kondisi eksisting pendidikan penduduk Kabupaten Tapin
2. Menganalisis tipologi wilayah sebaran sarana prasarana pendidikan (sekolah, guru, dan murid)
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Tapin
4. Menyusun strategi dan rekomendasi peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Tapin

## 1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

### 1.3.1. Lingkup Waktu

Waktu pelaksanaan kajian ini dilakukan selama kurun waktu 4 (empat) bulan.

### 1.3.2. Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tapin yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 135 Desa/Kelurahan.

### 1.3.3. Lingkup Substansi

Kegiatan penyusunan Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin ini meliputi:

1. Analisis kondisi eksisting dan hasil analisis terhadap fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dalam visualisasi peta spasial se-kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin, dengan menggali informasi melalui kuesioner. Responden penelitian ditentukan berdasarkan hasil analisis tipologi wilayah dengan metodologi *cluster random sampling* untuk melihat apakah faktor spasial, seperti sebaran sarana pendidikan di area perkotaan dan pedesaan, memiliki pengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
3. Merumuskan strategi yang dapat meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin.

#### 1.4. Keluaran

Hasil dari kajian ini adalah arahan/rekomendasi kebijakan strategi peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Tapin untuk setiap Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilakukan rencana aksi dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada rencana kerja di tahun 2024.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan merupakan kunci keberhasilan pembangunan wilayah, terkait dengan kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan ataupun kapabilitas institusional, yang sering diukur dengan indeks pembangunan manusia atau IPM. Perhitungan IPM mempertimbangkan empat (4) aspek, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan per kapita. Dua dari empat aspek tersebut, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pendidikan ataupun pembangunan di suatu daerah.

### 2.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Sebagai contoh, angka RLS nasional pada tahun 2022 adalah 8,69 yang berarti penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun rata-rata mengenyam pendidikan formal selama 8,69 tahun atau setara antara kelas 2 hingga 3 SMP (sekolah menengah pertama). Perhitungan rata-rata lama sekolah diambil dari survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) yang meliputi data terkait partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka rata-rata lama sekolah umumnya diolah pada level administrasi terkecil kota atau kabupaten, dengan disagregasi pada kawasan perkotaan dan perdesaan, gender, dan pendapatan keluarga. Sementara itu, harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Di Indonesia, HLS dihitung dengan menggunakan data SUSENAS terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Perhitungan RLS dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Lama Sekolah Penduduk}_i$$

Keterangan

RLS : Rata-rata Lama Sekolah penduduk di suatu wilayah yang berusia 25 tahun keatas

$x_i$  : Lama sekolah penduduk ke- $i$  yang berusia 25 tahun keatas

$n$  : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk umumnya dikonversi menggunakan ijazah terakhir yang diperoleh responden. BPS menggunakan tabel konversi berikut untuk menghitung RLS:

**Tabel 2.1 Konversi Ijazah terakhir menjadi lama sekolah (tahun)**

Ijazah Terakhir	Lama Sekolah (Tahun)
Tidak memiliki ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMALB/MA/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, HLS dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$HLS_a^t = Fk \times \sum_{i=1}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

$HLS_a^t$  : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t

$E_i^t$  : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

$P_i^t$  : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

$FK$  : Faktor koreksi

Sebagai catatan, perhitungan RLS dan HLS yang diterbitkan oleh BPS telah memasukkan faktor koreksi yang mempertimbangkan bias dalam pengambilan sampel ataupun kondisi setempat, termasuk peran dan posisi pendidikan non-formal dalam masyarakat lokal. Namun demikian, perlu diketahui bahwa angka RLS diperoleh dari pengalaman pendidikan responden yang berusia 25 tahun ke atas sehingga terdapat bias *generational gap* karena sistem pencatatan ataupun pengumpulan data. Bisa jadi angka RLS suatu daerah rendah karena taraf pendidikan yang dienyam oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di daerah tersebut relatif rendah. Untuk itu, angka RLS perlu dikonfirmasi dengan angka partisipasi murni ataupun jumlah siswa yang tidak melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah.

Jika angka RLS menggambarkan kondisi pendidikan pada saat ini, maka HLS menggambarkan potensi kualitas pendidikan di masa mendatang. Gap yang tinggi antara RLS dan HLS menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan pendidikan. Pada negara-negara maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, gap antara RLS dan HLS cenderung sedikit (bahkan hampir sama), sementara di Indonesia, angka RLS mencapai hampir separuh (50%) dari angka HLS. Strategi untuk mengurangi gap RLS dan HLS yang dicoba diterapkan di Provinsi Sumatera Utara antara lain meliputi alokasi beasiswa pendidikan untuk mengurangi angka putus sekolah karena masalah ekonomi, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa putus sekolah, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat untuk mengurangi angka putus sekolah yang disebabkan faktor sosial-budaya (Sabrina, dkk., 2022). Strategi tersebut perlu dilengkapi dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas guru serta sarana dan prasarana pendidikan, termasuk akses dari dan menuju sekolah (Sabrina, dkk., 2022).

## **2.2. RLS dan Performa Ekonomi Daerah**

Rata-rata lama sekolah (RLS) kerap kali dikaitkan dengan performa ekonomi suatu daerah. Kabupaten atau kota yang memiliki RLS tinggi umumnya diasumsikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi hubungan antara RLS dan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui angka PDRB (pendapatan domestik regional bruto). Secara nasional, data statistik dari 33 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi angka PDRB di provinsi tersebut (Arif, 2014). Pada penelitian yang lebih detail, RLS dinyatakan berpengaruh secara positif terhadap PDRB di Provinsi Bali (Handayani, dkk., 2016) dan Kalimantan Selatan (Auliana, 2021). Namun demikian, di Provinsi D.I. Yogyakarta, RLS hanya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman saja, dan tidak berpengaruh signifikan pada 4 kabupaten/kota lainnya, termasuk kota Yogyakarta (Putriana dan Aji, 2022). Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan aktivitas ekonomi. Kabupaten atau kota yang cenderung bertumpu pada kegiatan ekonomi ekstraktif (seperti pertanian ataupun perdagangan hasil pertanian) cenderung memiliki RLS rendah. Kecenderungan ini terbukti pada adanya ketimpangan pendidikan di area pedesaan dan perkotaan. Akses pendidikan yang lebih terpusat di perkotaan menyebabkan angka RLS cenderung lebih tinggi pada area tersebut (Muttaqin, 2018).

RLS juga kerap dikaitkan (secara negatif) dengan tingkat kemiskinan. Makin tinggi RLS di suatu daerah, maka semakin rendah angka kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini terbukti pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Faritz dan Soejoto, 2020) dan Jawa Timur (Hadi, 2019). Namun demikian, terdapat beberapa studi yang menemukan

bahwa RLS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan jika diukur secara terpisah atau parsial. Sebagai contoh, di Kabupaten Tapin, RLS baru akan berpengaruh signifikan jika dikombinasikan dengan angka pengangguran terbuka (Maulida dan Saleh, 2023). Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Banten (Pradipta dan Dewi, 2020) dan Kalimantan Selatan (Safitri dan Effendi, 2019). Hal ini mengindikasikan pentingnya pendidikan non formal yang tidak masuk dalam perhitungan RLS, karena bisa jadi ketika siswa putus sekolah ataupun tidak melanjutkan sekolah, maka pendidikan non formal dapat memberikan bekal untuk mencari pekerjaan ataupun penghasilan ekonomi.

Di sisi lain, hal ini juga bisa disebabkan oleh belum meratanya kualitas pendidikan dan adanya kesenjangan ekonomi di perkotaan dan pedesaan. Sebagai contoh, walaupun angka RLS di Kalimantan Selatan meningkat tiap tahun, peningkatan tersebut hanya terpusat di area perkotaan saja. Di pedesaan, yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi, kemungkinan belum tersentuh peningkatan kualitas pendidikan tersebut sehingga tingkat kemiskinannya tidak menurun (Safitri dan Effendi, 2019). Selain itu, perlu dicatat bahwa pada penelitian yang mengkaji hubungan antara RLS dan performa ekonomi, terdapat tantangan pengukuran jeda waktu (*time lag*) yang cukup lama untuk melihat pengaruh pendidikan formal (yang diukur dengan RLS) terhadap kesempatan kerja ataupun peningkatan ekonomi daerah (yang diukur secara agregat).

### **2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi RLS dan HLS**

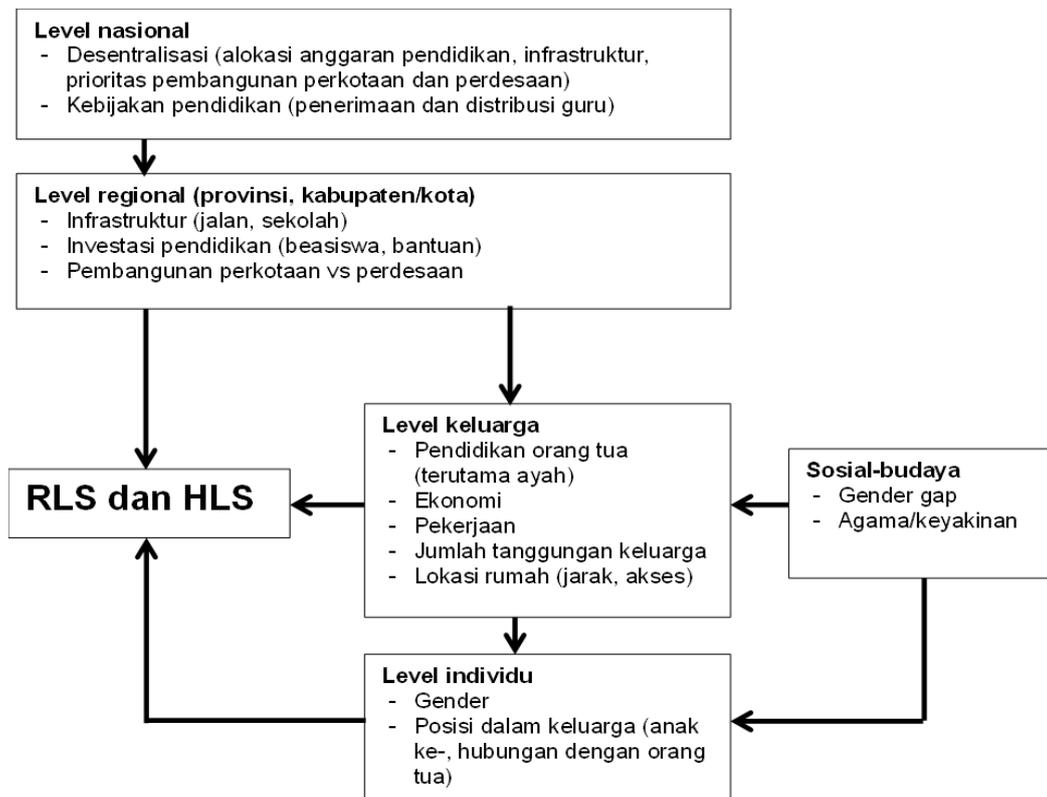
Tinggi rendahnya angka RLS dan HLS dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan (termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya, lihat Muttaqin dkk, 2017) pada berbagai level atau skala (Gambar 1). Pada level nasional, kebijakan desentralisasi (terkait alokasi anggaran pendidikan, infrastruktur, dan prioritas pembangunan perkotaan dan pedesaan) serta kebijakan pendidikan, terutama terkait penerimaan dan distribusi guru, terbukti mempengaruhi angka RLS (Rony, 2016; Muttaqin dkk, 2016). Pada level regional (provinsi atau kabupaten/kota), realisasi anggaran dan investasi di bidang pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan RLS (Rony, 2016; Nurmutiazifah dan Yuniasih, 2019; Riyadi dan Hendajany, 2023). Di Kabupaten Banjar, strategi peningkatan RLS mencakup (1) bantuan pendidikan, termasuk beasiswa dan biaya transportasi dari dan ke sekolah, (2) penyelenggaraan pendidikan non formal, (3) penambahan sekolah tingkat menengah (setara SMP dan SMA), serta (4) distribusi guru (Yamin, dkk., 2015).

Level keluarga memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap RLS dibandingkan faktor pada level regional maupun nasional (Muttaqin, 2018). Hal ini karena keputusan bersekolah umumnya diambil pada level keluarga. Sebagai contoh, orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung akan menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pula (Noël dan de Broucker, 2002). Dalam hal ini, pendidikan

ayah memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pendidikan ibu (Lin, 2021). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pemegang keputusan utama yang umumnya adalah laki-laki atau ayah. Keluarga berpenghasilan menengah ke atas dan orang tua yang memiliki pekerjaan 'bergengsi' juga cenderung memprioritaskan pendidikan bagi anak-anaknya (Björklund, 1994). Di Kabupaten Banjar, lama sekolah cenderung rendah pada keluarga yang tergolong miskin dan memiliki banyak beban tanggungan (misal: anak lebih dari 2), sehingga tidak mampu menanggung biaya transportasi ke sekolah, terutama jika jarak rumah dan sekolah cukup jauh (lebih dari 3 km) (Yamin, dkk., 2015).

Perlu diingat bahwa keputusan terkait pendidikan pada level keluarga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat, terutama terkait gender dan agama. Di Indonesia, terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki, sehingga angka RLS bagi anak perempuan cenderung lebih rendah (Amin dkk., 2019; Nurmutiazifah dan Yuniasih, 2019). Di sisi lain, penelitian di negara-negara berkembang di Afrika menunjukkan adanya hubungan antara faktor agama (yang termanifestasi pada keyakinan pro-kelahiran dan pro-pernikahan) dengan tingkat putus sekolah, terutama untuk anak perempuan (yang akhirnya mempengaruhi RLS) (Takyi dan Adai, 2002; Kim dan Jun, 2022). Tingginya angka pernikahan dini juga terdeteksi di Kalimantan Selatan, yang berhubungan erat dengan rendahnya lama sekolah serta kentalnya keyakinan masyarakat untuk menghindari pergaulan bebas (Ratnasari, dkk., 2021).

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan secara interseksional, sehingga secara umum terdapat kecenderungan pada level individu bahwa lama sekolah akan lebih rendah pada anak perempuan, tinggal di desa, memiliki banyak adik (terutama adik laki-laki), dan orang tua (terutama ayah) yang berpendidikan rendah (Lin, 2021).



**Gambar 1. Kerangka Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi RLS dan HLS**

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori tersebut, kajian ini menggunakan indikator angka putus sekolah dan keputusan tidak melanjutkan sekolah untuk menganalisis angka RLS dan HLS di Kabupaten Tapin. Lebih lanjut, angka RLS dan HLS di Kabupaten Tapin dipengaruhi oleh:

1. Faktor spasial, yaitu semakin jauh jarak sekolah atau semakin sulit akses ke sekolah ataupun semakin terpencil lokasi suatu wilayah, maka angka RLS dan HLS makin rendah
2. Faktor ekonomi, terutama kemiskinan, mempengaruhi angka RLS dan HLS

Faktor sosial budaya, termasuk pernikahan dini dan kecenderungan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke pesantren, mempengaruhi angka RLS dan HLS.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode dan Pendekatan**

Kajian “Strategi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin” menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*). Kombinasi ini memungkinkan penelitian dilakukan secara mendalam dan kontekstual (yang merupakan kelebihan metode kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Bogdan et al., 2016), namun tetap objektif dan terukur secara kuantitatif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait fenomena yang sedang diteliti. Penggunaan metode deskriptif (Arikunto, 2010) dalam kajian ini bertujuan untuk memahami fenomena ataupun dinamika RLS dan HLS di Kabupaten Tapin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data sekunder seperti fluktuasi angka RLS, HLS, partisipasi sekolah, IPM, harapan hidup, pengeluaran per kapita, kemiskinan, dan PDRB, baik secara *time series* (longitudinal) 10 tahun terakhir ataupun komparatif melalui *cross-tabulasi* sederhana. Analisis deskriptif tersebut diperkuat dengan analisis spasial melalui pemetaan sebaran ataupun komparasi spasial. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi RLS dan HLS dianalisis secara kualitatif dari data primer, seperti FGD (*focus group discussion*) dengan pemangku kepentingan terkait, wawancara dengan ahli di bidang pendidikan (termasuk staf Badan Pusat Statistik terkait pencatatan), dan kuesioner yang disebarakan terhadap kepala sekolah dan komite sekolah.

Dalam penelitian ini, dilakukan juga studi literatur berdasarkan dokumen resmi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Tapin maupun instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan metode dan pendekatan tersebut, kajian ini diharapkan dapat menggali informasi yang relevan dari sumber-sumber terkait untuk mendukung analisis dan pemahaman lebih dalam mengenai masalah peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin selama kurun waktu Agustus hingga Desember 2023.

#### **3.2 Unit Amatan**

Unit amatan merupakan suatu objek konkrit dimana data dikumpulkan dari objek tersebut (Ihalauw, 2003: 179). Unit amatan dalam penelitian “Strategi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin” adalah seluruh

sekolah yang berada di Kabupaten Tapin yang terdiri dari 13 kecamatan dan 135 Desa atau kelurahan. Penelitian ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, meliputi sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) yang berada dalam naungan dinas pendidikan maupun kementerian agama (Kemenag) Kabupaten Tapin.

Saat ini, terdapat total 261 sekolah yang akan menjadi objek amatan dalam penelitian dengan rincian 197 sekolah dasar sederajat, 43 sekolah menengah pertama sederajat, dan 21 sekolah menengah atas sederajat. Pengamatan di sekolah-sekolah tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah sebagai perwakilan dari masing-masing sekolah.

### **3.3 Unit Analisis**

Analisis pada kajian ini dilakukan secara bertahap, mulai pada unit kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, mengikuti tingkat kedetailan data. Data pada level makro, seperti RLS, HLS, IPM, harapan hidup, dan pengeluaran per kapita dianalisis pada unit kabupaten/kota. Pada level yang lebih mikro, seperti angka putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah, partisipasi sekolah, dan kepadatan penduduk dianalisis pada unit kecamatan. Data yang bersumber dari sekolah, seperti lokasi atau sebaran, keputusan bersekolah, dan rasio guru:murid dianalisis pada level desa. Untuk analisis spasial seperti sebaran dan aksesibilitas terhadap pendidikan, dilakukan analisis pada unit kedetailan dengan skala 1:250.000.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui FGD, wawancara, dan kuesioner yang disebarakan kepada kepala sekolah dan komite sekolah serta data sekunder yang dikumpulkan dari laporan resmi dan publikasi pemerintah terkait pendidikan. Wawancara dan FGD dilakukan dengan Dinas Pendidikan, Bappedalitbang, UPT Kementerian Agama, dan akademisi. Kuesioner dibagikan melalui form online dan ditujukan untuk setiap kepala sekolah dan komite sekolah di setiap sekolah di Kabupaten Tapin dari jenjang SD, SMP dan SMA. Dari kuesioner yang disebarakan, terdapat 74 kuesioner dari kepala sekolah dan 67 kuesioner dari komite sekolah yang kembali dan memenuhi syarat untuk dapat dianalisis. Kebutuhan data dan metode pengumpulannya diturunkan dari tujuan kajian, seperti yang dituliskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Kebutuhan dan Metode Pengumpulan Data**

Tujuan kajian	Data	Metode pengumpulan data	Sumber
Melakukan analisis kondisi eksisting pendidikan di penduduk Kabupaten Tapin	Jumlah dan kepadatan penduduk Jumlah guru Jumlah murid RLS HLS IPM Harapan hidup Pengeluaran per kapita	Survei data sekunder	Data sekunder (Dinas Pendidikan, BPS)
Menganalisis tipologi wilayah sebaran sarana prasarana pendidikan (sekolah, guru, dan murid)	Sebaran permukiman Jumlah dan sebaran sekolah Jaringan jalan	Survei data sekunder	Data sekunder (Dinas Pendidikan, BPS)
Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Tapin	Kemudahan transportasi ke sekolah Alasan putus dan tidak melanjutkan sekolah	Survei sekunder Survei primer	Data Podes 2021 Kuisisioner kepada kepala sekolah dan komite sekolah
Menyusun strategi dan rekomendasi peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Tapin	Realisasi anggaran pendidikan Kebijakan pendidikan	Survei sekunder Survei primer	FGD dan Wawancara

### 3.5 Metode Analisis Data

Pada kajian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahap (Gambar 3.1). Tahap pertama adalah analisis pada skala makro untuk melihat kondisi eksisting pendidikan di Kabupaten Tapin dan membandingkannya dengan kondisi di kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan (*tujuan kajian 1*). Data RLS dan HLS dari tahun 2010 hingga 2022 dijadikan basis proyeksi untuk melihat kecenderungan angka RLS dan HLS pada 10 tahun mendatang. Proyeksi dilakukan dengan asumsi *business-as-usual*. Untuk melengkapi argumen, indikator yang berkaitan dengan RLS dan HLS juga dianalisis, seperti IPM, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

Tahap kedua adalah melakukan analisis pada skala internal, yaitu membandingkan data antar kecamatan di Kabupaten Tapin. Pada tahap ini, analisis spasial dilakukan berupa pemetaan ataupun visualisasi sebaran fasilitas. Data sebaran permukiman, sebaran fasilitas pendidikan, dan topografi ditumpang-susunkan (*overlay*) untuk mengidentifikasi jangkauan layanan pendidikan serta melihat apakah terdapat pola spasial yang mempengaruhi kondisi pendidikan (*tujuan kajian 2*). Sebagai pembanding, data kepadatan penduduk per kecamatan juga dianalisis untuk melihat apakah konsentrasi penduduk yang umumnya berada di perkotaan mempengaruhi akses dan kondisi pendidikan. Pada tahap kedua ini, angka putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah, dan rasio guru:murid juga dipetakan dan di-*overlay* dengan angka kemiskinan ekstrim per kecamatan untuk melihat apakah terdapat kecenderungan pola spasial tertentu. Jika data

yang sama tersedia pada unit desa, maka analisis spasial dilakukan hingga level kedetailan di tingkat desa.

Pada tahap ketiga, analisis dilakukan secara lebih mendetail untuk mengetahui faktor-faktor pembentuk keputusan untuk bersekolah (***tujuan kajian 3***) dengan mengacu pada *proxy* angka partisipasi murni, angka putus sekolah, dan angka tidak melanjutkan sekolah. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan melalui analisis kuesioner secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari analisis kuesioner dapat memberikan wawasan tentang persepsi dan pengalaman masyarakat maupun tenaga pendidik terkait keputusan bersekolah dan kondisi pendidikan di Kabupaten Tapin. Interpretasi analisis kuesioner dilakukan dengan membandingkan dan melihat keterkaitan antara kondisi pendidikan dengan data sektoral lainnya, seperti piramida penduduk, distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian, PDRB, dan profil anggaran pendidikan di Kabupaten Tapin.

### **3.6 Desain penelitian**

Desain penelitian mengacu pada 3 bentuk analisis yang mencakup analisis data sekunder, analisis data primer, dan analisis data spasial (gambar 3.2). Metode analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Tapin dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

#### **a. Analisis Data Sekunder**

Analisis ini mencakup gambaran kondisi pendidikan di Kabupaten Tapin berdasarkan data sekunder seperti studi pustaka, laporan penelitian, dan dokumen pemerintahan terkait. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data relevan dalam bentuk tabulasi, diagram, dan grafik. Tujuannya adalah untuk menyajikan data pendidikan yang sudah ada secara komprehensif dan memahami situasi eksisting.

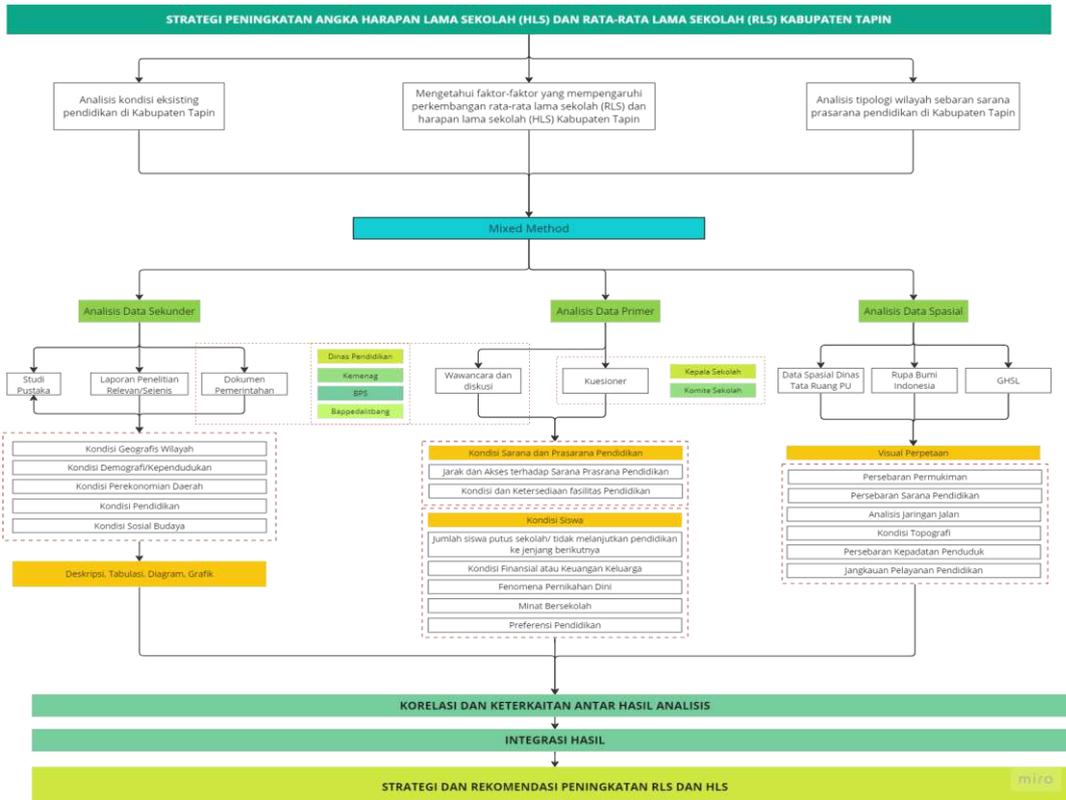
#### **b. Analisis Data Primer**

Analisis data primer melibatkan pengolahan data hasil kuesioner yang diberikan kepada responden (Kepala Sekolah dan Komite Sekolah) serta wawancara terstruktur dengan responden terkait (Dinas Pendidikan, Bappedalitbang, dan UPT Kementerian Agama Kabupaten Tapin). Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami data mengenai kondisi pendidikan secara riil,

serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap RLS dan HLS.

c. Analisis Data Spasial

Analisis spasial menggunakan data yang telah dikumpulkan melalui Rupa Bumi Indonesia (RBI) lalu dianalisis menggunakan sistem informasi geografis (SIG) untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi eksisting, persebaran pelayanan, dan jangkauan pelayanan. Dengan analisis data spasial, dapat diperoleh informasi mengenai distribusi geografis pendidikan, serta menyoroti aspek-aspek yang berkaitan dengan lokasi geografis di Kabupaten Tapin



**Gambar 3.2 Bagan Penelitian Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Lama Sekolah**

## BAB 4

### GAMBARAN WILAYAH KABUPATEN TAPIN

Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan ibukota Rantau. Sebelumnya Kabupaten Tapin merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kemudian dilakukan pemekaran sehingga memisahkan diri pada tahun 1956 menjadi Kabupaten sendiri. Berikut gambaran wilayah Kabupaten Tapin:

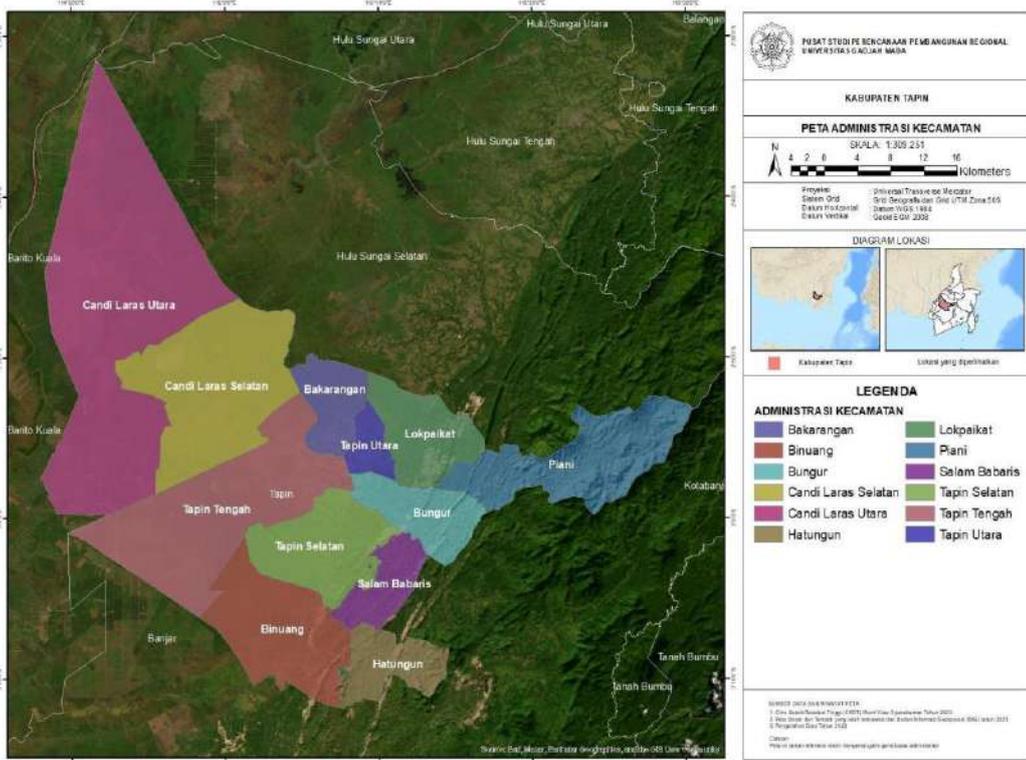
#### 4.1 Kondisi Geografis Wilayah

Kabupaten Tapin merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada 2°32'43" hingga 3°00'43" LS dan 114°46'13" hingga 115°30'33" BT. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tapin memiliki batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan, 9 kelurahan dan 126 desa dengan luas wilayah 2.174,95 km<sup>2</sup> atau 5,8% dari luas Kalimantan Selatan. Berdasarkan luasannya, daerah yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas 681,40 km<sup>2</sup> atau sebesar 31,33%, sedangkan daerah dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas 33,34 km<sup>2</sup> atau sebesar 1,49% dari luas keseluruhan Kabupaten Tapin. Berikut merupakan tabel administrasi wilayah per kecamatan di Kabupaten Tapin.

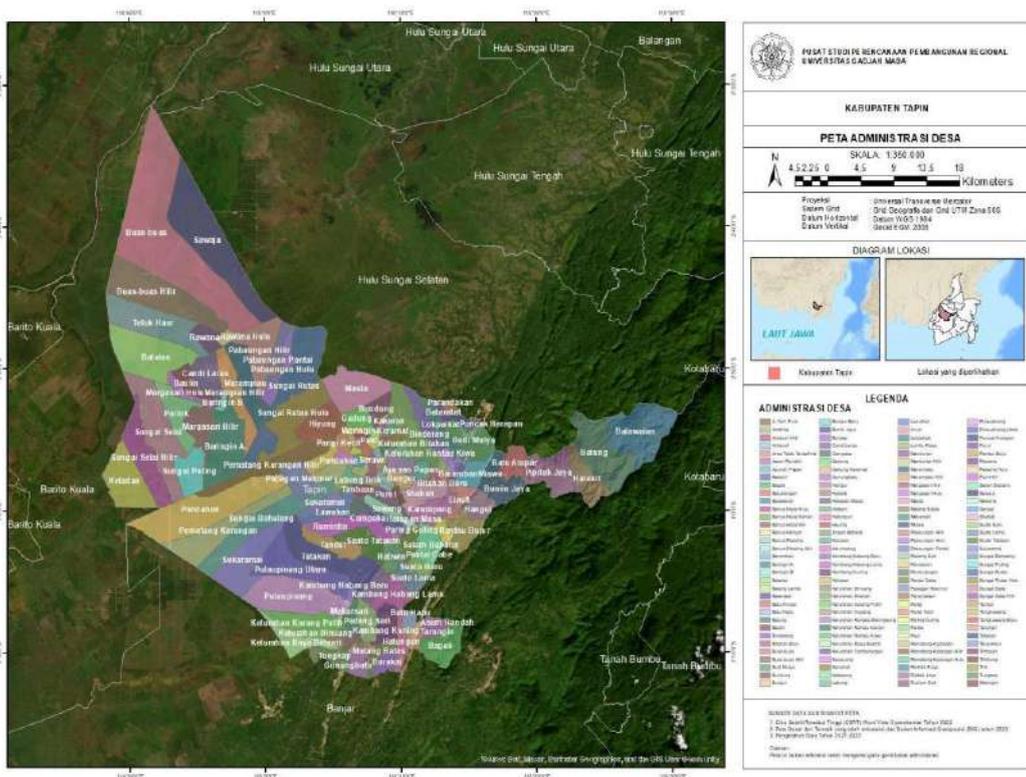
**Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Tapin**

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Kecamatan (Km <sup>2</sup> )
Binuang	Binuang	132,39
Hatungan	Hatungan	95,6
Tapin Selatan	Tambarangan	153,44
Salam Babaris	Salam Babaris	72,8
Tapin Tengah	Pematangan Karangan Hulu	309,56
Bungur	Bungur	91,26
Piani	Miawa	200,09
Lokpaikat	Lokpaikat	93,89
Tapin Utara	Rangda Malingkung	32,34
Bakarangan	Bakarangan	62,57
Candi Laras Selatan	Baringin	249,61
Candi Laras Utara	Margasari	681,4
<b>Kabupaten Tapin</b>		<b>2.174,95</b>

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka 2023; Olahan Penulis 2023



**Gambar 4.1** Peta Administrasi Kecamatan  
Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)



**Gambar 4.2** Peta Administrasi Kelurahan dan Desa  
Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)

#### 4.1.1 Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah (82,46%) Kabupaten Tapin berada pada ketinggian 0–7 meter, kecuali pada Kecamatan Piani yang cenderung berbukit. Berdasarkan ketinggiannya, Kabupaten Tapin dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu wilayah yang merupakan dataran tinggi (Kecamatan Hatungun, Piani, Salam Babaris, Bungur, dan sebagian Kecamatan Benuang) dan wilayah yang merupakan dataran rendah (Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Tapin Utara, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara). Kecamatan dengan dominasi kelereng >40 % paling luas berada di Kecamatan Piani, sedangkan Kecamatan Tapin Tengah merupakan kecamatan yang seluruh wilayahnya berada di kelereng 0-2 %. Berdasarkan kondisi topografi tersebut, Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya yang relatif rendah. Tingkat bahaya sedang hingga-menengah hanya sebesar 9% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tapin atau 19.727 hektar, tepatnya pada Kecamatan Piani.

Tabel 4.2 Topografi Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan (Ha)						Total
		0-2 %	>2-8%	>8-15%	>15-25%	>25-40%	>40%	
1.	Benuang	12.915	0	0	30	294	0	13.239
2.	Hatungun	0	264	6.070	2.110	250	860	9.560
3.	Tapin Selatan	15.184	160	0	0	0	0	15.344
4.	Salam Babaris	4.854	5576	730	500	160	460	7.280
5.	Tapin Tengah	30.956	0	0	0	0	0	30.956
6.	Bungur	5.476	0	0	2.780	440	430	9.126
7.	Piani	0	1.090	3.150	8.909	2.360	4.140	20.009
8.	Lokpaikat	7.369	250	860	580	330	0	9.389
9.	Tapin Utara	3.234	0	0	0	0	0	3.234
10.	Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
11.	Candi Laras Selatan	24.961	0	0	0	0	0	24.961
12.	Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
<b>Jumlah/Total</b>		<b>179.346</b>	<b>2.340</b>	<b>11.170</b>	<b>14.909</b>	<b>3.840</b>	<b>5.890</b>	<b>217.495</b>
<b>Persentase %</b>		<b>82.46</b>	<b>1.08</b>	<b>5.14</b>	<b>6.85</b>	<b>1.76</b>	<b>2.71</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka 2023; Statistik Kabupaten Tapin 2023 (diolah)

#### 4.1.2 Kondisi Klimatologi

Secara umum, suhu udara di Kabupaten Tapin berada di antara 22 - 42 derajat C pada tahun 2022 dengan rata-rata suhu udara tertinggi pada bulan Januari yaitu sebesar 330 C. Rata-rata kelembaban udara di Kabupaten Tapin tahun 2022 berada pada angka

75-85 persen. Pada tahun 2021, terdapat 216 hari hujan di Kabupaten Tapin dan yang terbanyak terjadi di Bulan Desember mencapai 26 hari hujan. Selaras dengan hal tersebut, tercatat bahwa bulan Desember 2021 memiliki penyinaran matahari paling sedikit di Kabupaten Tapin yaitu sebesar 50,5%, sedangkan penyinaran matahari terbanyak berada di bulan April yaitu sebesar 82,5%.

#### 4.1.3 Jenis Tanah

Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari 6 jenis yaitu organosol *gleyhumus*, podsolik merah kuning, *alluvial*, kompleks podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Sebagian besar (73,5%) tanah di Kabupaten Tapin merupakan jenis tanah organosol *gleyhumus*. Jenis tanah ini paling banyak terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah. Sementara itu, jenis tanah dengan persentase paling sedikit (2,57%) adalah jenis kompleks podsolik merah kuning, latosol dan litosol yang terletak di Kecamatan Piani.

**Tabel 4.3 Jenis Tanah di Kabupaten Tapin**

Jenis Tanah	Persentase (%)	Kecamatan
Organosol Gleyhumus	73,5	Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah
Podsolik Merah Kuning	18,23	Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat
Alluvial	5,7	Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara
Kompleks Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol	2,57	Kecamatan Piani

*Sumber: RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023; Statistik Kabupaten Tapin 2023 (diolah)*

Kabupaten Tapin memiliki kemampuan tanah yang relatif baik bagi budidaya pertanian. Sebesar 88 % dari Kabupaten Tapin mempunyai tekstur tanah sedang dan 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat di sebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin. selain tekstur tanah, Kabupaten Tapin memiliki tingkat kedalaman tanah yang relatif baik. Sebesar 85 % dari seluruh luas Kabupaten Tapin memiliki kedalaman tanah >30 cm. kedalaman tanah berhubungan dengan kemampuan akar tanaman yang dapat merambat, semakin besar kedalaman tanah maka berpotensi semakin baik tanah tersebut untuk dimanfaatkan untuk budidaya pertanian.

#### 4.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara dan Sungai Muning yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin. Sungai Negara dan Sungai Muning mengalir dari barat ke utara melalui Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta Tapin Tengah. Dengan dilaluinya Kabupaten Tapin oleh Sungai Negara dan Sungai Muning berdampak pada guna lahan Kabupaten Tapin yang mayoritas berupa rawa, yaitu sebesar 28.234,313 hektar. Sebagian rawa terdapat pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga dipengaruhi oleh drainase tanah di Kabupaten Tapin. Sebesar 11,36% dari Kabupaten Tapin merupakan daerah tergenang permanen dengan luasan 24.715,24 hektar, sedangkan daerah tidak tergenang sebesar 88% dari total wilayah Kabupaten Tapin dengan luasan 192.779,76 hektar.

#### 4.1.5 Guna Lahan

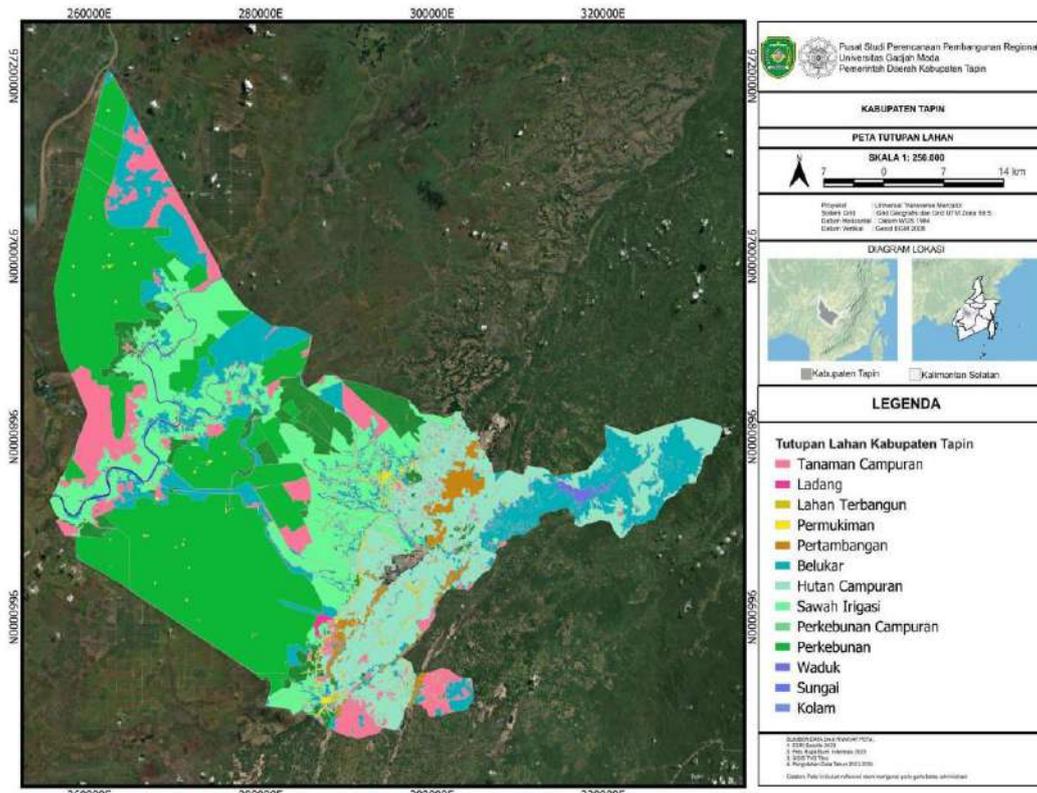
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, guna lahan Kabupaten Tapin terbagi menjadi dua peruntukan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai nilai sejarah, sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Di Kabupaten Tapin, 93% dari total wilayahnya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya. Tutupan lahan terbesar (72,8%) di Kabupaten Tapin merupakan perkebunan dan pertanian lahan basah.

**Tabel 4.4 Tutupan Lahan Kabupaten Melawi**

Tutupan Lahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase %
Kawasan hutan Lindung	11,362	5,22
Kawasan Sempadan Sungai	3,573	1,64
Kawasan lindung lainnya	35	0,02
Hutan Produksi Tetap	6,859	3,15
Hutan Produksi Konversi	7,292	3,35
Hutan Produksi Terbatas	924	0,42
Kawasan Pertanian Lahan Basah	64,098	29,47
Kawasan Pertanian Lahan Kering	8,281	3,81
Kawasan Peruntukan Hortikultura	1,151	0,53
Kawasan Peruntukan Perkebunan	94,422	43,41
Kawasan Pertambangan	6,188	2,85

<b>Tutupan Lahan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase %</b>
Kawasan permukiman	10,855	4,99
Kawasan industri	1,540	0,71
Lainnya	915	0,42
<b>Total</b>	<b>217,495</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (diolah)



**Gambar 4.3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tapin**

*Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)*

## 4.2 Demografi

Demografi merupakan pencatatan kependudukan berdasarkan umur, jenis kelamin, perkawinan, distribusi, kematian dan migrasi. Aspek demografi berpengaruh terhadap pembangunan, salah satunya data kuantitas, kualitas, dan distribusi penduduk dapat digunakan untuk merencanakan fasilitas pendidikan di suatu daerah. Berdasarkan data dari Kabupaten Tapin dalam Angka Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Tapin adalah 194.628 jiwa dengan penduduk laki-laki sejumlah 98.346 dan perempuan sebesar 96.282 jiwa.

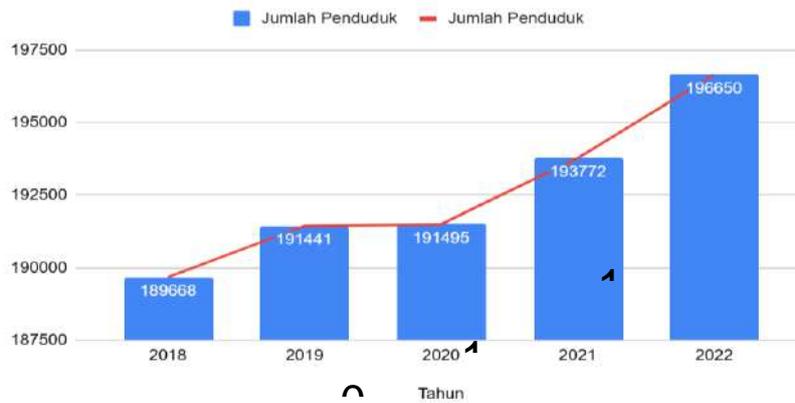
**Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin**

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2018	2019	2020	2021	2022
Binuang	31.298	31.687	31.258	31.683	32.191
Hatungan	9.285	9.438	9.256	9.338	9.545
Tapin Selatan	19.171	19.233	20.369	20.622	20.928
Salam Babaris	12.804	12.977	11.858	11.942	12.055
Tapin Tengah	19.792	19.984	21.195	21.583	22.030
Bungur	13.682	13.896	13.246	13.419	13.627
Piani	5.687	5.703	5.770	5.813	5.871
Lokpaikat	10.330	10.474	11.580	11.882	12.221
Tapin Utara	26.030	26.283	25.396	25.628	25.925
Bakarangan	9.675	9.769	10.047	10.200	10.381
Candi Laras Selatan	12.794	12.829	12.362	12.396	12.459
Candi Laras Utara	17.102	17.149	17.138	17.245	17.395
<b>Kabupaten Tapin</b>	<b>189.668</b>	<b>191.441</b>	<b>191.495</b>	<b>193.772</b>	<b>196.650</b>

Sumber: RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (diolah)

### 4.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan penduduk dari tahun ke tahun berdampak pada peningkatan kebutuhan fasilitas sosial termasuk pendidikan. Jika dibarengi dengan penyediaan pendidikan yang berkualitas, pertumbuhan penduduk dapat menjadi modal pembangunan daerah dengan bertambahnya tenaga kerja terdidik. Berdasarkan data Kabupaten Tapin Dalam Angka, jumlah penduduk Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023 dengan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2018-2019 pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin adalah 0,93%, namun pada tahun 2019-2020 hanya 0,028% yang kemungkinan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada tahun selanjutnya, yaitu 2020-2021, pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin mulai meningkat drastis sebesar 1,189% dan pada tahun 2021-2022 pertumbuhan penduduk meningkat jadi 1,485%.



**Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Tapin**

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

#### 4.2.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas daerah acuan. Kabupaten Tapin memiliki kepadatan penduduk yang tidak merata per kecamatan (Tabel 2.6 dan Gambar 2.4). Pada tahun 2022, Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah kecamatan Tapin utara, yaitu 801,64 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Candi Laras Utara, yaitu 25 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tinggi di Kecamatan Tapin Utara dapat dijelaskan dari konsentrasi fasilitas publik yang dapat menjadi pusat-pusat permukiman.

**Tabel 4.6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tapin**

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )				
	2018	2019	2020	2021	2022
Binuang	236,41	239,35	236,11	239,32	243,15
Hatungan	97,12	98,72	96,82	97,68	99,84
Tapin Selatan	124,94	125,35	132,75	134,4	136,39
Salam Babaris	175,88	178,26	162,88	164,04	165,59
Tapin Tengah	63,94	64,56	68,47	69,72	71,17
Bungur	149,92	152,27	145,15	147,04	149,32
Piani	28,42	28,5	28,84	29,05	29,34
Lokpaikat	110,02	111,56	123,34	126,55	130,16
Tapin Utara	804,89	812,71	785,28	792,46	801,64
Bakarangan	154,63	156,13	160,57	163,02	165,91
Candi Laras Selatan	51,26	51,4	49,53	49,66	49,91
Candi Laras Utara	25,1	25,17	25,15	25,31	25,53

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2023 (diolah)



#### 4.2.3 Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan, yang umumnya dinyatakan dalam 1 penduduk laki-laki per 100 perempuan. Pada tahun 2022, *sex ratio* Kabupaten Tapin adalah 102,47 (98.346 penduduk laki-laki berbanding 96.282 penduduk perempuan). Secara umum, dalam 5 tahun terakhir, Kabupaten Tapin memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

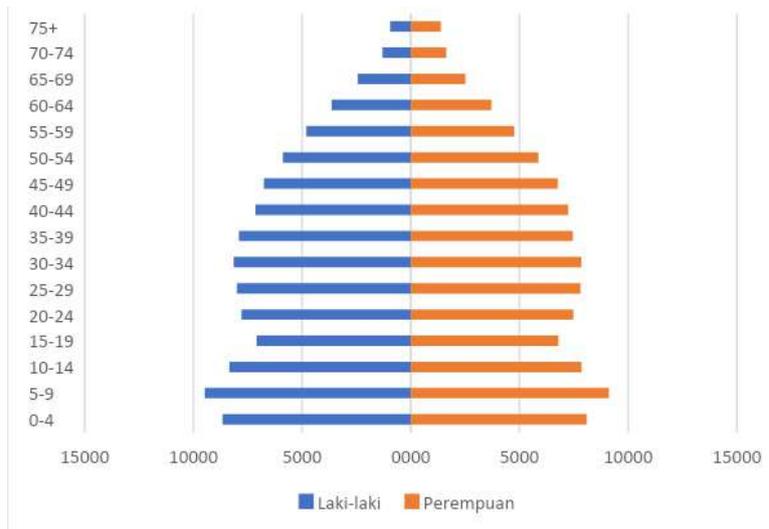
Tabel 4.7 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Tapin

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin				
	2018	2019	2020	2021	2022
Binuang	103	99	100,1	100	99,44
Hatungan	100	100	100,2	100	99,98
Tapin Selatan	99	98	98,5	98	98,22
Salam Babaris	106	106	106,8	107	106,56
Tapin Tengah	104	101	107,7	108	108,38
Bungur	103	99	99,2	99	98,33
Piani	105	105	106	106	106,07
Lokpaikat	98	99	99,1	99	98,78
Tapin Utara	103	99	99,2	99	98,29
Bakarangan	99	102	102	102	102,48
Candi Laras Selatan	102	103	104,1	104	104,35
Candi Laras Utara	101	106	109,7	110	111,21
<b>Kabupaten Tapin</b>	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>102,7</b>	<b>103</b>	<b>102,67</b>

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2023 (diolah)

#### 4.2.4 Rasio Ketergantungan

*Dependency ratio* atau rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia non-produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia diatas 65 tahun) dengan usia produktif (usia 15-65). Angka *dependency ratio* di Kabupaten Tapin pada tahun 2022 sebesar 46,5%, yang mengindikasikan bahwa pada 100 penduduk usia produktif menanggung beban 46 penduduk non produktif. Hal ini dapat dijelaskan dari piramida penduduk Kabupaten Tapin yang berbentuk konstruktif (gambar 2.5). Banyaknya penduduk usia produktif dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam perkembangan wilayah Kabupaten Tapin. Di satu sisi, banyaknya penduduk usia produktif, jika dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, dapat berpotensi meningkatkan sumber daya yang manusia yang berkualitas yang dapat digunakan untuk melakukan ekspansi ekonomi. Di sisi lain, banyaknya penduduk usia produktif juga dapat menjadi tantangan berupa penyediaan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja agar tidak menganggur.



**Gambar 4.6 Piramida Penduduk Kabupaten Tapin**

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

#### 4.2.5 Penduduk Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun yang sedang bekerja, sedang tidak bekerja namun memiliki pekerjaan, dan pengangguran. Penduduk angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai kuantitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Di Kabupaten Tapin, jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun tahun 2012 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tapin berjumlah 84.706 jiwa, lalu pada 10 tahun setelahnya meningkat sebanyak 21% menjadi 103.316 jiwa. Peningkatan angkatan kerja ini selaras dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tapin selama 10 tahun terakhir.

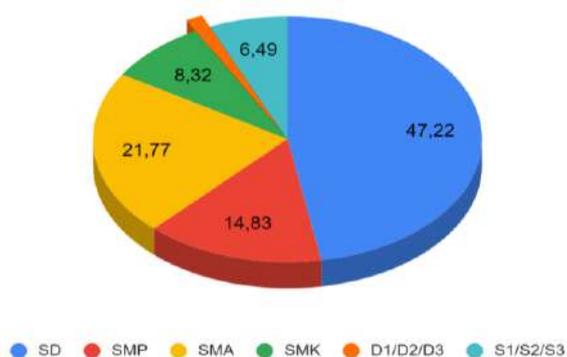


**Gambar 4.7 Grafik Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

Dari 103.316 penduduk angkatan kerja, 47,22% memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat dan hanya 7,86% yang memiliki ijazah jenjang perguruan tinggi ( D1/D3

hingga sarjana. Angka ini Jenjang mencerminkan bagaimana kualitas sumberdaya di Kabupaten Tapin. Angkatan kerja lulusan SD/ sederajat cenderung memiliki keahlian yang lebih rendah dari pada penduduk yang lulusan SMA/ sederajat maupun perguruan tinggi. Peningkatan pendidikan masyarakat Kabupaten Tapin menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Tapin. Banyaknya angkatan kerja yang memiliki ijazah tertinggi sekolah dasar dapat berarti bahwa sebagian besar penduduk bekerja di sektor ekstraksi. Umumnya, lulusan perguruan tinggi memiliki potensi lebih tinggi untuk bekerja di sektor industri hingga kreatif.

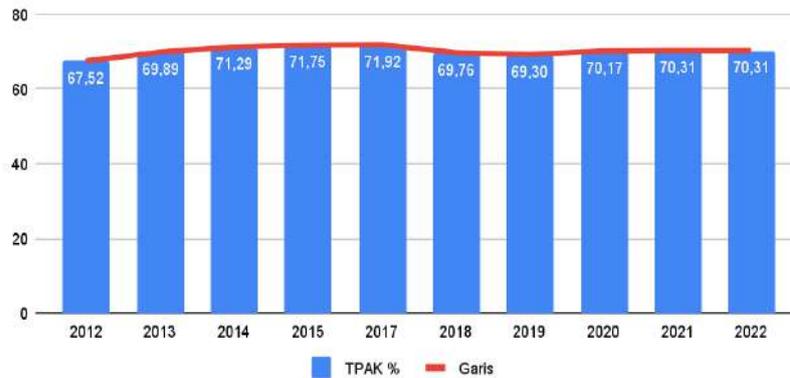


**Gambar 4.8 Grafik Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

#### 4.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK merepresentasikan kontribusi penduduk dalam suatu wilayah terhadap kegiatan ekonomi. TPAK dihitung dengan melihat persentase penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Besarnya penduduk angkatan kerja di suatu daerah, jika tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja, dapat mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran. Peningkatan angka TPAK mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut semakin banyak penduduk yang terserap lowongan kerja, sedangkan penurunan TPAK mengindikasikan banyak penduduk yang menjadi pengangguran maupun diberhentikan dari tempat kerja. Pada 10 tahun terakhir, TPAK Kabupaten Tapin cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012-2017, TPAK kabupaten Tapin meningkat dari 67,52% hingga 71,92%, sementara di tahun 2017-2019 menurun hingga mencapai 69,30%, yang kemungkinan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada Tahun 2019-2022, TPAK Kabupaten Tapin mengalami kenaikan dari 69,30% menjadi 70,31%.



**Gambar 4.9 Grafik Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

Angka TPAK berkaitan dengan jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Tapin. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Pada tahun 2012, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Tapin adalah 79.042 jiwa, yang kemudian meningkat 25,2% menjadi 99.027 pada tahun 2022. Pertumbuhan penduduk yang bekerja lebih besar daripada pertumbuhan angkatan kerja, yang mengindikasikan adanya penyerapan kerja yang signifikan dari tahun ke tahun.



**Gambar 4.10 Grafik Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Tapin tahun 2012-2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

#### 4.2.7 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran di Kabupaten Tapin memiliki tren perkembangan yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 5.664 jiwa turun drastis menjadi 859 jiwa di tahun 2015. Sementara itu, tahun 2015 hingga 2017 terjadi peningkatan drastis jumlah pengangguran menjadi 4301 jiwa. Meningkatnya angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal menjadi

salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya pengangguran, hal itu terjadi karena laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan kesempatan kerja yang ada (Sirait & Marhaeni, 2013)



**Gambar 4.11 Grafik Jumlah Penduduk yang Menganggur Kabupaten Tapin tahun 2012-2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

Secara lebih detail, berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jenjang SMP dan SMA merupakan jenjang yang memiliki persentase pengangguran paling banyak. Hal ini dapat disebabkan banyaknya penawaran tenaga kerja yang diperlukan adalah jenjang SD, sedangkan lowongan kerja untuk jenjang SMP dan SMA lebih sedikit yang terserap.

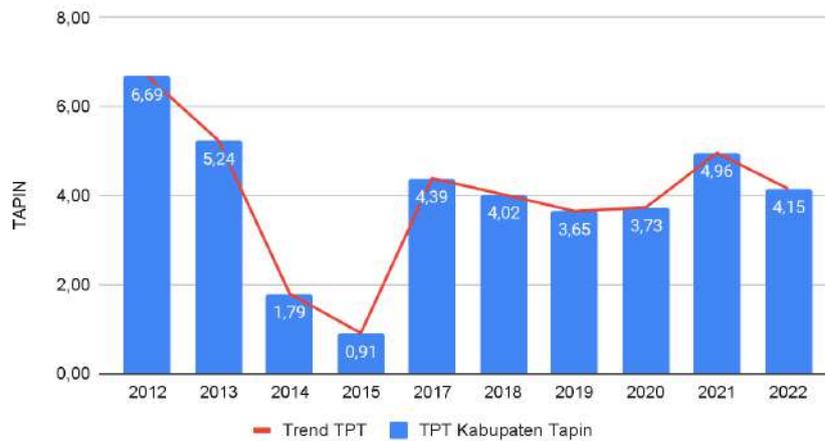
**Tabel 4.8 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase pengangguran terhadap angkatan kerja
SD	50.252	1.766	52.018	3,39
SMP	14.770	732	15.502	4,72
SMA	24.747	1.572	26.319	5,97
Perguruan Tinggi	92.587	219	9.477	2,31
Jumlah/total	99.027	4.289	103.316	4,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

Lebih lanjut, pengangguran dapat dinilai dari tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang tidak bekerja atau pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu

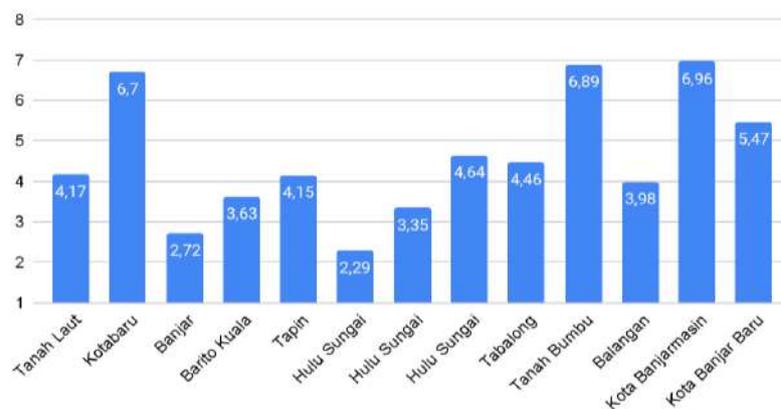
wilayah mengindikasikan bahwa pada wilayah tersebut belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal, atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan lowongan pekerjaan pada daerah tersebut. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tapin pada 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif (Gambar 2.7). Pada tahun 2012 - 2015, TPT mengalami penurunan dari 6,69% menjadi 0,91%. Setelah itu, pada tahun 2017 angka TPT mengalami kenaikan drastis dari 0,91% menjadi 4,39%. Pada tahun 2018 - 2019, angka TPT mengalami penurunan dari 4,02% menjadi 3,65% karena adanya pandemi Covid-19.



**Gambar 4.12 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka**

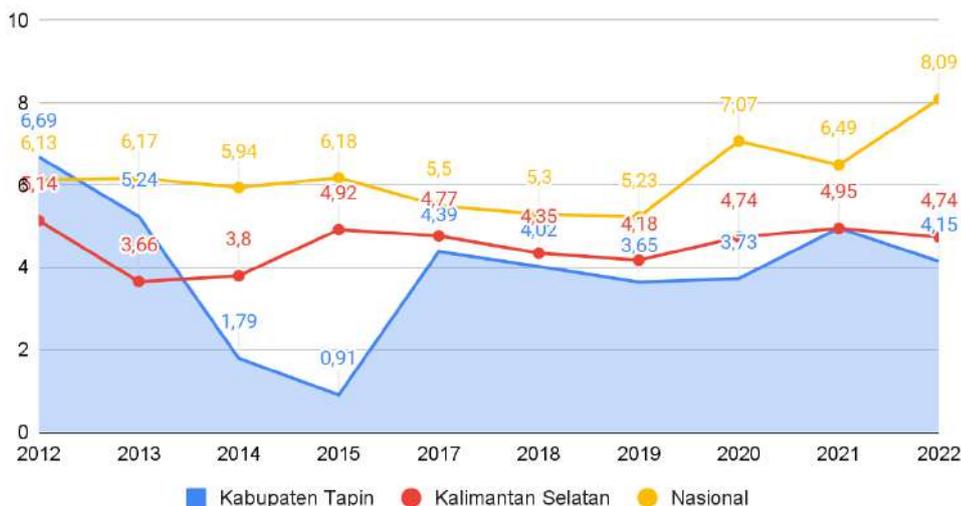
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan, angka TPT Kabupaten Tapin pada tahun 2022 berada pada peringkat 5 dari 13 kabupaten/kota (Gambar 2.8). Pada level provinsi, angka TPT tertinggi adalah di Kota Banjarmasin (6,96%) sementara angka TPT terendah berada pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2,29). Pada level nasional, angka TPT Kabupaten Tapin juga cenderung lebih rendah. Angka TPT rata-rata secara nasional adalah 8,09, sementara provinsi adalah 4,74%, dan Kabupaten Tapin adalah 4,15% (Gambar 2.9).



**Gambar 4.13 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Selatan**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

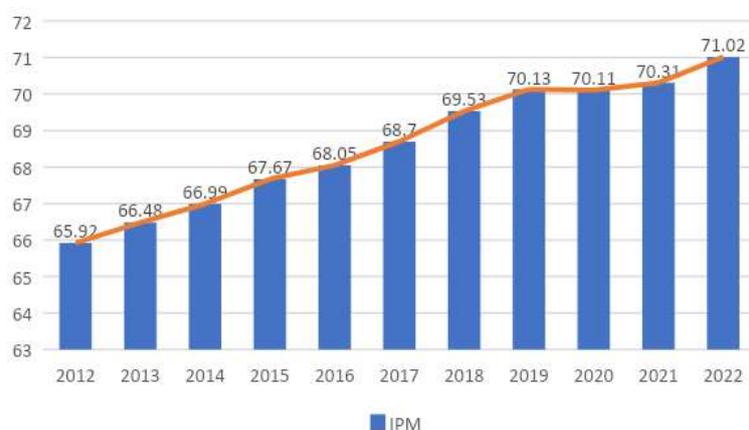


**Gambar 4.14 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

#### 4.2.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan yang diukur melalui indikator pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. IPM Kabupaten Tapin pada 10 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 65,92 pada tahun 2012 menjadi 71,02 di tahun 2022 (Gambar 2.10). Sejak tahun 2019, IPM Kabupaten Tapin masuk dalam kategori tinggi karena memiliki nilai lebih dari 70.

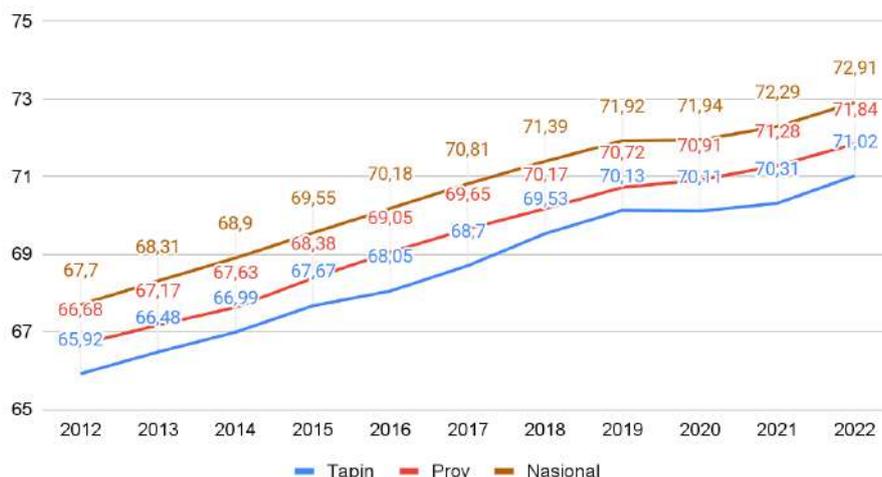


**Gambar 4.15 IPM Kabupaten Tapin**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 2023 (diolah)

Walaupun IPM di Kabupaten Tapin meningkat dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Tapin (71,02) masih di bawah IPM provinsi (71,82) maupun nasional (72,91). Pada skala

provinsi, IPM Kabupaten Tapin berada pada peringkat 5 dari 13 Kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, dimana peringkat satu diduduki oleh Kota Banjarbaru. Pada skala nasional, Kabupaten Tapin berada pada peringkat 242 dari 549 kabupaten/kota.



**Gambar 4.16 Grafik Perbandingan IPM**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 2023 (diolah)

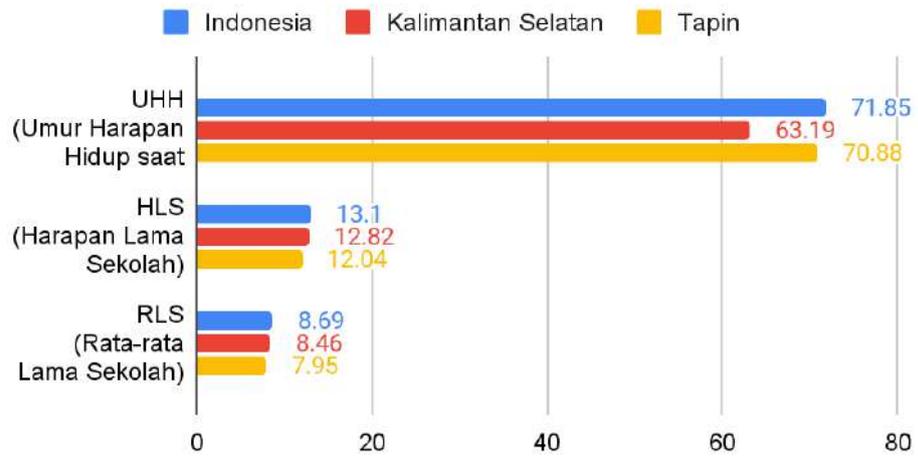
Namun demikian, jika dilihat berdasarkan komponen pembentuk IPM, Kabupaten Tapin tidak selalu berada di bawah rata-rata provinsi ataupun nasional. Dalam perhitungan IPM, terdapat tiga dimensi, yaitu kesehatan (umur umur harapan hidup/UHH), pendidikan (harapan lama sekolah/HLS dan rata-rata lama sekolah/RLS), serta ekonomi (pengeluaran per kapita), sesuai dengan arahan dari United Nations Development Programme (UNDP). Nilai harapan hidup Kabupaten Tapin lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan, walaupun masih lebih rendah dari angka nasional. Sementara itu, angka pengeluaran per kapita Kabupaten Tapin lebih tinggi dari rata-rata nasional walaupun masih lebih rendah dari pengeluaran per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi untuk meningkatkan angka RLS dan HLS Kabupaten Tapin, yang keduanya berada di bawah rata-rata angka provinsi dan nasional. Pada konteks Kabupaten Tapin, peningkatan RLS dan HLS akan dapat memberikan efek positif yang lebih besar terhadap peningkatan IPM.

**Tabel 4.9 Perbandingan Komponen dan Pertumbuhan IPM**

	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
Indonesia	71.85	13.10	8.69	Rp11,479	72.91	0.86
Kalimantan Selatan	63.19	12.82	8.46	Rp12,469	71.84	0.79
Tapin	70.88	12.04	7.95	Rp12,247	71.02	1.01

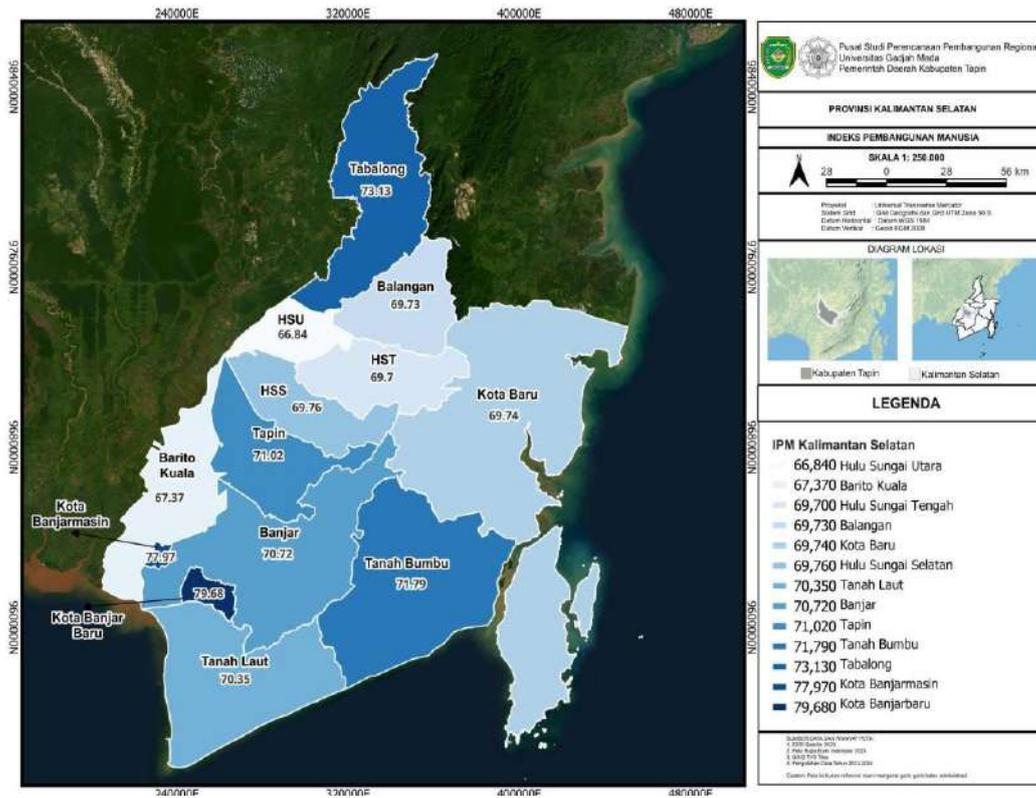
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Perbandingan Komponen IPM Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat serta Dimensi Pengetahuan Tahun 2022



**Gambar 4.17 Perbandingan Komponen IPM Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022*



**Gambar 4.18 Peta Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)

## 4.3 Kondisi Pendidikan

### 4.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

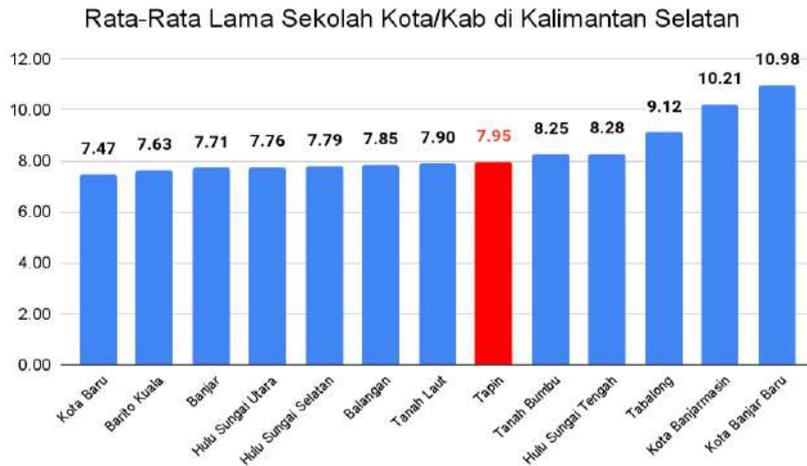
Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata waktu atau jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah (RLS) dapat mengindikasikan seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh suatu penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai RLS maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Sebagai contoh, tamatan SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamatan SMP diperhitungkan selama 9 tahun, sedangkan untuk tamatan SMA diperhitungkan lama sekolah 12 tahun, tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak.

**Tabel 4.10 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tapin	6,62	6,73	6,84	6,99	7,17	7,43	7,44	7,53	7,54	7,75	7,76	7,77	7,95
Kalimantan Selatan	7,25	7,37	7,48	7,59	7,6	7,76	7,89	7,99	8	8,2	8,29	8,34	8,46
Nasional	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2023

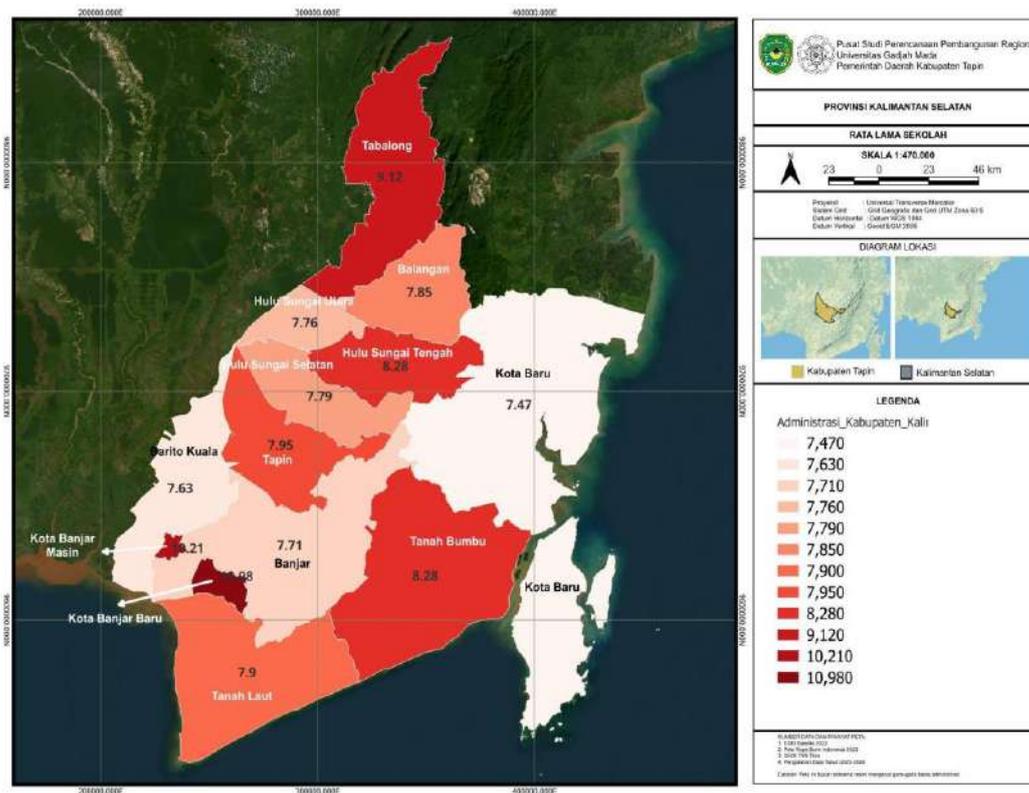
Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten tapin sebesar 7,95. Artinya lama waktu sekolah yang dihabiskan oleh penduduk Tapin usia 25 tahun ke atas kurang lebih sekitar 7,95 tahun atau setara duduk di bangku sekolah menengah pertama. Angka ini menempati posisi keenam dari 13 kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi masih jauh dari rata-rata provinsi yakni sebesar 8,49 dan rata-rata Nasional sebesar 8,69. RLS di Kabupaten Tapin, jika ditinjau dari peringkat nasional, masih tergolong cukup rendah. Kabupaten Tapin berada pada peringkat 273 dari 548 kabupaten di seluruh Indonesia. RLS tertinggi di Indonesia adalah Kota Banda Aceh dengan angka 13,03 atau rata rata penduduk di Kota Banda Aceh minimal menamatkan sekolah pada jenjang Diploma 1. Adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara Kabupaten Tapin dengan angka RLS nasional menuntut adanya perbaikan dalam hal kualitas pendidikan.



**Gambar 4.19 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah**  
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2023



**Gambar 4.20 Grafik Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah**  
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2023



**Gambar 4.21** Peta Rata Lama Sekolah Kalimantan Selatan

Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)

### 4.3.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu representasi kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan atau harapan lamanya tahun bersekolah yang dapat dirasakan oleh anak-anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk dengan usia 7 tahun ke atas. Sama seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) juga merupakan salah satu indikator penting penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masuk dalam dimensi pengetahuan.

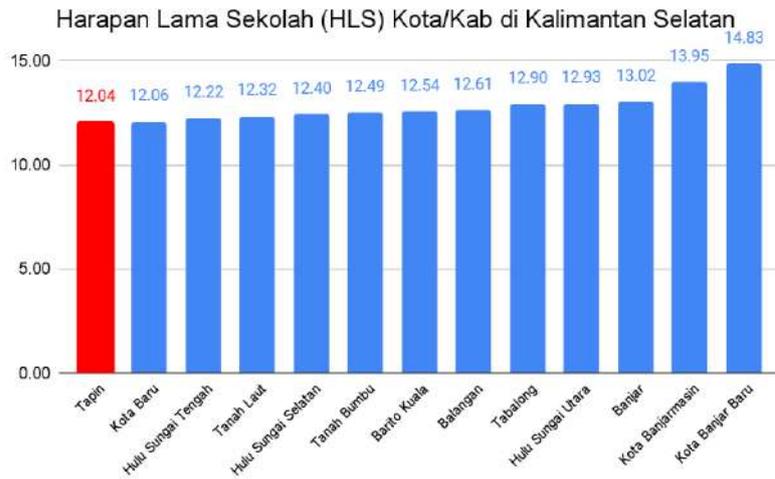
**Tabel 4.11 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tapin	10,32	10,53	10,74	10,95	11,17	11,21	11,24	11,52	11,85	11,86	11,94	11,95	12,04
Kalimantan Selatan	10,86	11,14	11,54	11,67	11,96	12,21	12,29	12,46	12,50	12,52	12,68	12,81	12,82
Nasional	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2023

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tapin sebesar 12,04 tahun yang berarti penduduk dengan usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Tapin memiliki kesempatan atau harapan untuk menempuh pendidikan selama kurang lebih 12 tahun atau setara dengan tamat sekolah menengah atas (SMA). Apabila dibandingkan dengan kota/kab lain di Provinsi Kalimantan Selatan, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tapin masih relatif tertinggal. Tercatat bahwa HLS Kabupaten Tapin berada pada peringkat 13 dari 13 Kabupaten di Kalimantan Selatan dan peringkat 497 dari 548 Kabupaten di seluruh Indonesia. Jika ditinjau dari fungsinya, angka HLS menggambarkan potensi bersekolah, sementara RLS menggambarkan kondisi pendidikan yang telah dilalui. Semakin sedikit *gap* antara HLS dan RLS maka semakin baik kualitas pendidikan yang berada di wilayah bersangkutan.

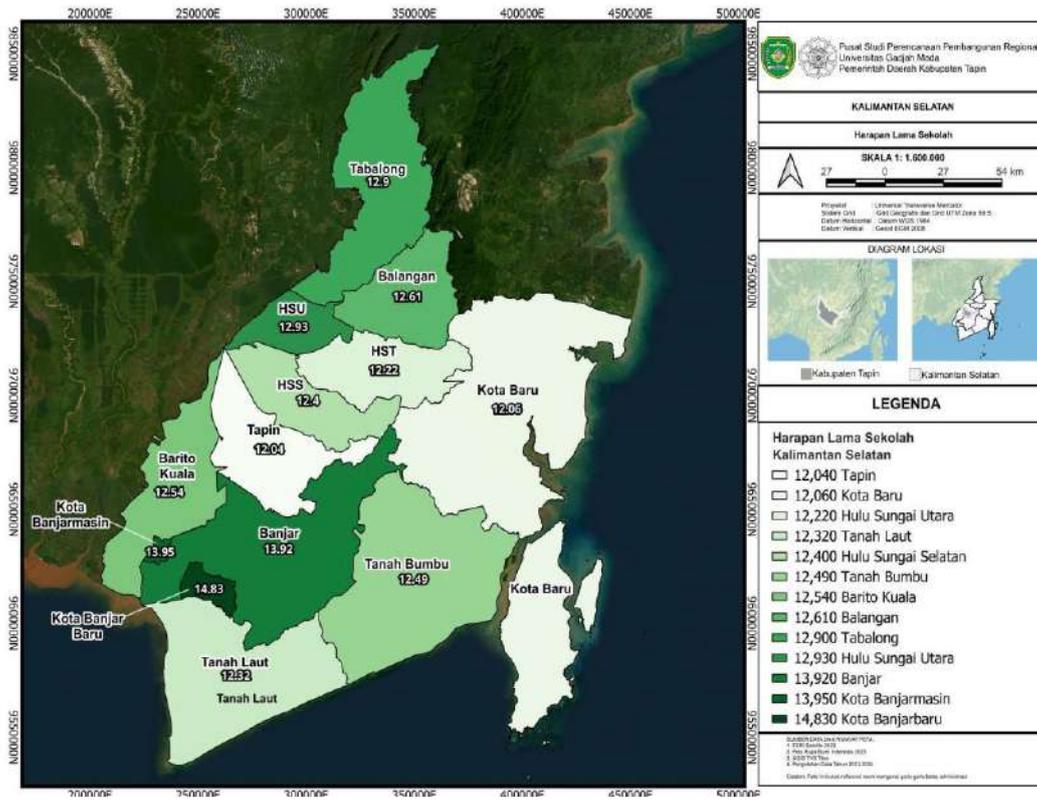
HLS tertinggi di Indonesia berada pada Kota Banda Aceh dengan angka HLS sebesar 17,01. Dari angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat yang berada di Kota Banda Aceh berkesempatan dapat menempuh pendidikan hingga tamat sarjana/S1. Hal yang sama juga diharapkan terjadi di Kabupaten Tapin, semakin tinggi HLS dan RLS, maka semakin baik pula kualitas pendidikan yang berada pada wilayah tersebut.



**Gambar 4.22**  
**Grafik Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah**  
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2023



**Gambar 4.23 Grafik Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah**  
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2023



**Gambar 4.24 Peta Harapan Lama Sekolah**

Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)

### 4.3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat diartikan sebagai persentase atau proporsi penduduk yang bersekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APS digunakan sebagai salah satu indikator tercapainya pembangunan di bidang pendidikan pada suatu wilayah. Semakin tinggi APS di suatu daerah menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di daerah tersebut.

**Tabel 4.12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tapin**

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tapin								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
APS SD (7-12 Tahun)	99,98	98,83	98,8	98,88	100	100	99,47	99,41	99,38
APS SMP (13-15 Tahun)	97,33	97,35	100	97,17	95,99	94,22	97,25	96,74	97,1
APS SMA (16-18 Tahun)	80,05	73,23	73,4	56,44	56,44	62,97	67,65	68,08	67,81

Sumber: BPS Kabupaten Tapin (2023)

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tapin APS anak laki-laki cenderung lebih tinggi daripada APS anak perempuan, terutama pada jenjang SMP dan SMA (sementara pada jenjang SD, APS laki-laki lebih rendah daripada perempuan). Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan gender pada akses terhadap pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jika dilihat secara keseluruhan (laki-laki dan perempuan), APS pada jenjang sekolah dasar mencapai angka 99,38 persen. Angka ini mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, APS pada jenjang SD jauh lebih tinggi dibandingkan dengan APS pada jenjang SMP (97,10 persen) dan jenjang SMA (67,81 persen).

### 4.3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan jumlah murid pada jenjang tertentu (SD, SMP, SMA) terhadap jumlah penduduk pada usia sesuai jenjang tertentu. Angka partisipasi kasar dapat lebih dari 100 persen karena dimungkinkan ada penduduk yang mengenyam pendidikan yang tidak sesuai dengan jenjang usianya. Seperti pada tahun 2022, APK pada jenjang sekolah dasar mencapai 113,08 yang mengindikasikan bahwa pada 100 penduduk yang berusia 7-12 tahun, terdapat 113 orang yang bersekolah pada jenjang sekolah dasar. Dalam hal ini berarti dimungkinkan ada 13 orang yang mengenyam pendidikan SD padahal usianya tidak masuk ke dalam rentang 7-12 tahun.

**Tabel 4.13 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin**

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
APK SD (7-12 Tahun)	114,23	113,9	113,13	110,93	114,81	113,04	112,66	114,35	113,08
APK SMP (13-15 Tahun)	86,33	83,37	102,67	86,14	85,96	76,63	86,23	84,52	89,62
APK SMA (16-18 Tahun)	75,61	66,59	60,93	55,56	59,63	68,35	65,08	63,1	64,59

Sumber: BPS Kabupaten Tapin (2023)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa APK Kabupaten Tapin cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, APK jenjang SMP berada pada angka 86,23 lalu turun menjadi 84,52 pada tahun 2021 dan kembali naik menjadi 89,62 pada tahun 2022. Fluktuasi ini juga terjadi pada jenjang SMA selama tahun 2020 sampai dengan 2022. APK Kabupaten Tapin juga cenderung semakin kecil pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah di Kabupaten Tapin terkait pendidikan masih belum memperlihatkan hasil yang konsisten dari tahun ke tahun.

#### 4.3.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) merupakan perbandingan jumlah murid yang bersekolah pada jenjang tertentu sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah keseluruhan kelompok umur tersebut. APM menunjukkan banyaknya murid yang bersekolah sesuai dengan kelompok umurnya. Misalnya, terdapat 90 murid dengan usia 7-12 pada jenjang SD, sementara jumlah penduduk di wilayah tersebut yang berusia 7-12 tahun adalah 100 penduduk, maka APM jenjang SD di wilayah tersebut adalah 90. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat 10 penduduk pada usia 7-12 tahun belum dapat mengakses sekolah sesuai jenjang dan umur idealnya. APM di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.14 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin**

Angka Partisipasi Murni (APM)	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(APM) SD (7 - 12 Tahun)	99,07	98,83	98,8	98,88	100	100	98,98	99,41	99,4
(APM) SMP (13-15 Tahun)	63,34	73,56	73,66	80,28	71	72,06	72,2	72,42	72,9
(APM) SMA (16-18 Tahun)	58,17	56,42	51,2	51,73	53,1	58,69	54,79	54,76	54,9

Sumber: BPS Kabupaten Tapin (2023)

APM di Kabupaten Tapin pada jenjang SD memiliki angka yang cukup tinggi, yaitu mencapai 99,4 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pada 100 orang penduduk Kabupaten Tapin yang berusia 7-12 tahun, ada sebanyak 99 siswa yang bersekolah sesuai dengan umur dan jenjang pendidikan. Akan tetapi, APM jenjang SMP dan SMA masih tergolong rendah, yaitu 72,9 untuk SMP dan 54,9 untuk SMA di tahun 2022. Dari hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tapin dapat mengakses jenjang pendidikan sekolah dasar, namun untuk jenjang SMP dan SMA, masih belum dapat diakses secara optimal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketersediaan sekolah, aksesibilitas, jangkauan pelayanan, kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, ataupun motivasi belajar. Semakin tinggi APM di Kabupaten Tapin, maka semakin tinggi pula kualitas tingkat pendidikan di wilayah tersebut.

#### 4.3.6 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan angka yang merepresentasikan banyaknya penduduk di suatu wilayah yang berhenti bersekolah pada jenjang tertentu. Angka putus sekolah di Kabupaten Tapin antar kecamatan masih tergolong tinggi. Alasan cukup tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Tapin disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan data Dapodik Kabupaten Tapin Tahun 2020, siswa putus sekolah di Kabupaten Tapin disebabkan oleh faktor ekonomi, membantu orang tua, motivasi bersekolah, sulitnya akses, dan pernikahan dini. Penurunan angka putus sekolah memerlukan strategi yang bersifat lintas sektor karena dipengaruhi oleh persoalan ekonomi, sosial dan budaya.

Tabel 4.15 Jumlah APS dan ATS di Kabupaten Tapin

KECAMATAN	APS /ATS		Jumlah	Pendidikan Akhir (Lulus)			Pendidikan Akhir (Tidak Lulus)			Alasan putus sekolah			
	L	P		SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	Faktor Ekonomi	Faktor Sosial	Faktor Budaya	Faktor Spasial
Bakarangan	60	38	98	52	8	-	36	1	1	41	6	13	0
Binuang	28	25	53	24	16	-	12	-	-	28	4	0	0
Bungur	51	41	92	75	12	-	5	-	-	85	3	4	0
Candi Laras Selatan	27	22	49	29	7	-	-	3	9	-	-	-	-
Candi Laras Utara	36	47	83	58	17	-	8	-	-	77	7	0	0
Lokpaikat	23	28	51	33	9	-	9	-	-	24	12	12	3
Hatungun	26	10	36	17	16	-	3	-	-	15	21	0	0
Piani	42	35	77	47	10	-	20	-	-	65	12	0	0
Salam Babaris	11	4	15	3	-	-	12	-	-	12	0	0	0

Tapin Selatan	53	48	101	68	13	0	20	0	0	54	27	27	0
Tapin Tengah	80	69	149	125	9	-	15	-	-	30	6	72	0
Tapin Utara	12	3	15	8	3	-	4	-	-	8	6	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>449</b>	<b>370</b>	<b>819</b>	<b>539</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>439</b>	<b>104</b>	<b>129</b>	<b>3</b>

Sumber: Dapodik Kabupaten Tapin (2020)

#### 4.3.7 Fasilitas Pendidikan

Di Kabupaten Tapin, fasilitas pendidikan terbagi menjadi 2 satuan pendidikan yaitu pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal merupakan satuan pendidikan yang harus ditempuh melalui sekolah dengan rentang waktu yang telah ditentukan berdasarkan jenjangnya. Pendidikan formal dapat berupa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan informal merupakan satuan pendidikan yang ditempuh di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bimbingan belajar yang tidak terikat dengan lembaga pendidikan formal. Beberapa contoh sekolah informal di Kabupaten Tapin seperti Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Hingga saat ini terdapat 197 SD/ sederajat yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin dengan rincian 178 Sekolah Dasar (SD), 17 Madrasah Ibtidaiyah, dan 2 Sekolah Dasar luar biasa (SDLB). Pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat terdapat sejumlah 27 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 14 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 2 Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB). Fasilitas pendidikan jenjang SMP/ sederajat tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Tapin, atau setidaknya terdapat 1 SMP/ sederajat di tiap kecamatan. Fasilitas pendidikan jenjang SMA/ sederajat hanya terdapat di 9 dari 12 kecamatan di Kabupaten Tapin. Total terdapat 9 Sekolah Menengah Atas (SMA), 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 7 Madrasah Aliyah (MA). Terdapat 3 kecamatan yang sama sekali tidak memiliki fasilitas pendidikan jenjang SMA/ sederajat di wilayahnya, yaitu Kecamatan Bungur, Lokpaikat, dan Bakaragan. Hal ini mungkin dapat menjelaskan mengapa angka RLS Kabupaten Tapin sebesar 7,95 yang mencerminkan kelas 2 SMP/ sederajat. Terdapat kemungkinan sejumlah siswa memutuskan tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat karena kesulitan akses fasilitas pendidikan.

**Tabel 4.16 Jumlah Fasilitas Pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Tapin**

No	Kecamatan	Sekolah Dasar			TOTAL	Sekolah Menengah Pertama			TOTAL	Sekolah Menengah Atas				TOTAL
		SD	MI	SDLB		SMP	MTS	SMPLB		SMA	SMK	MA	SMALB	
Jumlah		178	17	2		27	14	2		9	3	7	2	
1	Binuang	22	2	1	25	5	3	2	10	3	1	1	1	6
2	Hatungun	11	0	0	11	1	1	0	2	0	0	1	0	1
3	Tapin Selatan	21	3	0	24	1	3	0	4	1	1	1	0	3
4	Salam Babaris	12	0	0	12	2	1	0	3	1	0	1	0	2

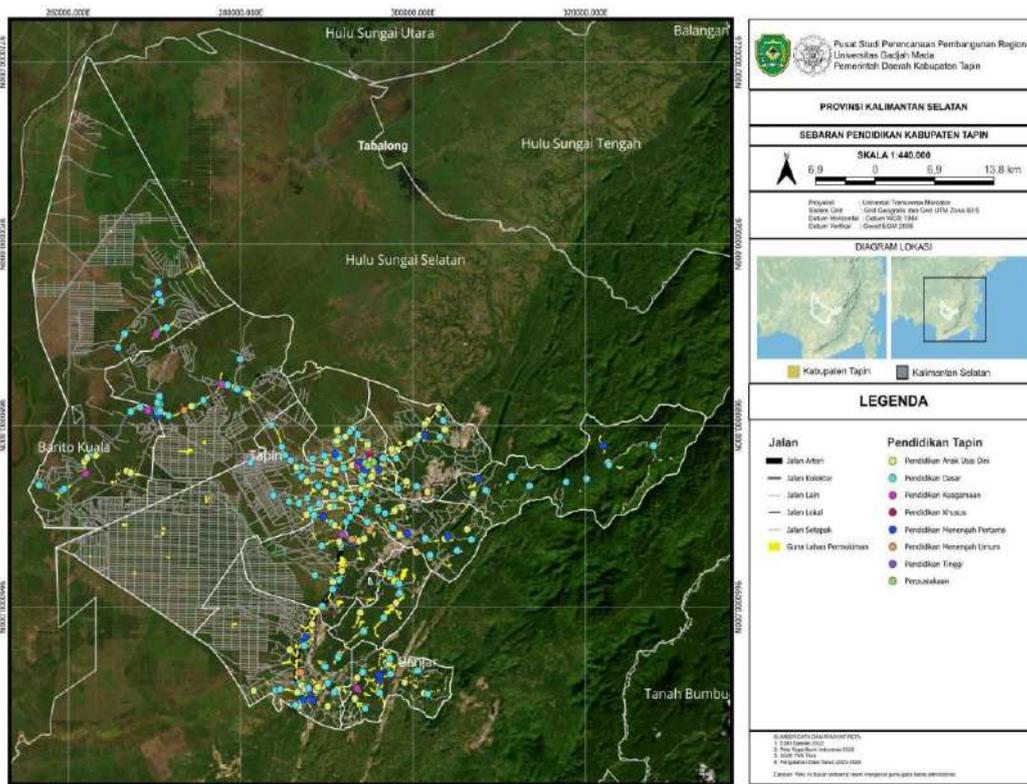
5	Tapin Tengah	21	6	0	27	3	0	0	3	1	0	0	0	1
6	Bungur	13	1	0	14	2	0	0	2	0	0	0	0	0
7	Piani	10	0	0	10	2	0	0	2	1	0	0	0	1
8	Lokpaikat	8	2	0	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0
9	Tapin Utara	18	2	1	21	3	3	0	6	1	1	1	1	4
10	Bakarangan	11	0	0	11	2	0	0	2	0	0	0	0	0
11	Candi Laras Selatan	14	0	0	14	2	0	0	2	1	0	0	0	1
12	Candi Laras Utara	17	1	0	18	3	3	0	6	0	0	2	0	2

Sumber: Dapodik Kabupaten Tapin 2022, Podes Kabupaten Tapin 2021, Dokumen Kemenag Kabupaten Tapin

**Tabel 4.17 Fasilitas Pendidikan Sekolah Informal Kabupaten Tapin 2023**

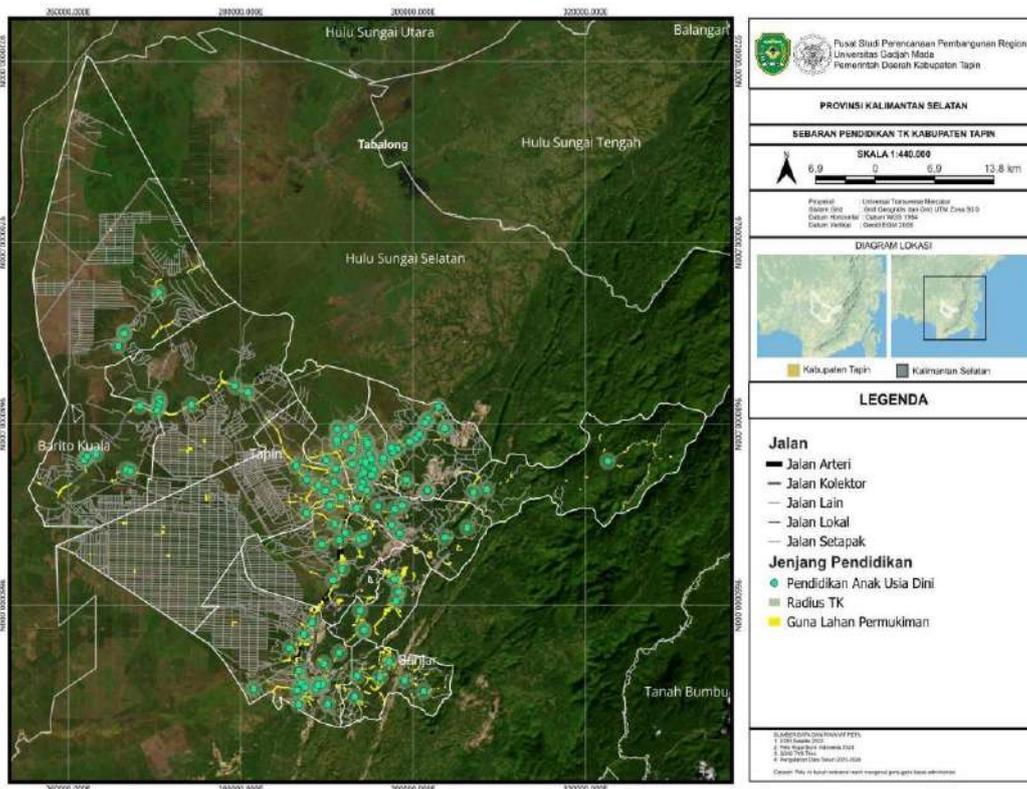
No	Kecamatan	Satuan Pendidikan				Status		Jumlah
		PKMB	SKB	KB	TPA	Negeri	Swasta	
1	Binuang	1	-	5	1	-	7	7
2	Hatungun	1	-	2	-	-	3	3
3	Tapin Selatan	1	-	8	-	-	9	9
4	Salam Babaris	1	-	6	-	-	7	7
5	Tapin Tengah	2	-	7	-	-	9	9
6	Bungur	-	-	3	-	-	3	3
7	Piani	1	-	2	-	-	3	3
8	Lokpaikat	1	-	6	-	-	7	7
9	Tapin Utara	2	1	11	1	1	13	14
10	Bakarangan	2	-	1	-	-	3	3
11	Candi Laras Selatan	-	-	4	-	-	4	4
12	Candi Laras Utara	1	-	4	-	-	5	5
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>73</b>	<b>74</b>

Sumber: Dokumen Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin



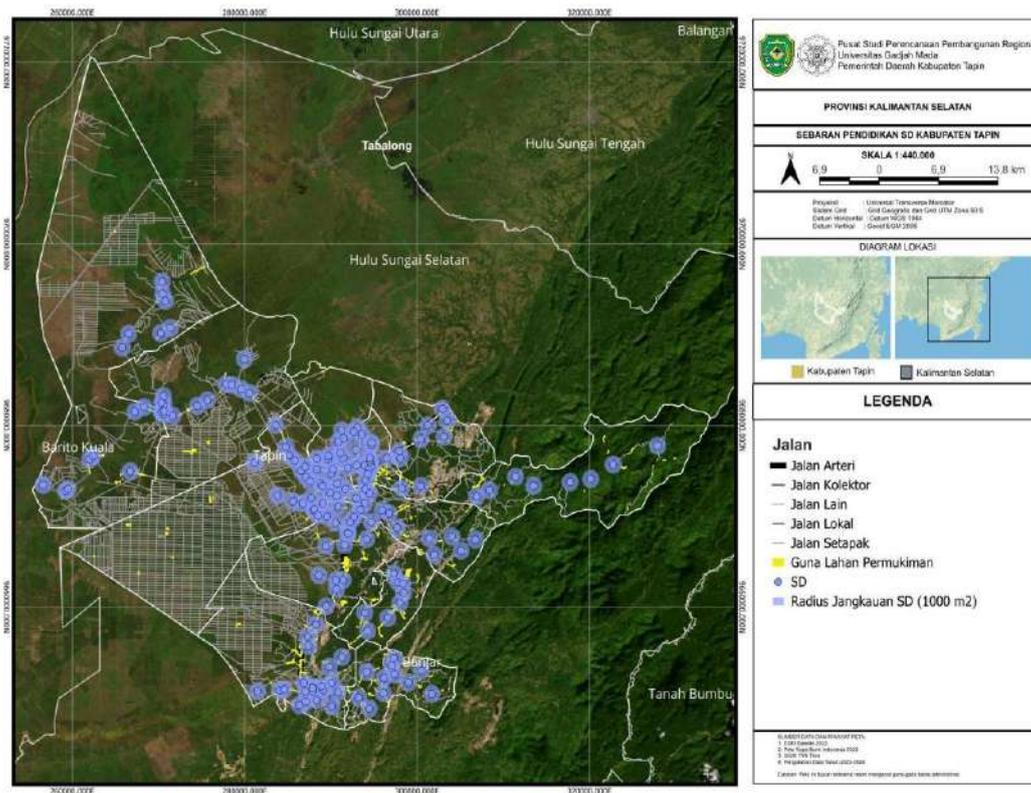
**Gambar 4.25 Peta Persebaran Pendidikan Kabupaten Tapin**

Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)



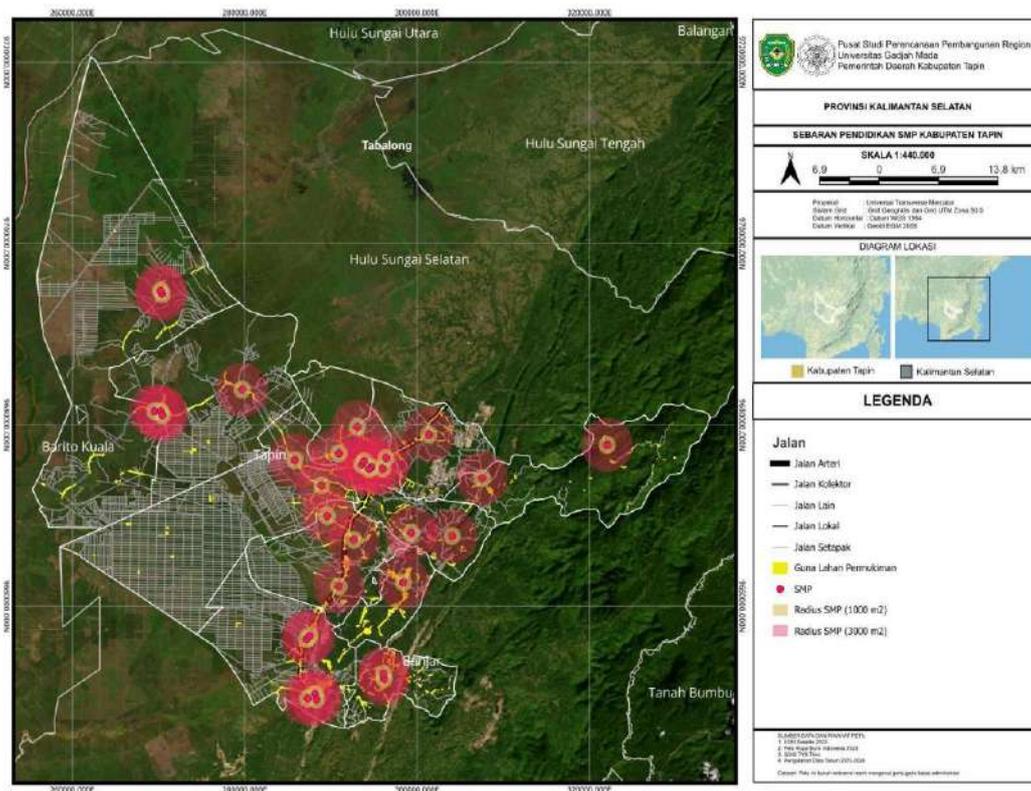
**Gambar 4.26 Peta Persebaran TK/PAUD Kabupaten Tapin**

Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)



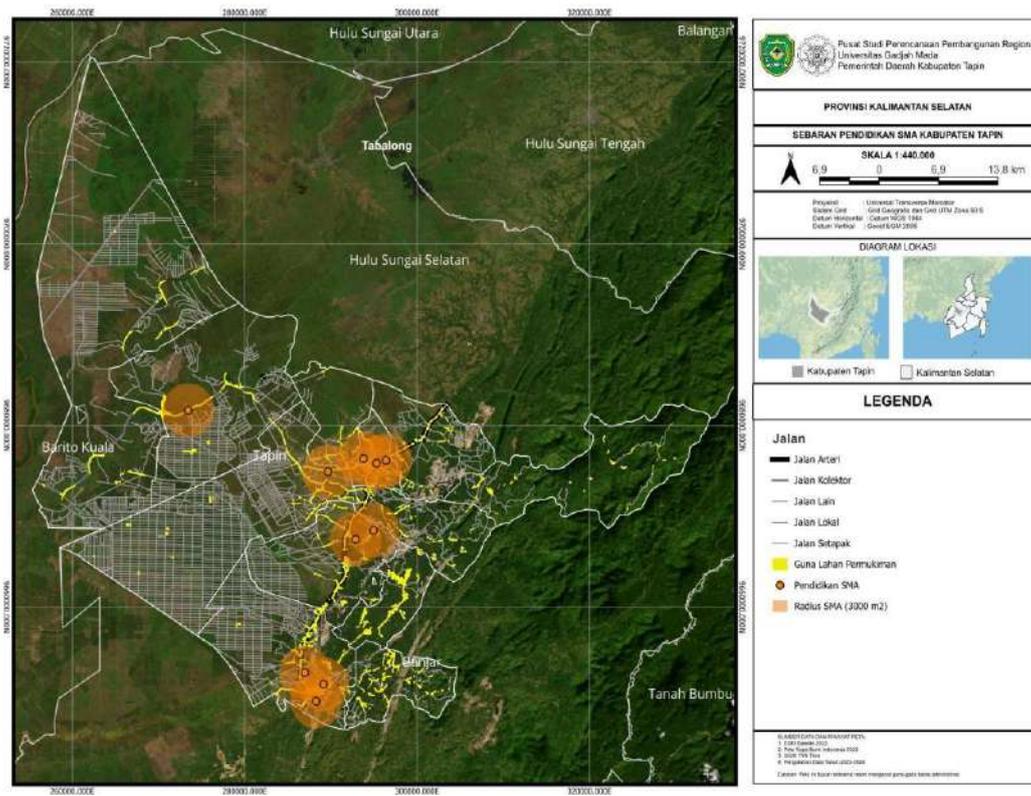
**Gambar 4.27 Peta Persebaran SD Kabupaten Tapin**

Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)



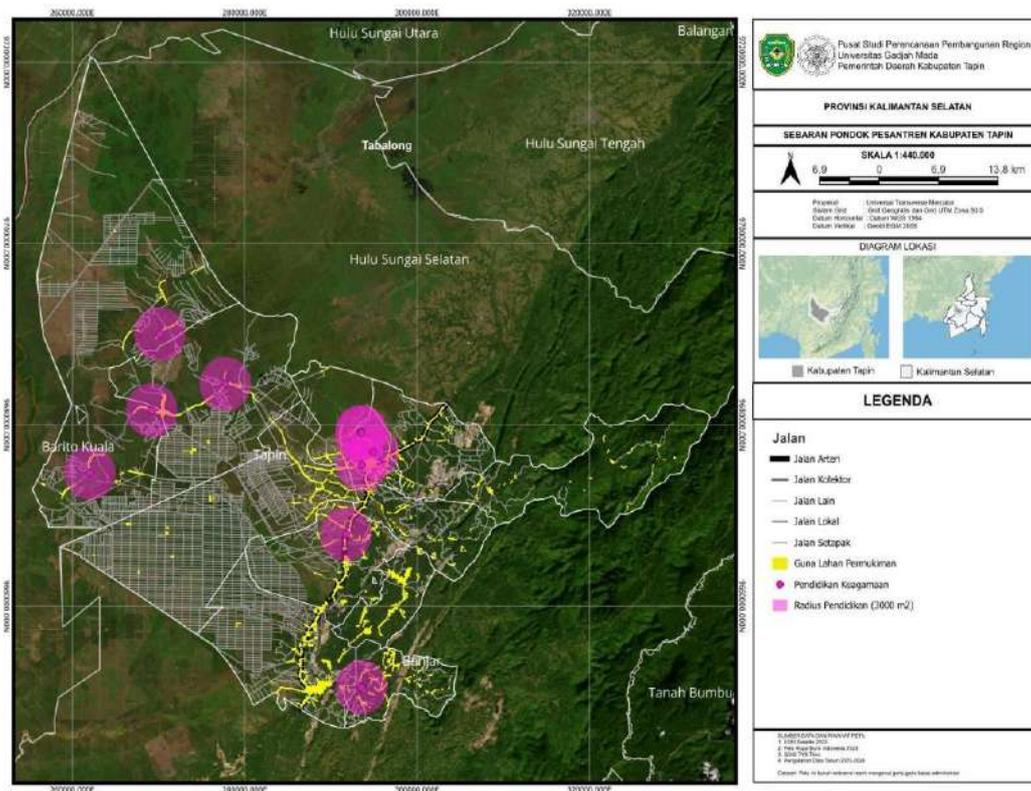
**Gambar 4.28 Peta Persebaran SMP Kabupaten Tapin**

Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)



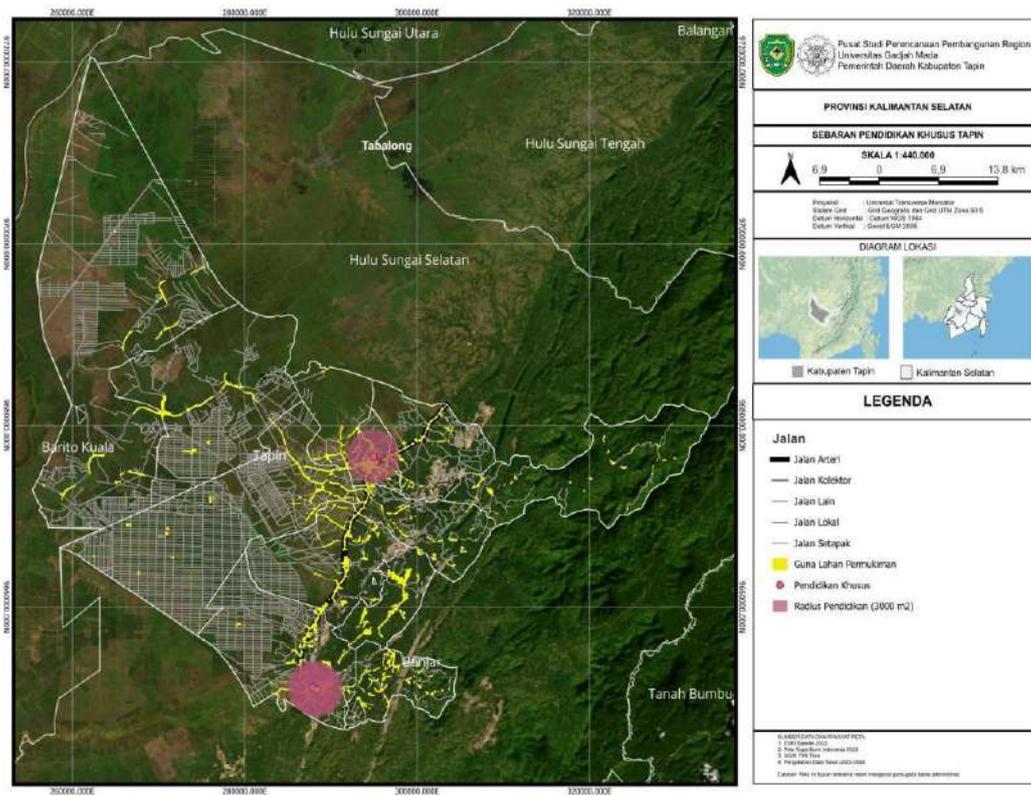
**Gambar 4.29 Peta Persebaran SMA Kabupaten Tapin**

Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)



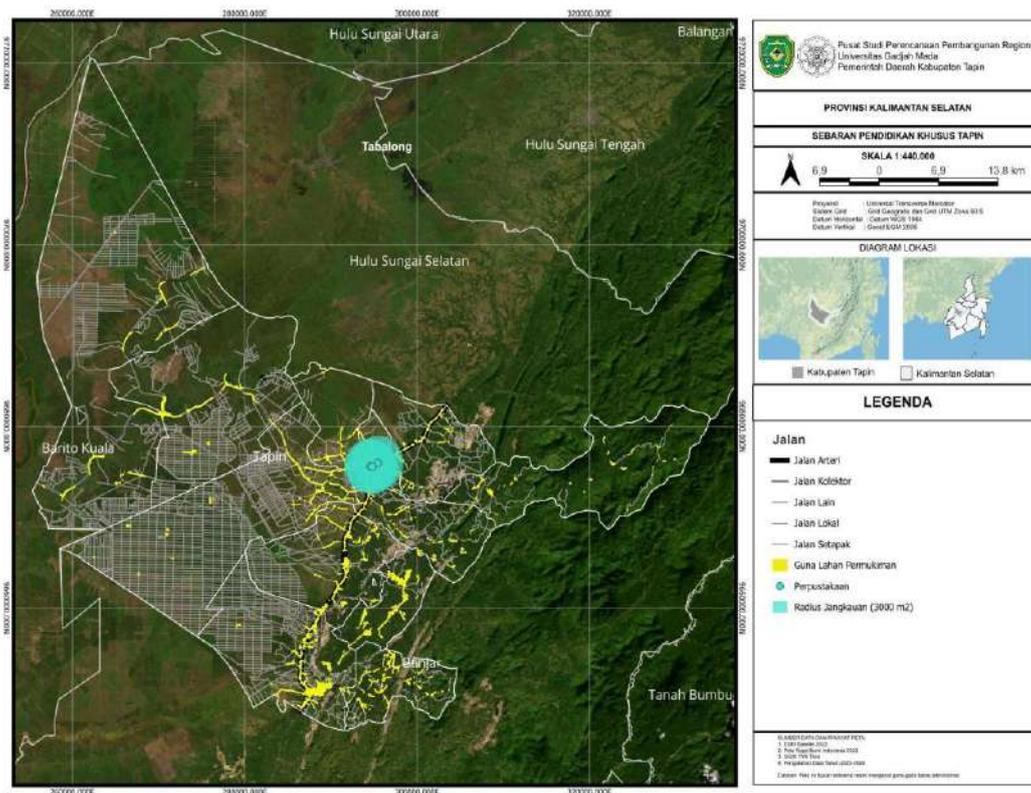
**Gambar 4.30 Peta Persebaran Pondok Pesantren Kabupaten Tapin**

Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)



**Gambar 4.31 Peta Persebaran Pendidikan Khusus Kabupaten Tapin**

Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)



**Gambar 4.32 Peta Persebaran Perpustakaan Kabupaten Tapin**

Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)

#### 4.3.8 Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan pengakuan kualitas lembaga pendidikan yang penelitiannya dilakukan oleh instansi yang berwenang. Akreditasi sekolah dinilai melalui empat komponen yang terdiri dari mutu lulusan, mutu sekolah, manajemen sekolah, dan proses pembelajaran. Akreditasi sekolah berkaitan erat dengan kualitas sekolah dalam menghasilkan nilai tambah bagi para siswa. Berdasarkan data yang didapat dari Dokumen Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2020, sekolah dengan akreditasi A di Kabupaten Tapin masih sangat sedikit. Di jenjang PAUD hingga SMP/ sederajat, hanya 16 sekolah yang memiliki akreditasi A. Sebagian besar (139) sekolah memiliki akreditasi B. Yang perlu menjadi perhatian adalah masih banyaknya PAUD dan TK yang belum terakreditasi, yang jumlahnya lebih dari 50 %.

**Tabel 4.18 Jenjang dan Akreditasi Sekolah Kabupaten Tapin Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Akreditasi			
			A	B	C	Belum Akreditasi
1	PAUD	105	2	7	6	90
2	TK	126	5	74	36	12
3	SD	176	5	107	64	0
4	SMP	27	6	14	6	1
Total		434	16	139	82	90

Sumber: Dokumen Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2020

#### 4.3.9 Rasio Tenaga Pendidik

Rasio tenaga pendidik merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan murid. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 17 No 74 Tahun 2018 tentang guru, rasio guru: murid yang ideal adalah 1:20 untuk jenjang SD hingga SMA. Di Kabupaten Tapin, rasio jumlah guru dan murid masih tergolong ideal, dengan rincian rasio guru: murid pada jenjang TK adalah 1:14 sementara pada jenjang SD dan SLTP adalah 1:12. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa rasio guru: murid tersebut juga disebabkan oleh sedikitnya jumlah murid yang bersekolah, sehingga perlu investigasi lebih mendalam terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Tapin.

**Tabel 4.19 Jenjang dan Akreditasi Sekolah Kabupaten Tapin Tahun 2022**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio
1	TK	354	5051	1 : 14
2	SD	1484	17750	1 : 12
3	SLTP/ SMP	334	3929	1 : 12

Sumber: Dokumen Dapodik Kabupaten Tapin Tahun 2022





## 4.4 Kondisi Ekonomi

### 4.4.1 PDRB Kabupaten Tapin

Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dapat menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pada periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Tapin mengalami pertumbuhan positif, kecuali pada tahun 2019-2020 yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Namun demikian, angka PDRB di tahun 2022 jauh melebihi angka PDRB di tahun 2018, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi telah jauh meningkat. Sumbangan PDRB terbesar di Kabupaten Tapin berasal dari sektor pertambangan, yaitu 26,64 % pada tahun 2022. Padahal, guna lahan Kabupaten Tapin didominasi oleh guna lahan pertanian dan perkebunan (72%). Kontribusi ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan justru 'hanya' menyumbang PDRB sebesar 20,45%. Sementara itu, guna lahan untuk aktivitas pertambangan hanya sekitar 2,85%. Hal ini berarti komoditas pertambangan memiliki kontribusi ekonomi lebih tinggi, mengalahkan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tapin.

Di sisi lain, sektor yang paling sedikit menyumbang PDRB adalah pengadaan listrik dan gas (0,11%) dan jasa perusahaan (0,12%). Hal ini menunjukkan bahwa kontributor PDRB di Kabupaten Tapin masih didominasi oleh sektor ekonomi ekstraktif, sedangkan sektor industri dan jasa masih belum optimal. Struktur ekonomi ini bisa jadi berkaitan dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Tapin karena kegiatan industri dan jasa menuntut kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul daripada aktivitas ekonomi ekstraktif. Dengan demikian, angka RLS dan HLS Kabupaten Tapin yang cenderung rendah perlu ditingkatkan untuk memperoleh kualitas SDM yang handal yang kemudian dapat meningkatkan struktur ekonomi kabupaten.

Tabel 4.20 Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB ADHB Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022									
	2018 (Juta)	Laju %	2019 (Juta)	Laju %	2020 (Juta)	Laju %	2021 (Juta)	Laju %	2022 (Juta)	Laju %
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1642 877	1,07 %	1777 384	8,19%	1716 187	-3,44%	1712 990	- 0,19 %	177342 3	3,53%
B Pertambangan dan Pengalihan	2289 034	10,78 %	2293 864	0,21%	2236 351	-2,51%	2912 948	30,25 %	579933 1	99,09%
C Industri Pengolahan	5459 85,8	4,55 %	5748 64,4	5,29%	5584 69,8	-2,85%	6172 06,3	10,52 %	654554 ,7	6,05%
D Pengadaan Listrik dan Gas	7868, 29	15,00 %	8439, 43	7,26%	9060, 34	7,36%	9695, 43	7,01 %	10500, 62	8,30%
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2581 2,56	10,25 %	2725 9,41	5,61%	2727 6,46	0,06%	2841 1,24	4,16 %	32844, 73	15,60%
F Konstruksi	4564 63,8	8,60 %	4915 03,4	7,68%	4911 67	-0,07%	5293 67,8	7,78 %	583170 ,9	10,16%
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8136 98,5	11,03 %	8924 00,8	9,67%	9069 24,8	1,63%	9615 07,9	6,02 %	111106 2	15,55%
H Transportasi dan Pergudangan	2600 82,3	9,59 %	2789 40,1	7,25%	2782 97,3	-0,23%	2947 48	5,91 %	341413 ,6	15,83%
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1889 21,6	10,25 %	2012 21,3	6,51%	2049 47,3	1,85%	2229 51,9	8,78 %	242554 ,9	8,79%
J Informasi dan Komunikasi	2900 78,1	10,02 %	3121 77,4	7,62%	3338 32,1	6,94%	3604 73,8	7,98 %	391040	8,48%
K Jasa Keuangan dan Asuransi	9439 1,69	10,88 %	1037 28,7	9,89%	1095 09,2	5,57%	1146 13,5	4,66 %	119336 ,4	4,12%
L Real Estate	1127 19,8	8,06 %	1202 30,4	6,66%	1266 40,6	5,33%	1344 74,7	6,19 %	143695	6,86%
M,N Jasa Perusahaan	9304, 2	7,86 %	1014 2,56	9,01%	1015 2,67	0,10%	1099 3,92	8,29 %	12071, 9	9,81%

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	617207,8	7,84%	660837,2	7,07%	678398,7	2,66%	710794	4,78%	740874,6	4,23%
P Jasa Pendidikan	419090,6	9,26%	445696,6	6,35%	456450,6	2,41%	490033,8	7,36%	518459,6	5,80%
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148077,1	8,47%	158679,7	7,16%	167427,9	5,51%	190394,7	13,72%	202159,3	6,18%
R, S,T,U Jasa lainnya	77546,76	10,06%	80879,47	4,30%	82798,74	2,37%	85804,25	3,63%	93763,39	9,28%
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	7999159	7,65%	8438249	5,49%	8393892	-0,53%	9387410	11,84%	12770255	36,04%

Tabel 4.21 Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB ADHK Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022									
	2018 (Juta)	Laju %	2019 (Juta)	Laju %	2020 (Juta)	Laju %	2021 (Juta)	Laju %	2022 (Juta)	Laju %
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1202481,7	-0,43%	1266916,9	5,36%	1211918,1	-4,34%	1192945,3	-1,57%	1188681,4	-0,36%
B Pertambangan dan Penggalan	2166542,5	6,82%	2231499,9	3,00%	2185994,4	-2,04%	2313115,2	5,82%	2494486	7,84%
C Industri Pengolahan	380578,67	3,92%	396906,88	4,29%	379894,49	-4,29%	396492,34	4,37%	407156,26	2,69%
D Pengadaan Listrik dan Gas	4965,21	7,41%	5170,78	4,14%	5397,06	4,38%	5627,36	4,27%	6043,71	7,40%
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18551,27	6,77%	18949,91	2,15%	18888	-0,33%	19544,8	3,48%	20332,96	4,03%
F Konstruksi	320881,92	5,75%	336046,34	4,73%	333776,71	-0,68%	341787,35	2,40%	357362,12	4,56%
G Perdagangan Besar dan	546357,42	7,84%	581233,92	6,38%	579879,38	-0,23%	587239,28	1,27%	631559,31	7,55%

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor											
H Transportasi dan Pergudangan	1894 43,87	7,31 %	1987 09,36	4,89%	1955 25,73	-1,60%	2046 81,45	4,68 %	2182 35,25	6,62%	
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1342 14,72	6,85 %	1381 42,42	2,93%	1369 38,2	-0,87%	1446 40,7	5,62 %	1540 25,02	6,49%	
J Informasi dan Komunikasi	2289 54,75	6,99 %	2393 11,29	4,52%	2570 76,7	7,42%	2759 03,46	7,32 %	2905 62	5,31%	
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6330 6,71	6,29 %	6713 9,78	6,05%	7107 0,49	5,85%	7012 1,11	- 1,34 %	6899 9,97	-1,60%	
L Real Estate	8491 9,02	5,17 %	8804 5,25	3,68%	9066 0,19	2,97%	9346 4,56	3,09 %	9879 7,96	5,71%	
M, N Jasa Perusahaan	6072, 42	3,84 %	6364, 78	4,81%	6196, 56	-2,64%	6539, 96	5,54 %	6945, 1	6,19%	
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3956 62	3,78 %	4146 85,06	4,81%	4186 45,74	0,96%	4328 48,67	3,39 %	4425 20,97	2,23%	
P Jasa Pendidikan	2939 18,38	6,96 %	3056 22,5	3,98%	3044 74,42	-0,38%	3184 58,83	4,59 %	3331 72,91	4,62%	
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1037 36,38	7,66 %	1075 35,47	3,66%	1098 01,91	2,11%	1198 31,01	9,13 %	1241 99,12	3,65%	
R, S, T, U Jasa lainnya	5186 0,09	7,25 %	5270 9,53	1,64%	5235 1,9	-0,68%	5303 2,47	1,30 %	5580 3,19	5,22%	
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	6192 447	5,01 %	6454 990,2	4,24%	6358 489,9	-1,49%	6576 273,9	3,43 %	6898 883,2	4,91%	

#### 4.4.2 Tipologi Perekonomian di Kabupaten Tapin

Tipologi perekonomian digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan sektor tertinggal, yang kemudian dapat digunakan untuk merumuskan strategi peningkatan ekonomi. Penentuan tipologi didasarkan pada perbandingan pertumbuhan ekonomi setiap sektor dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Pada kasus Kabupaten Tapin, pertumbuhan ekonomi setiap sektor akan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kalimantan Selatan. Perbandingan tersebut akan dikelompokkan dalam 4 kategori atau kuadran, yaitu sektor maju dan tumbuh pesat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial, dan sektor relatif tertekan.

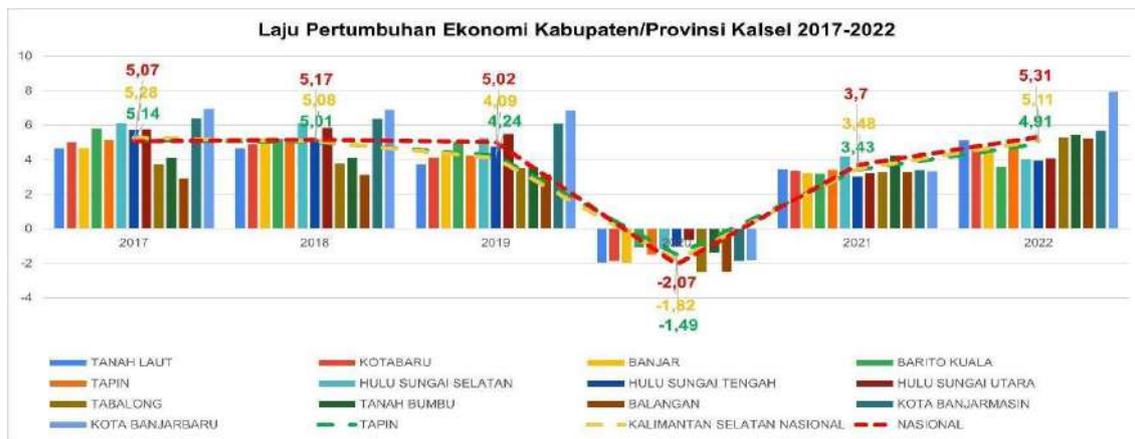
Dari perhitungan yang dilakukan, sektor pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang tergolong maju dan tumbuh pesat. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut lebih unggul dari pada sektor yang sama di kabupaten sekitarnya.

Tabel 4.22 Tipologi Perekonomian di Kabupaten Tapin

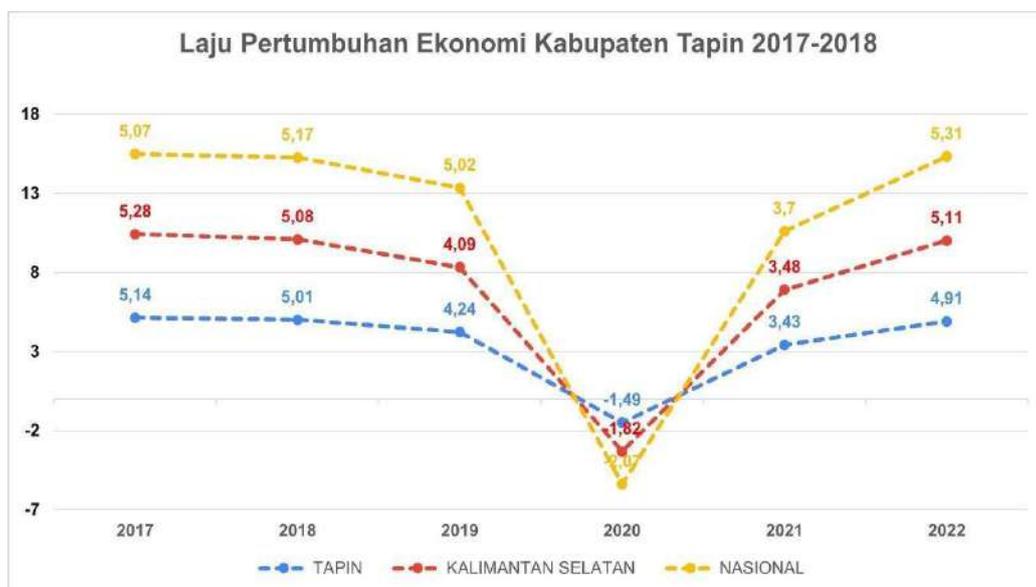
Lapangan Usaha	Kabupaten Tapin		Prov Kalsel		Keterangan
	Laju Pertumbuhan	Pendapatan	Laju Pertumbuhan	Pendapatan	Tipologi Sektor
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1,83%	19,34%	4,35%	13,75%	Sektor Maju tapi Tertekan
B Pertambangan dan Penggalian	27,57%	31,12%	23,71%	22,05%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat
C Industri Pengolahan	4,71%	6,50%	4,59%	13,43%	Sektor Potensial
D Pengadaan Listrik dan Gas	8,99%	0,10%	9,22%	0,14%	Sektor Relative Tertinggal
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,14%	0,31%	7,20%	0,41%	Sektor Relative Tertinggal
F Konstruksi	6,83%	5,54%	6,94%	7,85%	Sektor Relative Tertinggal
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,78%	10,06%	8,15%	9,98%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat
H Transportasi dan Pergudangan	7,67%	3,15%	9,40%	6,50%	Sektor Relative Tertinggal
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,24%	2,29%	7,56%	2,02%	Sektor Maju tapi Tertekan
J Informasi dan Komunikasi	8,21%	3,63%	8,44%	3,62%	Sektor Maju tapi Tertekan
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,02%	1,17%	5,42%	3,49%	Sektor Potensial
L Real Estate	6,62%	1,38%	7,52%	2,25%	Sektor Relative Tertinggal
M,N Jasa Perusahaan	7,01%	0,11%	8,03%	0,69%	Sektor Relative Tertinggal
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,31%	7,45%	4,89%	5,86%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat
P Jasa Pendidikan	6,24%	5,07%	6,46%	4,66%	Sektor Maju tapi Tertekan
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,21%	1,86%	9,60%	2,06%	Sektor Relative Tertinggal
R,S,T,U Jasa lainnya	5,93%	0,92%	7,36%	1,25%	Sektor Relative Tertinggal
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>12,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,94%</b>	<b>100,00%</b>	

#### 4.4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin pada tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami penurunan, terutama pada tahun 2019-2020, laju pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,14% menjadi -1,49%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan terjadi di seluruh Kabupaten di Indonesia. Titik balik pertumbuhan ekonomi mulai terjadi pada tahun 2020 sampai 2022, dimana di Kabupaten Tapin terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari -1,49 (2020) menjadi 4,91 (2022). Sayangnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi ini belum dapat melampaui angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 (5,14). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin jika dibandingkan dengan aspek wilayah yang lebih luas pada tahun 2017 - 2022 masih berada di bawah level provinsi maupun nasional.



Gambar 4.36 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten se Provinsi Kalsel



Gambar 4.37 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten se Provinsi Kalsel

#### 4.4.4 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana koefisien gini 0 menunjukkan bahwa pemerataan terjadi secara sempurna, sebaliknya nilai 1 menunjukkan bahwa ketimpangan terjadi secara sempurna. Indeks gini di Kabupaten Tapin memiliki angka lebih rendah daripada provinsi maupun nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Tapin lebih baik dibandingkan dengan provinsi maupun nasional.

**Tabel 4.23 Indeks Gini Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Selama 5 Tahun**

	2018	2019	2020	2021	2022
Tapin	0,281	0,268	0,274	0,289	0,291
Kalimantan Selatan	0,344	0,334	0,332	0,33	0,317
Nasional	0,389	0,38	0,385	0,384	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan, indeks gini Kabupaten Tapin (0,291) berada pada urutan 7 terendah. Indeks gini terkecil atau daerah dengan pendapatan yang relatif merata di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara (0,0378). Jika dilihat secara nasional, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mempunyai indeks gini di bawah angka nasional (3,81) yang mengindikasikan bahwa seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan cenderung memiliki tingkat pemerataan pendapatan yang cukup baik.



**Gambar 4.38 Grafik Indeks Gini se-Kalimantan Selatan**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

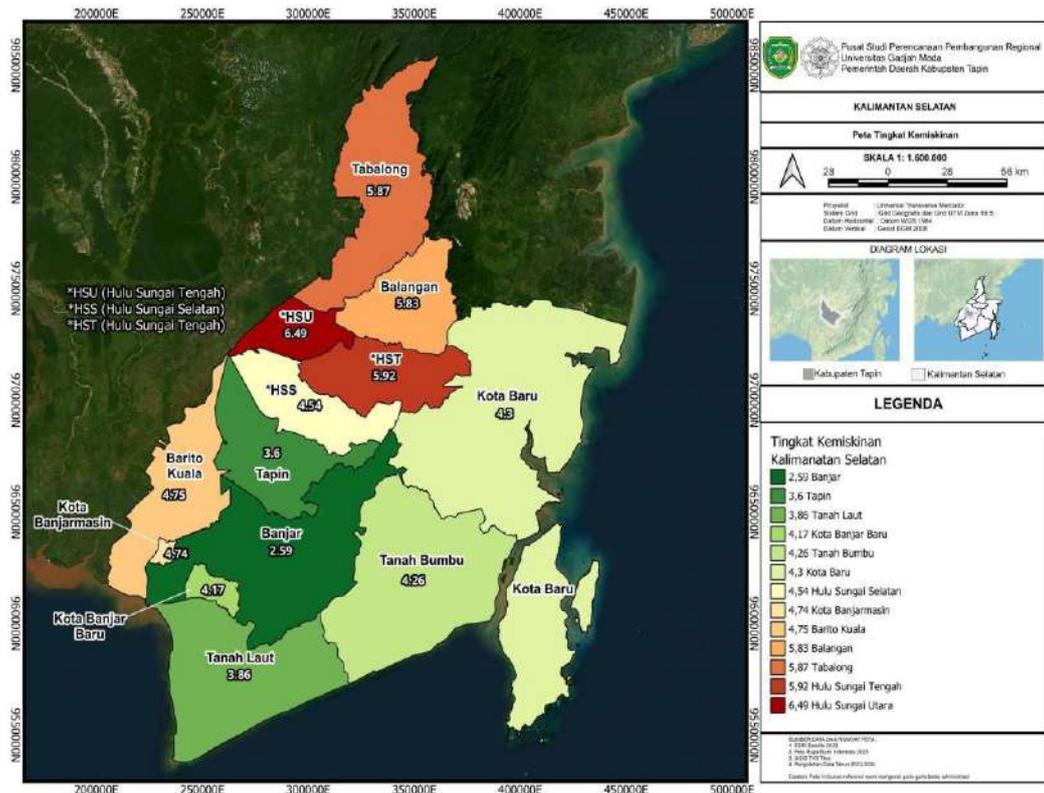
#### 4.4.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten yang berada di Kalimantan Selatan cenderung rendah, berada pada posisi nomor 2 dibawah Kabupaten Banjar. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tapin pada tahun 2023 berada pada angka 0,31% dan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun.



**Gambar 4.39 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023**

*Sumber: BPS Kabupaten Tapin*



**Gambar 4.40 Peta Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan**

Sumber: Geoport Indonesia 2023, BPS (diolah)

## **4.5 Kondisi Sosial**

### **4.5.1 Budaya Masyarakat**

Rendahnya angka RLS dan HLS di Kabupaten Tapin berkaitan dengan angka putus sekolah yang mencapai 83 anak pada jenjang SD dan 102 anak pada jenjang SMP. Berdasarkan data Dapodik Kabupaten Tapin tahun 2022, penyebab putus sekolah ini antara lain adalah pernikahan dini, faktor ekonomi, faktor pergaulan, dan keputusan untuk melanjutkan ke pesantren (yang tidak tercatat sebagai pendidikan formal).

Pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka putus sekolah di Kabupaten Tapin. Junaidi (2019) menyebutkan bahwa pernikahan dini memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap pendidikan dan kesehatan. Jika kasus pernikahan dini di Kalimantan Selatan menurun, maka tingkat pendidikan dan angka harapan hidup di Kalimantan Selatan diperkirakan akan meningkat. Keputusan untuk melakukan pernikahan dini umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi yang berangkat dari budaya yang menganggap bahwa menikah merupakan salah satu solusi untuk lepas dari permasalahan ekonomi. Masyarakat yang menganut nilai budaya ini menganggap bahwa menikah dapat mengurangi beban tanggungan keluarga (khususnya bagi keluarga mempelai wanita) sehingga hak nafkahnya beralih ke suami. Akan tetapi, tidak jarang pernikahan yang dilakukan antara mempelai pria dan wanita memiliki kondisi ekonomi yang tidak jauh berbeda sehingga malah memperburuk kondisi perekonomian keduanya. Selain itu, budaya religius masyarakat Kabupaten Tapin yang memandang pacaran sebagai perilaku yang kurang terpuji menjadi salah satu alasan untuk melakukan pernikahan dini.

Angka pernikahan dini di Kabupaten tapin mengalami kenaikan pada tahun 2020 yakni sebanyak 93 kasus pernikahan dini dari hanya 9 di tahun sebelumnya. Terdapat beragam penyebab pernikahan dini mulai dari faktor ekonomi, pendidikan orangtua, budaya setempat, hingga pergaulan remaja. Namun hal perlu diperhatikan karena akan berdampak pada banyak hal seperti kesehatan ibu dan bayi, kasus stunting, rendahnya tingkat pendidikan, hingga permasalahan ekonomi kedepannya.



**Gambar 4.41 Kondisi Pernikahan Dini di Kabupaten Tapin dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan**

Sumber: Hasil Kajian Faktor Pemicu Pernikahan Dini dan Kebijakan Penanggulangannya di Kabupaten Tapin Tahun 2022

Selain pernikahan dini, keputusan melanjutkan pendidikan ke pesantren juga menjadi salah satu penyebab siswa putus sekolah di Kabupaten Tapin. Terlebih lagi, terdapat beberapa pesantren yang tidak mengikuti kurikulum nasional, sehingga lama sekolah yang ditempuh oleh santri di pondok tersebut tidak diakui pada pencatatan angka RLS dan HLS. Teknis perhitungan RLS dilakukan berdasarkan ijazah yang dimiliki, sementara kebanyakan pondok pesantren tidak menerbitkan ijazah untuk santrinya, sehingga santri yang bersekolah di pondok pesantren tersebut tidak terdata dalam angka lama sekolah di Kabupaten Tapin.

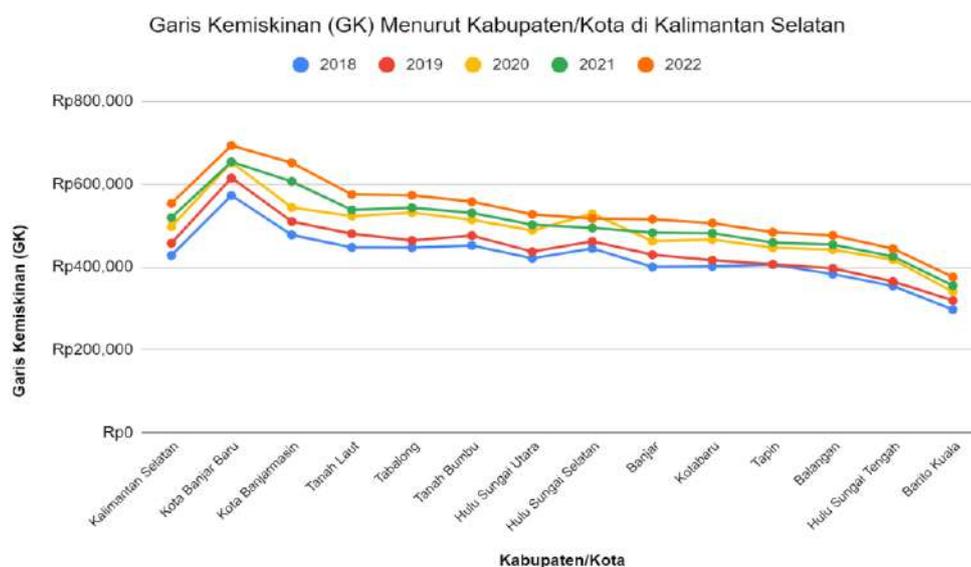
#### 4.5.2 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan nilai atau jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis Kemiskinan ini digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Tapin mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir (2018-2022) dan pada tahun 2022 mencapai Rp 484.113,-. Meskipun demikian, nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yakni Rp 553.073,- dan berada pada posisi empat terbawah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Tabel 4.24 Kondisi Garis Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan

Kab/Kota	Garis Kemiskinan (Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Selatan	Rp427.774	Rp457.222	Rp497.262	Rp519.150	Rp553.073
Kota Banjar Baru	Rp572.195	Rp614.757	Rp652.030	Rp653.556	Rp692.830
Kota Banjarmasin	Rp477.210	Rp509.773	Rp543.546	Rp606.330	Rp651.383
Tanah Laut	Rp447.212	Rp480.010	Rp522.845	Rp537.854	Rp575.061
Tabalong	Rp446.765	Rp463.980	Rp531.180	Rp542.800	Rp573.018
Tanah Bumbu	Rp451.714	Rp475.763	Rp513.803	Rp530.568	Rp557.500
Hulu Sungai Utara	Rp420.783	Rp436.997	Rp488.237	Rp501.994	Rp526.919
Hulu Sungai Selatan	Rp444.455	Rp461.581	Rp528.622	Rp494.203	Rp516.857
Banjar	Rp400.081	Rp429.422	Rp462.375	Rp482.867	Rp514.991
Kotabaru	Rp401.300	Rp416.388	Rp466.121	Rp481.452	Rp505.601
Tapin	Rp405.591	Rp406.367	Rp446.577	Rp459.160	Rp484.113
Balangan	Rp382.835	Rp396.532	Rp441.488	Rp453.928	Rp476.190
Hulu Sungai Tengah	Rp354.214	Rp365.008	Rp417.778	Rp425.438	Rp444.331
Barito Kuala	Rp297.199	Rp318.995	Rp340.526	Rp355.160	Rp375.707

Sumber: BPS



Gambar 4.42 Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Sumber: BPS

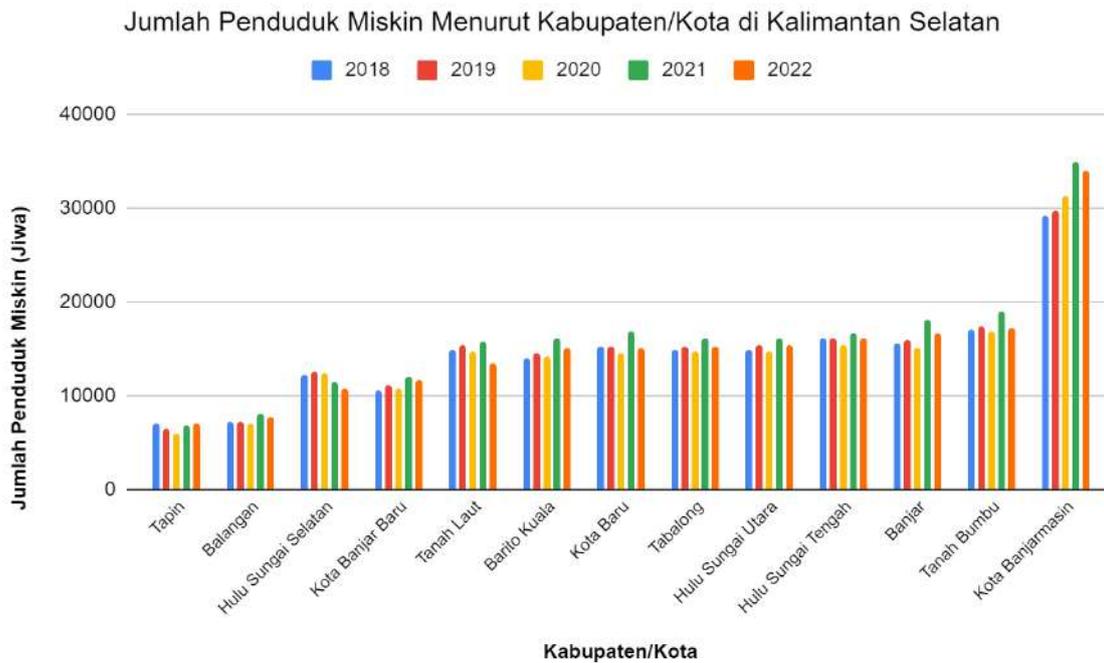
### 4.5.3 Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin adalah penduduk yang besaran pengeluarannya selama sebulan berada dibawah garis kemiskinan di daerah tersebut. Atau penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin pada tahun 2018 hingga tahun 2019, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 1.026 jiwa dan 57 jiwa di tahun 2022. Jumlah ini tergolong paling rendah apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan.

**Tabel 4.25 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan**

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tapin	6.979	6.507	5.899	6.925	6.982
Balangan	7.214	7.266	7.064	8.062	7.825
Hulu Sungai Selatan	12.224	12.636	12.385	11.466	10.804
Kota Banjar Baru	10.643	11.221	10.745	11.951	11.610
Tanah Laut	14.870	15.449	14.787	15.862	13.541
Barito Kuala	14.085	14.488	14.251	16.099	15.055
Kota Baru	15.167	15.287	14.597	16.834	15.065
Tabalong	14.874	15.222	14.695	16.128	15.243
Hulu Sungai Utara	14.919	15.398	14.718	16.186	15.497
Hulu Sungai Tengah	16.140	16.096	15.470	16.770	16.144
Banjar	15.615	15.914	15.124	18.067	16.711
Tanah Bumbu	17.063	17.348	16.832	18.919	17.216
Kota Banjarmasin	29.240	29.648	31.307	34.839	34.009
Kalimantan Selatan	189.033	192.480	187.874	208.118	195.702

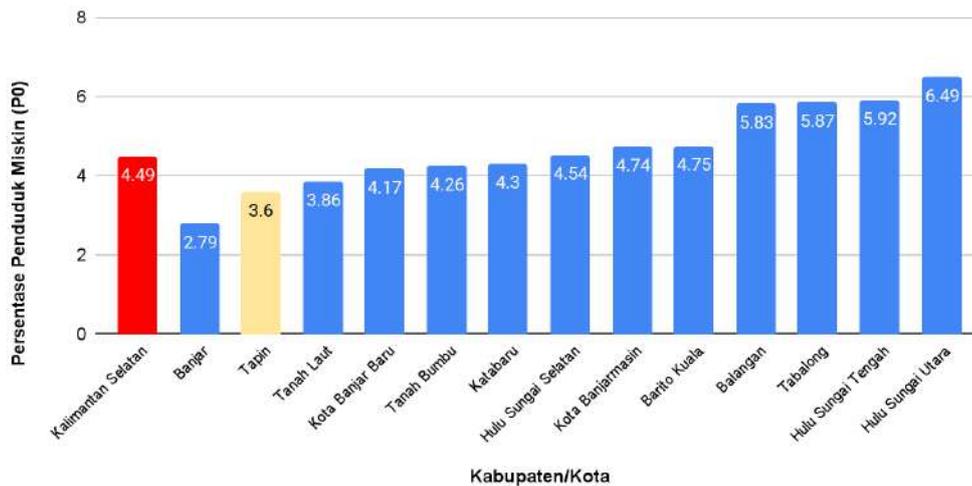
Sumber: BPS



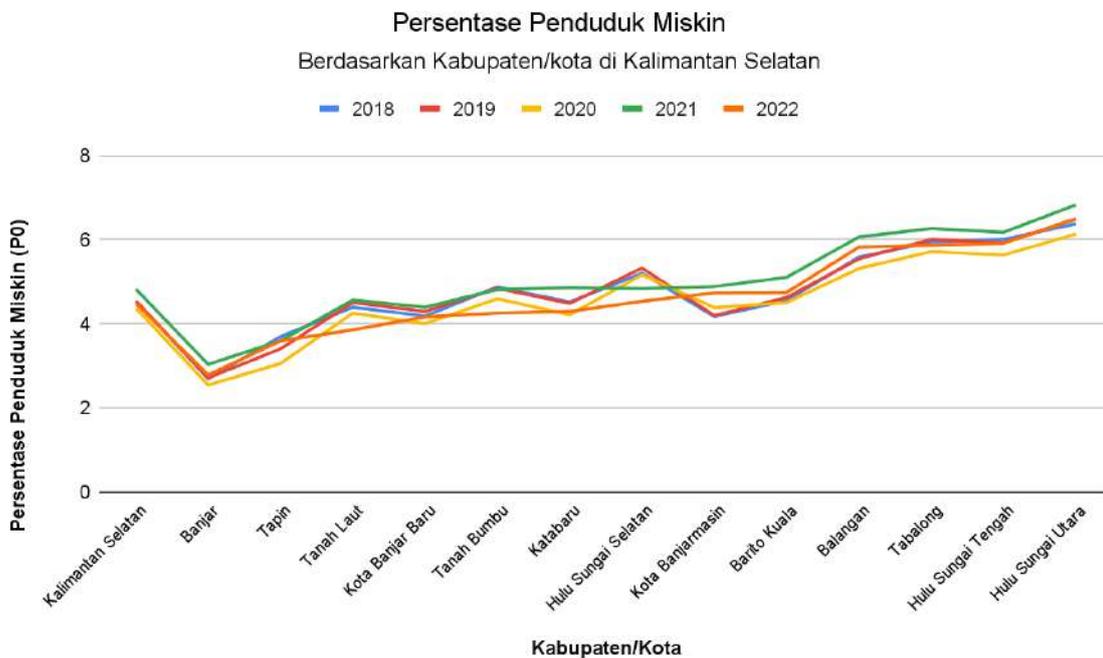
**Gambar 4.43 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**  
 Sumber: BPS

#### 4.5.4 Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase penduduk miskin atau headcount index merupakan proporsi penduduk yang tergolong ke dalam kategori miskin (pengeluaran perkapita perbulan berada dibawah garis kemiskinan) dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di kabupaten/kota setempat. Angka ini lebih objektif untuk melihat perbandingan antar kabupaten/kota dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin. Angka kemiskinan Kabupaten Tapin berada di bawah persentase penduduk miskin provinsi dan menempati posisi kedua terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2020, namun pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Tapin mengalami kenaikan sebesar 0,54 dan mengalami stagnasi di angka 3.6 pada tahun 2022.



**Gambar 4.44 Persentase Miskin Tahun 2022 menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**  
 Sumber: BPS



**Gambar 4.45 Perkembangan Presentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022 menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**  
 Sumber: BPS

Salah satu aplikasi untuk menangani kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tapin adalah aplikasi Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra) yang digunakan untuk memudahkan pengumpulan data dalam menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Baru Tapin, data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tapin tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 4.26 Jumlah Penduduk dengan Kategori Kemiskinan Ekstrem yang Menerima Bantuan Kabupaten Tapin**

Kecamatan	P3K3	ETAPINMESRA	JUMLAH
Binuang	78	39	117
Hatungun	18	4	22
Tapin Selatan	55	33	88
Salam Babaris	11	4	15
Tapin Tengah	105	35	140
Bungur	69	19	88
Piani	51	24	75
Lokpaikat	19	12	31
Tapin Utara	16	16	32
Bakarangan	115	18	133
Candi Laras Selatan	65	27	92
Candi Laras Utara	111	65	176
<b>Total</b>	<b>713</b>	<b>296</b>	<b>1009</b>

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Data **Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)** adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil). Data P3KE adalah data kemiskinan dari pusat yg akan dibantu, namun di data Kabupaten Tapin melalui aplikasi E-Tapin Mesra, ada rumah tangga sangat miskin tapi tidak masuk di data P3KE, kemudian dimasukkan data tambahan sebanyak 296 RTM untuk mendapat bantuan, sehingga jumlah data kemiskinan ekstrem yg di SK-kan menjadi 1.009 RTM.

#### 4.5.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan atau *poverty gap index-p1* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Tapin berada jauh dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dan menempati posisi kedua terendah setelah Kota Banjar Baru. Hal ini berarti selisih pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan tidak terlalu jauh.

Tabel 4.27 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Kab/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Banjar Baru	0,520	0,860	0,480	0,464	0,168
Tapin	0,350	0,460	0,450	0,283	0,328
Banjar	0,390	0,260	0,260	0,359	0,329
Tanah Bumbu	0,630	0,790	0,690	0,650	0,362
Tanah Laut	0,550	0,580	0,580	0,679	0,374
Hulu Sungai Selatan	0,710	0,720	0,510	0,453	0,493
Kotabaru	0,510	0,720	0,600	0,368	0,586
Balangan	1,040	0,870	0,880	0,785	0,667
Tabalong	1,170	1,040	0,720	1,082	0,702
Barito Kuala	0,570	0,440	0,810	0,565	0,711
Kota Banjarmasin	0,810	0,810	0,540	0,555	0,723
Hulu Sungai Tengah	0,670	0,850	0,430	0,533	0,749
Hulu Sungai Utara	1,400	0,660	0,850	0,764	0,863
Kalimantan Selatan	0,690	0,700	0,700	0,670	0,634

Sumber: BPS



Gambar 4.46 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tapin dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: BPS



**Gambar 4.47 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**

Sumber: BPS

#### 4.5.6 Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan atau *poverty severity index-P2* merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks kemiskinan Kabupaten Tapin sebesar 0,071 dan menempati posisi ke-5 apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Angka tersebut lebih rendah dari rata-rata indeks keparahan kemiskinan tingkat provinsi yakni sebesar 0,133. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Tapin tidak terlalu tinggi.

**Tabel 4.28 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)**

Kab/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Selatan	0.16	0.15	0.16	0.13	0.133
Kota Banjar Baru	0.11	0.26	0.1	0.104	0.015
Banjar	0.1	0.03	0.04	0.054	0.043
Tanah Laut	0.14	0.11	0.12	0.142	0.061
Tanah Bumbu	0.14	0.19	0.14	0.121	0.065
Tapin	0.06	0.09	0.12	0.042	0.071
Hulu Sungai Selatan	0.18	0.15	0.09	0.063	0.092
Kotabaru	0.14	0.15	0.12	0.036	0.118

Kab/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Balangan	0.25	0.2	0.24	0.187	0.119
Tabalong	0.34	0.29	0.21	0.235	0.146
Hulu Sungai Tengah	0.12	0.19	0.06	0.086	0.147
Hulu Sungai Utara	0.27	0.12	0.2	0.122	0.153
Barito Kuala	0.15	0.07	0.21	0.121	0.173
Kota Banjarmasin	0.21	0.26	0.11	0.11	0.178

Sumber: BPS



**Gambar 4.48 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**

Sumber: BPS



**Gambar 4.49 Ineks Keparahan Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**  
*Sumber: BPS*

#### 4.5.7 Gap antar Kelompok Pengeluaran

a. Persentase penduduk menurut kelompok umur

Kelompok penduduk di Kabupaten Tapin dengan pengeluaran 20% teratas memiliki persentase penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya. Sementara itu, 40% kelompok pengeluaran terbawah didominasi oleh penduduk usia non produktif yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok penduduk pengeluaran 40% tengah dan 20% teratas. Tingginya beban ketergantungan diduga menjadi salah satu alasan penduduk berada pada kelompok pengeluaran terbawah.

b. Kemampuan membaca huruf latin dan huruf lainnya

Kemampuan membaca merupakan keterampilan yang sangat penting bagi seorang individu karena dapat membuka wawasan dan ilmu pengetahuan. Kemampuan membaca masyarakat Tapin sejauh ini telah mencapai angka 98% hingga 99%, yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Tapin telah mampu memahami bacaan yang menggunakan huruf latin. Sementara itu, kemampuan membaca huruf selain huruf latin mencapai 16% hingga 22%. Dalam hal ini, kelompok penduduk dengan kemampuan pengeluaran 40% terbawah memiliki persentase yang besar (lebih dari kelompok lainnya) dalam memahami bacaan huruf lainnya (non latin).

- c. Persentase penduduk 15 tahun keatas menurut ijazah terakhir yang dimiliki berdasarkan kelompok pengeluarannya

Masyarakat dengan kemampuan pengeluaran 40% terbawah mayoritas memiliki ijazah terakhir di jenjang SD/ sederajat, diikuti oleh jenjang SMP/ sederajat, dan hanya sedikit (15%) yang memiliki ijazah jenjang SMA/ sederajat. Sementara itu, sebagian besar kelompok masyarakat dengan kemampuan pengeluaran 40% tengah juga memiliki ijazah jenjang SD, namun dengan persentase jenjang SMP dan SMA yang lebih tinggi, yaitu 22,17% dan 25,99%. Pada masyarakat dengan kemampuan pengeluaran 20% teratas, mayoritas (55,06%) memiliki ijazah terakhir di jenjang SMA/ sederajat. Persentase ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penduduk dengan kemampuan pengeluaran menengah hingga bawah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, maka pengeluarannya juga cenderung lebih tinggi.

**Tabel 4.29 Persentase Penduduk berdasarkan Kelompok Pengeluaran Dilihat dari Kelompok Umur, Kemampuan Membaca dan Kepemilikan Ijazah**

Kelompok Pengeluaran	Kelompok Umur (dalam persen)			Kemampuan membaca (dalam persen)		Ijazah Terakhir (dalam persen)			
	0-14	15-64	65+	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Tidak punya ijazah SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ ke atas
40 Persen Terbawah	30,89	63,71	5,4	98,38	22,48	13,63	49,01	21,75	15,62
40 Persen Tengah	29,94	69,99	5,06	99,04	22,43	17,48	34,35	22,17	25,99
20 Persen Teratas	22,96	74,22	2,81	98,57	16,43	7,16	13,4	24,38	55,06

## BAB 5 HASIL KAJIAN

Penyusunan strategi peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah meliputi analisis kondisi pendidikan berdasarkan jumlah dan sebaran; analisis kondisi pendidikan berdasarkan tipologi wilayah, serta analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

### 5.1 Analisis Kondisi Pendidikan Kabupaten Tapin

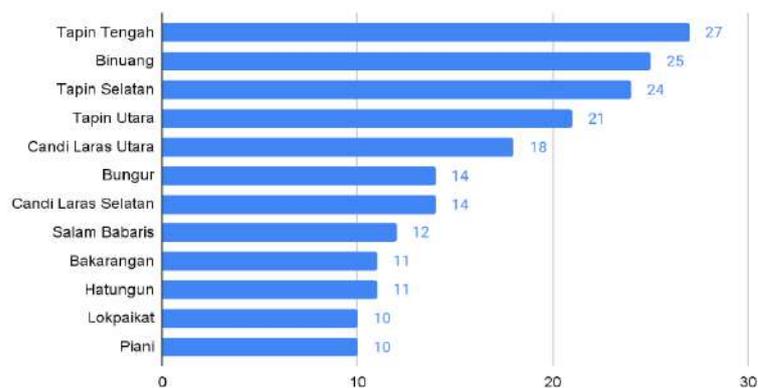
#### 5.1.1 Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan SD/Sederajat

Terdapat 197 SD/ sederajat di Kabupaten Tapin, dengan jumlah sekolah dasar terbanyak berada di Kecamatan Tapin Tengah yakni sebanyak 27 sekolah, diikuti Kecamatan Binuang dan Tapin Selatan sebanyak 25 dan 24 sekolah dasar. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah sekolah dasar paling sedikit berada di Kecamatan Lokpaikat dan Piani yakni sebanyak 10 sekolah dasar. Dari sisi spasial, sekolah pada tingkat SD/ sederajat cenderung terkonsentrasi di area perkotaan dan/ atau dilewati oleh jaringan transportasi utama, seperti Jalan Trans Kalimantan yang melintasi Tapin Utara, Tapin Selatan, dan Binuang.

**Tabel 5.1 Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Tapin Tahun 2021/2022**

No	Kecamatan	Sekolah Dasar			TOTAL
		SD	MI	SDLB	
Jumlah		178	17	2	
		197			
1	Binuang	22	2	1	25
2	Hatungun	11	0	0	11
3	Tapin Selatan	21	3	0	24
4	Salam Babaris	12	0	0	12
5	Tapin Tengah	21	6	0	27
6	Bungur	13	1	0	14
7	Piani	10	0	0	10
8	Lokpaikat	8	2	0	10
9	Tapin Utara	18	2	1	21
10	Bakarangan	11	0	0	11
11	Candi Laras Selatan	14	0	0	14
12	Candi Laras Utara	17	1	0	18

Sumber: Dapodik, Podes, dan Data Madrasah Kemenag Kabupaten Tapin Tahun 2021-2022



**Gambar 5.1 Grafik Jumlah SD/MI/SDLB di Kabupaten Tapin**

Sumber: Dapodik, Podes, dan Data Madrasah Kemenag Kabupaten Tapin Tahun 2021-2022

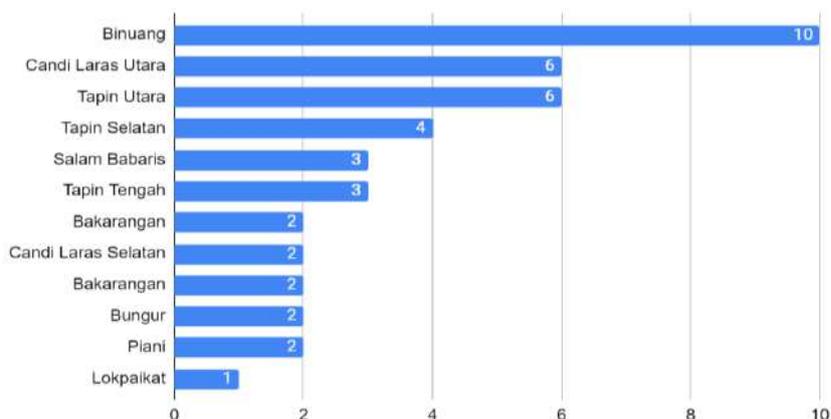
### 5.1.2 Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan SMP/Sederajat

Terdapat 43 SMP/ sederajat di Kabupaten Tapin, dengan jumlah SMP/ sederajat terbanyak berada di Kecamatan Binuang yakni sebanyak 10 sekolah, diikuti Kecamatan Candi Laras Utara dan Tapin Utara sebanyak 6 sekolah. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah SMP/ sederajat paling sedikit berada di Kecamatan Lokpaikat yakni hanya 1 sekolah. Pola spasial sebaran SMP/ sederajat mengikuti pola spasial SD/ sederajat, yaitu cenderung terkonsentrasi di area perkotaan dan/ atau dilewati oleh jaringan transportasi utama, seperti Jalan Trans Kalimantan yang melintasi Tapin Utara, Tapin Selatan, dan Binuang.

**Tabel 5.2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tapin Tahun 2021/2022**

No	Kecamatan	Sekolah Menengah Pertama			TOTAL
		SMP	MTS	SMPLB	
Jumlah		27	14	2	43
1	Binuang	5	3	2	
2	Hatungun	1	1	0	2
3	Tapin Selatan	1	3	0	4
4	Salam Babaris	2	1	0	3
5	Tapin Tengah	3	0	0	3
6	Bungur	2	0	0	2
7	Piani	2	0	0	2
8	Lokpaikat	1	0	0	1
9	Tapin Utara	3	3	0	6
10	Bakarangan	2	0	0	2
11	Candi Laras Selatan	2	0	0	2
12	Candi Laras Utara	3	3	0	6

Sumber: Dapodik Kabupaten Tapin 2022, Podes Kabupaten Tapin 2021, Data Madrasah Kemenag Kabupaten Tapin



**Gambar 5.2 Grafik Jumlah SMP/MTs/SMPLB di Kabupaten Tapin**

Sumber: Data Dapodik Kabupaten Tapin 2022

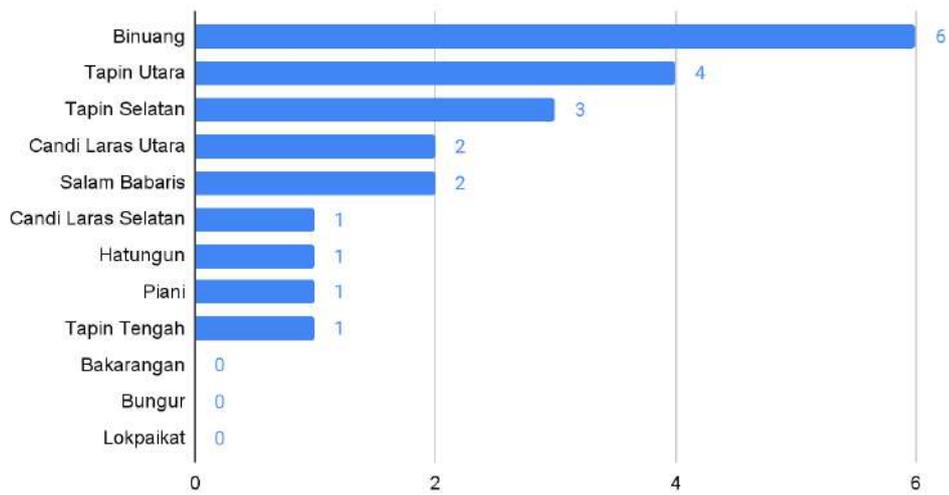
### 5.1.3 Jumlah dan Sebaran Sarana SMA/Sederajat

Terdapat 21 SMA/ sederajat di Kabupaten Tapin, dengan jumlah SMA/ sederajat terbanyak berada di Kecamatan Binuang yakni sebanyak 6 sekolah, diikuti Kecamatan Tapin Utara dan Tapin Selatan sebanyak 4 dan 3 sekolah. Sementara itu, di Kecamatan Bakarangan, Bungur, dan Lokpaikat tidak terdapat SMA/ sederajat. Sebaran sarana SMA/ sederajat cenderung terkonsentrasi di area yang memiliki karakteristik perkotaan, seperti Tapin Utara, Tapin Selatan, dan Binuang.

**Tabel 5.3 Jumlah Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tapin Tahun 2021/2022**

No	Kecamatan	Sekolah Menengah Atas				TOTAL
		SMA	SMK	MA	SMALB	
Jumlah		9	3	7	2	21
1	Binuang	3	1	1	1	
2	Hatungun	0	0	1	0	1
3	Tapin Selatan	1	1	1	0	3
4	Salam Babaris	1	0	1	0	2
5	Tapin Tengah	1	0	0	0	1
6	Bungur	0	0	0	0	0
7	Piani	1	0	0	0	1
8	Lokpaikat	0	0	0	0	0
9	Tapin Utara	1	1	1	1	4
10	Bakarangan	0	0	0	0	0
11	Candi Laras Selatan	1	0	0	0	1
12	Candi Laras Utara	0	0	2	0	2

Sumber: Dapodik Kabupaten Tapin 2022, Data Madrasah Kemenag Kabupaten Tapin



**Gambar 5.3 Grafik Jumlah SMA/SMK/MA/SMALB di Kabupaten Tapin**

*Sumber: Data Dapodik Kabupaten Tapin 2022*

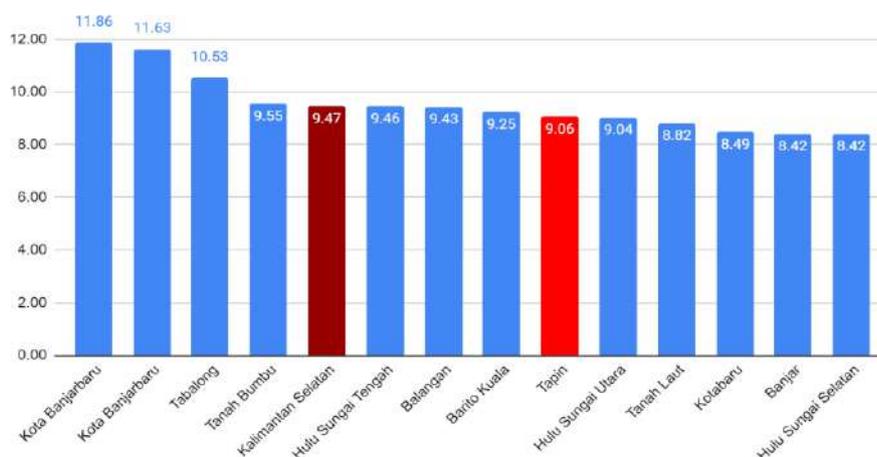




#### 5.1.4 Proyeksi RLS dan HLS

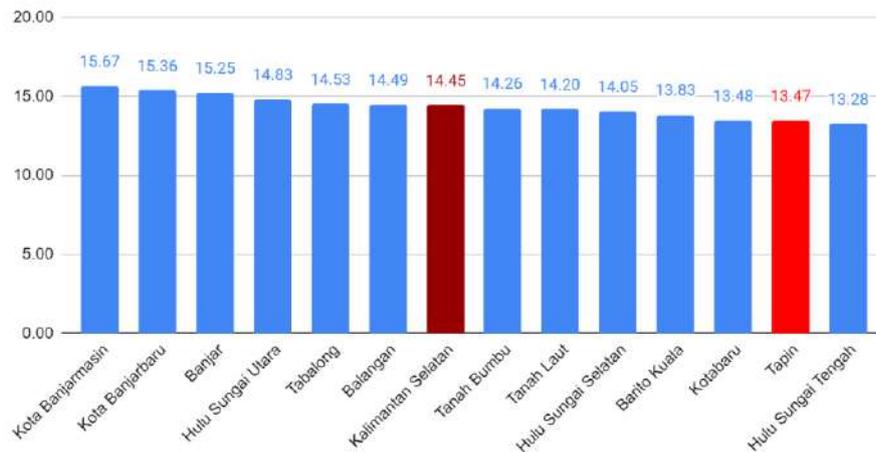
Proyeksi RLS dan HLS dilakukan dengan menggunakan skenario *business-as-usual*. Berdasarkan data RLS dan HLS tahun 2012-2022, rata-rata pertumbuhan RLS dan HLS per tahun dapat dihitung. Dengan mengasumsikan angka pertumbuhan selama 10 tahun mendatang sama dengan rata-rata angka pertumbuhan selama 10 tahun terakhir, maka angka proyeksi dapat diestimasi. Proyeksi RLS dan HLS dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk melihat posisi Kabupaten Tapin pada tahun 2032. Berdasarkan hasil proyeksi (Grafik 5.4 dan 5.5) dapat diketahui bahwa Kabupaten Tapin yang tadinya memiliki RLS sebesar 7,95 di tahun 2022 akan mengalami peningkatan menjadi 9,06 di tahun 2032. Akan tetapi, peringkat RLS Kabupaten Tapin akan mengalami penurunan dari yang sebelumnya peringkat keenam menjadi peringkat kedelapan se-Kalimantan Selatan. Sementara itu, angka HLS Kabupaten Tapin juga diproyeksi akan mengalami peningkatan dari 12,04 di tahun 2022 menjadi 13,47 di tahun 2032. Peringkat HLS Kabupaten Tapin diproyeksikan akan meningkat dari urutan terakhir se-Kalimantan Selatan menjadi peringkat ke-12.

Hasil proyeksi tersebut mengindikasikan pentingnya akselerasi peningkatan RLS dan HLS di Kabupaten Tapin. Hal ini diperkuat dengan hasil proyeksi IPM (menggunakan metode dan skenario yang sama, yaitu *business-as-usual*) yang walaupun mengalami peningkatan, tetapi belum mampu meningkatkan peringkat IPM Kabupaten Tapin dan masih berada di bawah rata-rata IPM Kalimantan Selatan (Gambar 5.6). Oleh karena itu, akselerasi RLS dan HLS diperlukan untuk meningkatkan IPM Kabupaten Tapin secara signifikan dengan mengubah *business-as-usual* (antara lain dengan menambah kebijakan dan strategi yang secara khusus dapat meningkatkan RLS dan HLS).



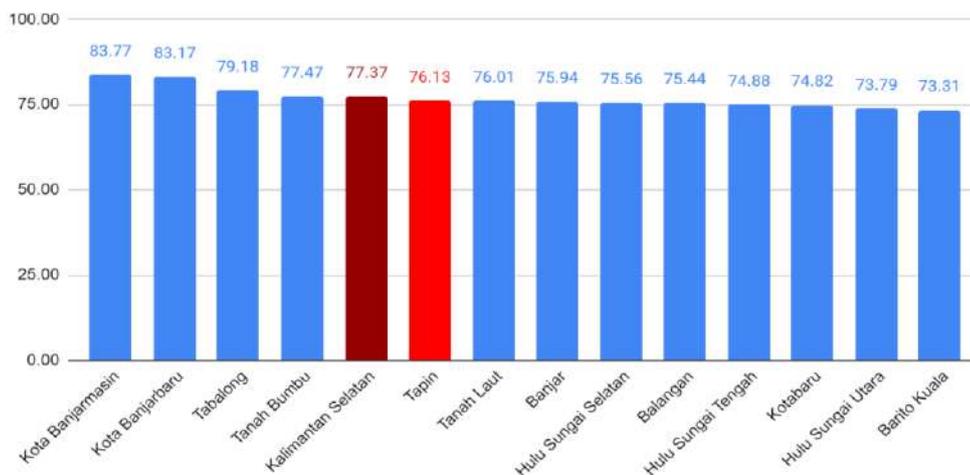
Gambar 5.7 Grafik Proyeksi RLS Tahun 2032 pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Sumber: Hasil analisis



**Gambar 5.8 Grafik Proyeksi HLS Tahun 2032 pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**

Sumber: Hasil analisis



**Gambar 5.9 Grafik Proyeksi IPM Tahun 2032 pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**

Sumber: Hasil analisis

### 5.1.5 Angka Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan Sekolah

Angka putus sekolah dapat diartikan sebagai jumlah siswa yang tidak mampu menyelesaikan atau menamatkan program belajarnya pada salah satu jenjang pendidikan. Siswa yang mengalami putus sekolah dinyatakan tidak lulus dari sekolah tempat ia belajar dan tidak mendapatkan ijazah, sedangkan tidak melanjutkan sekolah diartikan sebagai anak usia sekolah yang sudah menyelesaikan suatu jenjang tertentu namun memutuskan untuk tidak bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena alasan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, ataupun alasan lainnya. Sebagai contoh, siswa kelas 2 SMP/ sederajat yang memutuskan keluar dan tidak sekolah lagi dihitung sebagai “putus sekolah”, sementara siswa yang lulus SMP namun memutuskan tidak melanjutkan sekolah SMA dihitung sebagai “tidak melanjutkan”.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tahun 2022, angka putus sekolah pada jenjang SD/ sederajat adalah 0,68%, pada jenjang SMP adalah 0,05%, dan pada jenjang SMA 0,21%. Sementara itu, angka tidak melanjutkan sekolah di tingkat SD/ sederajat adalah 2,55%, pada tingkat SMP/ sederajat adalah 1,59%, dan tingkat SMA/ sederajat adalah 0%. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa angka tidak melanjutkan sekolah setelah SMA tidak lagi dicatat oleh Dinas Pendidikan karena keputusan melanjutkan ke Perguruan Tinggi bukan lagi kewenangan Dinas Pendidikan, sehingga bisa mencapai 0%. Secara umum, angka putus sekolah dan tidak melanjutkan di Kabupaten Tapin masih tergolong 'wajar' karena secara nasional, angka putus dan tidak melanjutkan sekolah berkisar pada 2%-5%.

**Tabel 5.4 Persentase Anak Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan di Kabupaten Tapin Tahun 2020**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Total Murid	Putus Sekolah		Tidak Melanjutkan Sekolah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
SD	21099	144	0,68	539	2,55
SMP	7549	4	0,05	120	1,59
SMA	4698	10	0,21	0	0

Namun demikian, angka putus sekolah dan tidak melanjutkan yang menunjukkan *trend* menurun dari tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, hingga SMA/ sederajat tersebut kurang konsisten dengan *trend* angka partisipasi murni (APM) yang justru menurun seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Pada tahun 2022, APM SD/ sederajat mencapai 99,4 yang menurun menjadi 72,9 pada tingkat SMP/ sederajat dan hanya mencapai 54,9 pada jenjang SMA/ sederajat. Dengan membandingkan kedua data tersebut, terdapat sekitar 27,1% siswa SMP/ sederajat dan 45,1% siswa SMA/ sederajat yang tidak bersekolah namun tidak tercatat sebagai putus sekolah ataupun tidak melanjutkan.

Gambaran putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah di Kabupaten Tapin secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 5.5. Di Kabupaten Tapin angka tidak melanjutkan sekolah lebih besar dibanding dengan anak putus sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa anak yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang berhenti bersekolah saat masih menempuh pendidikan. Alasan yang mendasari hal tersebut dapat diidentifikasi menjadi empat faktor yakni ekonomi, sosial, budaya, dan spasial. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam membiayai anggota keluarganya untuk bersekolah. Faktor sosial meliputi disabilitas, anak dengan kemampuan akademik kurang sehingga sulit untuk naik kelas, menikah dini, dan motivasi bersekolah dari dalam diri siswa. Faktor budaya berkaitan dengan budaya

melanjutkan pendidikan ke pesantren di Kabupaten Tapin, sedangkan faktor spasial merujuk pada masalah jarak dan aksesibilitas ke sekolah. Dari keempat faktor tersebut, faktor ekonomi paling mendominasi, diikuti dengan faktor budaya. Berikut ini data anak putus sekolah dan tidak melanjutkan di Kabupaten Tapin:

**Tabel 5.5 Jumlah Anak Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan di Kabupaten Tapin Tahun 2020**

Kecamatan	APS /ATS		Jumlah ATS	Pendidikan Akhir (Lulus)			Jumlah Anak Tidak Melanjutkan	Pendidikan Akhir (Tidak Lulus)			Jumlah Anak Putus Sekolah	Alasan				
	L	P		SD	SLTP	SLTA		SD	SLTP	SLTA		Faktor Ekonomi	Faktor Sosial	Faktor Budaya	Faktor Spasial	Tidak Disebutkan Alasan
Bakarangan	60	38	98	52	8	0	60	36	1	1	38	41	6	13	0	38
Binuang	28	25	53	24	16	0	40	13	0	0	13	29	4	0	0	20
Bungur	51	41	92	75	12	0	87	5	0	0	5	85	3	4	0	0
Candi Laras Selatan	27	22	49	30	7	0	37	0	3	9	12	-	-	-	-	49
Candi Laras Utara	36	47	83	58	17	0	75	8	0	0	8	77	6	0	0	0
Lokpaikat	23	28	51	33	9	0	42	9	0	0	9	24	12	12	3	0
Hatungun	26	10	36	17	16	0	33	3	0	0	3	15	21	0	0	0
Piani	42	35	77	47	10	0	57	20	0	0	20	65	12	0	0	0
Salam Babaris	11	4	15	3	0	0	3	12	0	0	12	12	0	0	0	3
Tapin Selatan	53	48	101	68	13	0	81	20	0	0	20	51	27	23	0	0
Tapin Tengah	80	69	149	125	9	0	134	15	0	0	15	30	6	72	0	41
Tapin Utara	12	3	15	8	3	0	11	4	0	0	4	8	6	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>449</b>	<b>370</b>	<b>819</b>	<b>540</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>145</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>159</b>	<b>437</b>	<b>103</b>	<b>125</b>	<b>3</b>	<b>151</b>

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, 2022

### 5.1.6 Aksesibilitas Sarana Pendidikan

Aksesibilitas sarana pendidikan dianalisis berdasarkan data Survei Potensi Desa (PODES) tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin. Data yang digunakan mencakup jarak rumah ke sekolah, ketersediaan transportasi umum, keterjangkauan dengan berjalan kaki, biaya transportasi, dan kemudahan akses. Pendataan PODES dilakukan pada tingkat desa/kelurahan dengan responden mencakup seluruh kepala desa/kelurahan, camat, dan sekretaris daerah (Sekda). Di Kabupaten Tapin, terdapat 12 kecamatan meliputi 9 kelurahan dan 126 desa yang menjadi responden dari survei tersebut.

Jarak rata-rata menuju fasilitas pendidikan semakin bertambah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada fasilitas SD/ sederajat, tercatat jarak terdekat adalah 0,2 km untuk SD dan 8,98 km untuk MI. Pada jenjang SMP/ sederajat, jarak rata-rata adalah 0,29 km untuk SMP dan 6,11 km untuk MTs. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas pendidikan wajib belajar 9 tahun berada cukup dekat dan seharusnya relatif mudah dijangkau oleh siswa. Untuk jenjang SMA/ sederajat, jarak rata-rata adalah 6,7 km untuk SMA, 8,1 km untuk MA, dan 12,9 km untuk SMK.

Untuk ketersediaan transportasi umum menuju sekolah, jawaban responden terbagi secara cukup merata antara responden yang menyatakan bahwa transportasi umum tersedia dan responden yang menyatakan sebaliknya (Tabel 5.6). Pengecualian adalah pada jenjang SD/ sederajat dimana sebagian besar responden tidak menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun sebagian sekolah, baik pada jenjang sekolah dasar, menengah pertama, ataupun menengah atas sudah terlayani angkutan umum, terdapat cukup banyak sekolah yang masih belum terlayani.

**Tabel 5.6 Ketersediaan Transportasi Umum Menuju Sekolah**

Jenjang Pendidikan	Ya	Tidak	n/a
SD	9,60%	4,40%	85,90%
MI	45,90%	42,20%	11,90%
SMP	45,90%	34,80%	19,30%
MTs	51,10%	40,00%	8,90%
SMA	49,60%	43,00%	7,40%
MA	52,60%	43,00%	4,40%
SMK	50,40%	47,40%	2,20%

Untuk keterjangkauan sekolah dengan berjalan kaki, lebih banyak responden yang menyatakan bahwa sekolah dapat dijangkau daripada responden yang menyatakan sebaliknya. Hal ini terjadi pada seluruh jenjang sekolah, mulai dari sekolah dasar,

menengah pertama, hingga menengah atas. Namun demikian, terdapat cukup banyak responden yang tidak menjawab pertanyaan ini sehingga validitas data perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

**Tabel 5.7**  
**Keterjangkauan Sekolah dengan Berjalan Kaki**

Jenjang Pendidikan	Ya	Tidak	n/a
SD	3,70%	0,70%	95,60%
MI	15,60%	26,70%	57,80%
SMP	26,70%	8,10%	65,20%
MTs	26,70%	13,30%	60,00%
SMA	25,90%	17,00%	57,00%
MA	25,90%	17,00%	57,00%
SMK	17,00%	30,40%	52,60%

Terkait biaya transportasi menuju dan dari sekolah, sebagian besar (>75%) responden menyatakan bahwa biaya transportasi yang mereka keluarkan untuk ke sekolah kurang dari 500.000 per bulan (Tabel 5.8). Hal ini berlaku untuk semua jenjang sekolah, kecuali sekolah dasar dimana sebagian besar responden memilih untuk tidak menjawab. Kondisi ini mengindikasikan bahwa biaya transportasi cukup terjangkau, mengingat biaya hidup di Kabupaten Tapin yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

**Tabel 5.8 Biaya Transportasi < 500.000**

Jenjang	Ya	Tidak	n/a
SD	14,10%	-	85,90%
MI	88,20%	-	11,90%
SMP	80,70%	-	19,30%
MTs	89,60%	1,50%	8,90%
SMA	91,90%	0,70%	7,40%
MA	95,60%	-	4,40%
SMK	97,00%	-	2,20%

Data Podes 2021 juga mengidentifikasi kemudahan akses, dimana responden diminta untuk memberikan penilaian mulai dari sangat mudah, mudah, sulit, hingga sangat sulit. Sebagian besar (>60%) responden menyatakan bahwa sekolah dapat diakses dengan mudah ataupun sangat mudah. Responden yang menyatakan sangat sulit mengakses sekolah kurang dari 2% (Tabel 5.9). Hal ini berlaku untuk semua jenjang sekolah, kecuali sekolah dasar dimana sebagian besar responden memilih untuk tidak menjawab. Kondisi

ini mengindikasikan bahwa hampir semua jenjang sekolah di Kabupaten Tapin mudah diakses.

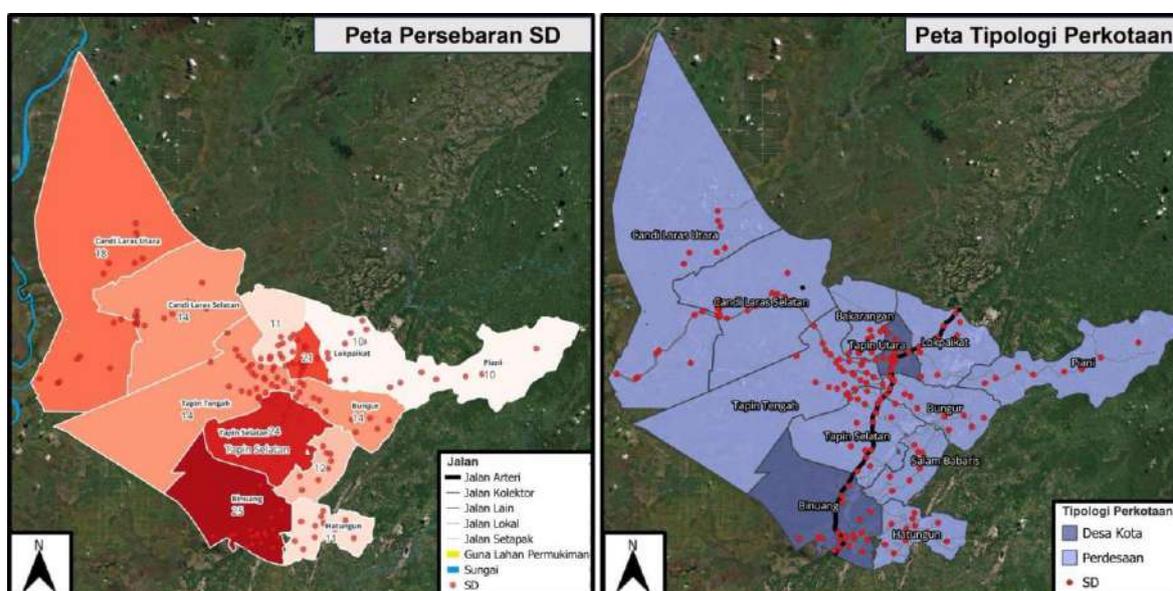
**Tabel 5.9 Kemudahan Akses Sekolah**

Jenjang	Sangat mudah	Mudah	Sulit	Sangat sulit	n/a
SD	11,90%	2,20%	-	-	85,90%
MI	31,90%	41,50%	13,30%	1,50%	11,90%
SMP	48,80%	38,00%	2,50%	0,80%	9,90%
MTs	30,20%	43,00%	8,70%	0,70%	17,50%
SMA	33,30%	47,40%	9,60%	0,70%	8,90%
MA	25,90%	56,30%	12,60%	0,70%	4,40%
SMK	23,00%	59,30%	14,80%	-	2,20%

## 5.2 Analisis Pendidikan Berdasarkan Tipologi Wilayah

### 5.2.1 Analisis Sebaran Pendidikan menurut Tipologi Perkotaan

Data Dapodik tahun 2020 membagi Kabupaten Tapin menjadi 2 tipologi yaitu perkotaan dan perdesaan. Tipologi perkotaan terdiri dari Kecamatan Binuang dan Kecamatan Tapin Utara sedangkan tipologi perdesaan terdiri dari seluruh kecamatan selain dua kecamatan tersebut. Perbedaan yang signifikan antara perkotaan dan perdesaan adalah ketersediaan fasilitas (termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi) yang berada pada wilayah tersebut.

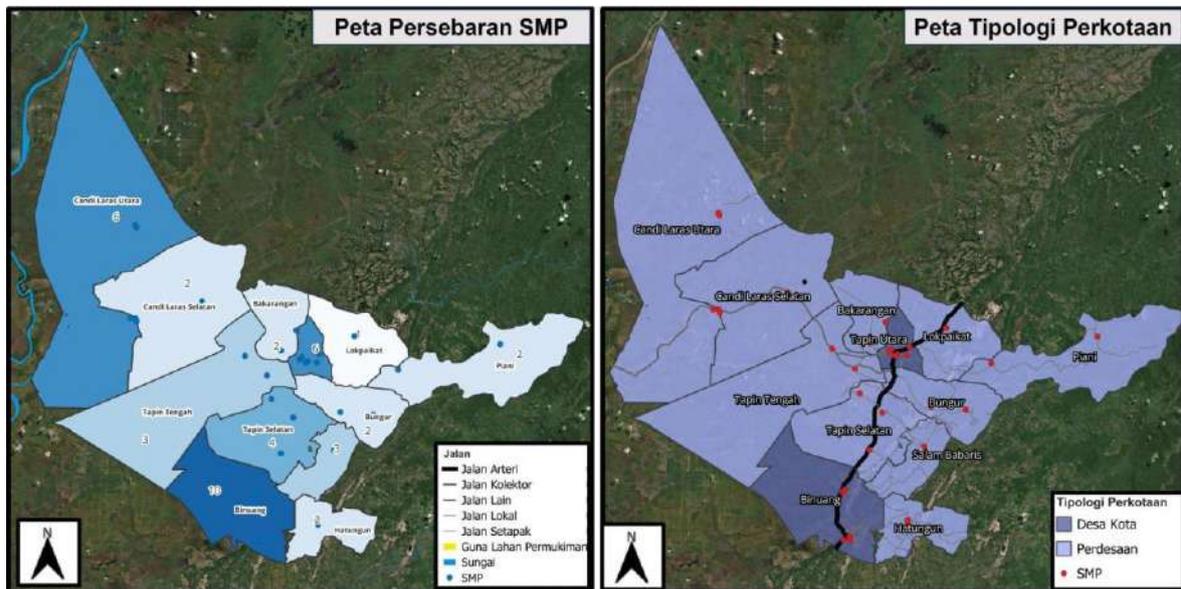


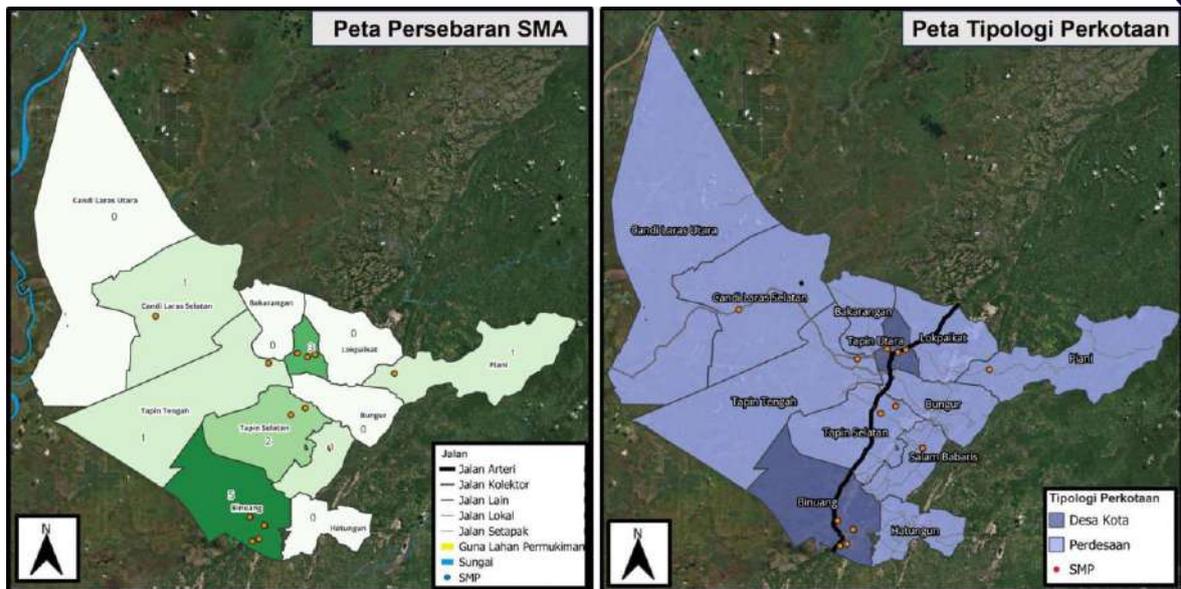
**Gambar 5.10 Peta Persebaran SD dibandingkan Persebarannya Menurut Tipologi Perkotaan**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)

Perbedaan ini tampak pada persebaran fasilitas pendidikan jenjang sekolah dasar. Pada peta diatas dapat dilihat bahwa kecamatan yang masuk dalam tipologi perkotaan memiliki sekolah dasar lebih banyak daripada kecamatan yang merupakan perdesaan. Sebagai contoh, Kecamatan Binuang memiliki 24 sekolah dasar dan Tapin Utara memiliki 21 sekolah dasar, dan kedua kecamatan tersebut masuk dalam tipologi perkotaan. Kecamatan yang terletak di antara kedua perkotaan tersebut, yaitu kecamatan Tapin Selatan, juga memiliki sekolah dasar yang cukup banyak (24). Selain mengikuti tipologi perkotaan, persebaran fasilitas sekolah dasar juga mengikuti jaringan jalan kolektor dari selatan (Kecamatan Binuang) ke utara (Kecamatan Bakarangan). Di sisi lain, Kecamatan Piani dan Lokpaikat memiliki jumlah sekolah dasar yang sedikit, yaitu 10 sekolah, karena topografinya yang cukup ekstrim dengan kemiringan 20% - 45% yang menyebabkan sulitnya mobilitas masyarakat pada daerah tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan persebaran pendidikan pada jenjang SD, sebaran SMP dan SMA juga memiliki pola yang sama, yaitu lebih banyak pada perkotaan. Kecamatan Binuang tercatat memiliki jumlah SMP dan SMA paling paling banyak (10 unit SMP dan 5 Unit SMA) disusul perkotaan yang lain yaitu Kecamatan Tapin Utara yang memiliki 6 SMP dan 3 SMA.





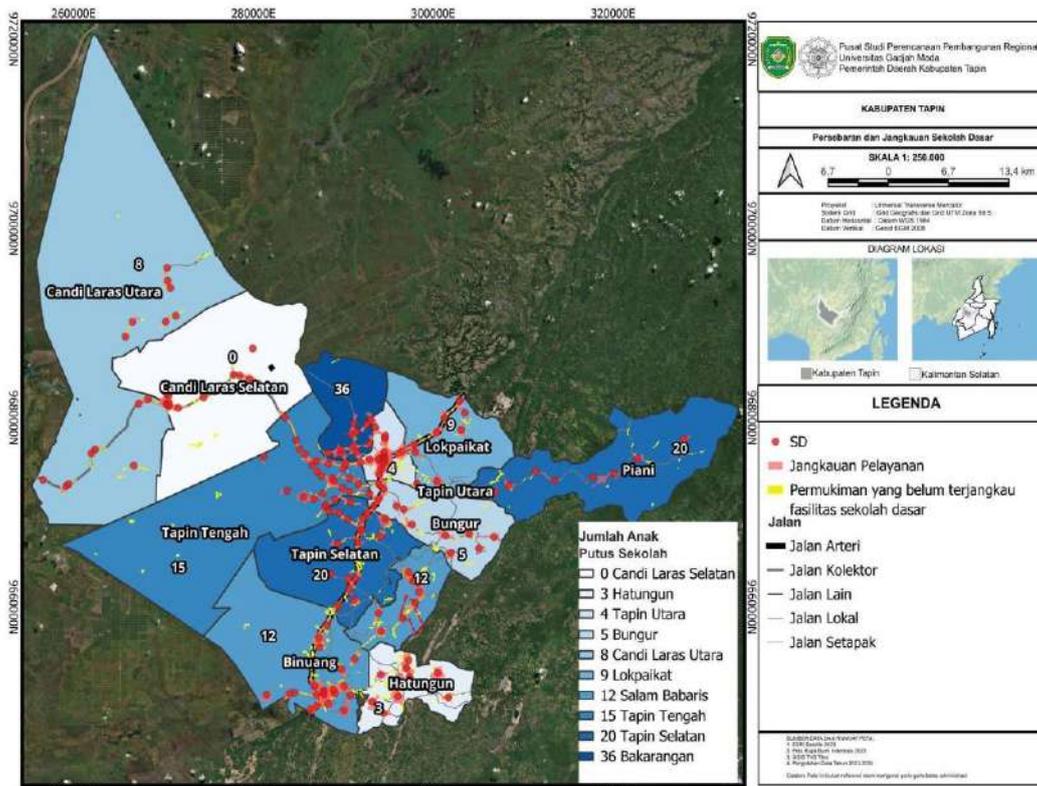
**Gambar 5.11 Peta Persebaran SMP dan SMA dibandingkan Persebarannya Menurut Tipologi Perkotaan**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)

### 5.2.2 Analisis Spasial Angka Putus Sekolah pada Jenjang SD/Sederajat

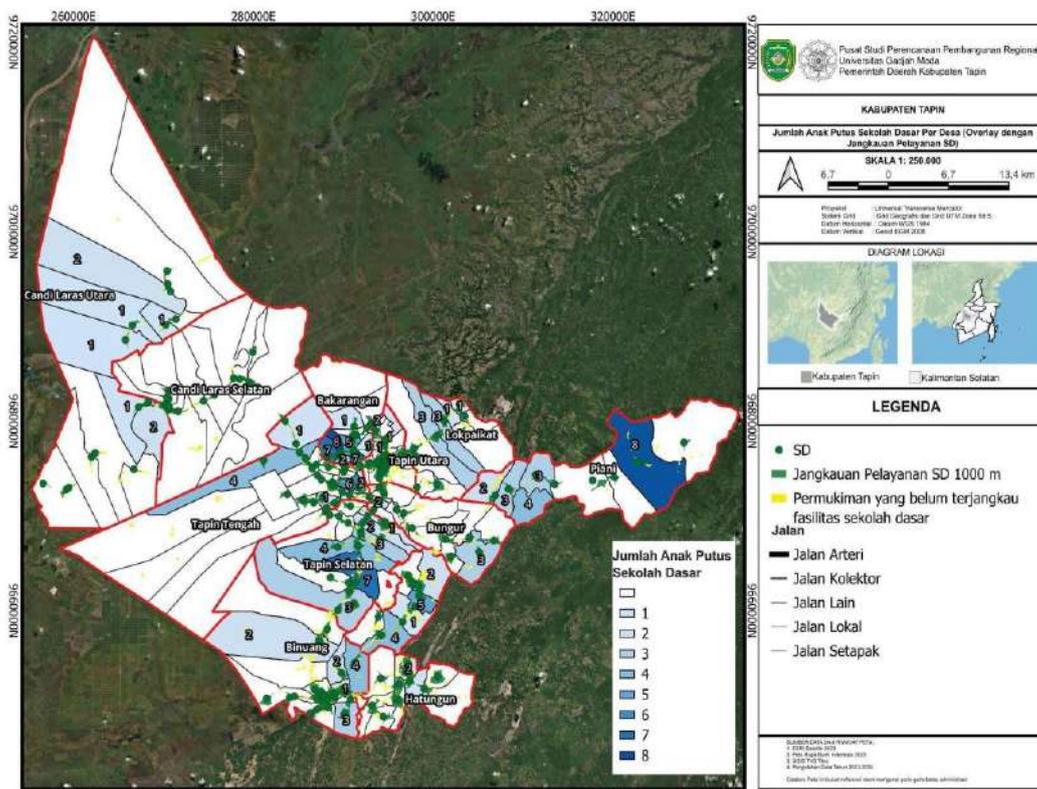
Untuk mengidentifikasi apakah terdapat pola spasial yang dapat menjelaskan angka putus sekolah pada jenjang SD/ sederajat, dilakukan analisis spasial dengan menumpang-susunkan (*overlay*) data lokasi sekolah, jangkauan layanan, sebaran permukiman, dan angka putus sekolah pada level kecamatan dan desa. Sebelumnya, dilakukan analisis *buffer* area layanan sejauh 1 km radius (sesuai dengan SNI 03-1733 tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan) mengikuti sebaran titik-titik lokasi fasilitas pendidikan di Kabupaten Tapin.

*Overlay buffer* dengan sebaran permukiman dapat mengidentifikasi area permukiman mana saja yang belum terlayani dengan pendidikan sekolah dasar. Hasil *overlay* menunjukkan bahwa masih banyak area permukiman yang belum terlayani dengan pendidikan tingkat SD (Gambar 5.9) sehingga berdampak pada sulitnya akses masyarakat dalam menjangkau sekolah dasar. Data ini kemudian di *overlay* dengan jumlah anak putus sekolah dasar. Kecamatan dengan jumlah anak putus sekolah paling banyak adalah Kecamatan Bakarangan (36 anak), disusul Kecamatan Tapin Selatan (20 anak) dan Piani (20 anak). Pada tiga kecamatan tersebut, terdapat cukup banyak area permukiman yang tidak masuk dalam jangkauan layanan sekolah dasar, sehingga kesulitan akses sekolah karena faktor spasial dapat menjadi salah satu alasan putus sekolah. Untuk mengidentifikasi adanya pola spasial secara lebih detail, analisis juga dilakukan pada level desa (Gamba 5.10).



**Gambar 5.12 Peta Overlay Jumlah Anak Putus Sekolah dengan Persebaran dan Jangkauan Sekolah Dasar per Kecamatan**

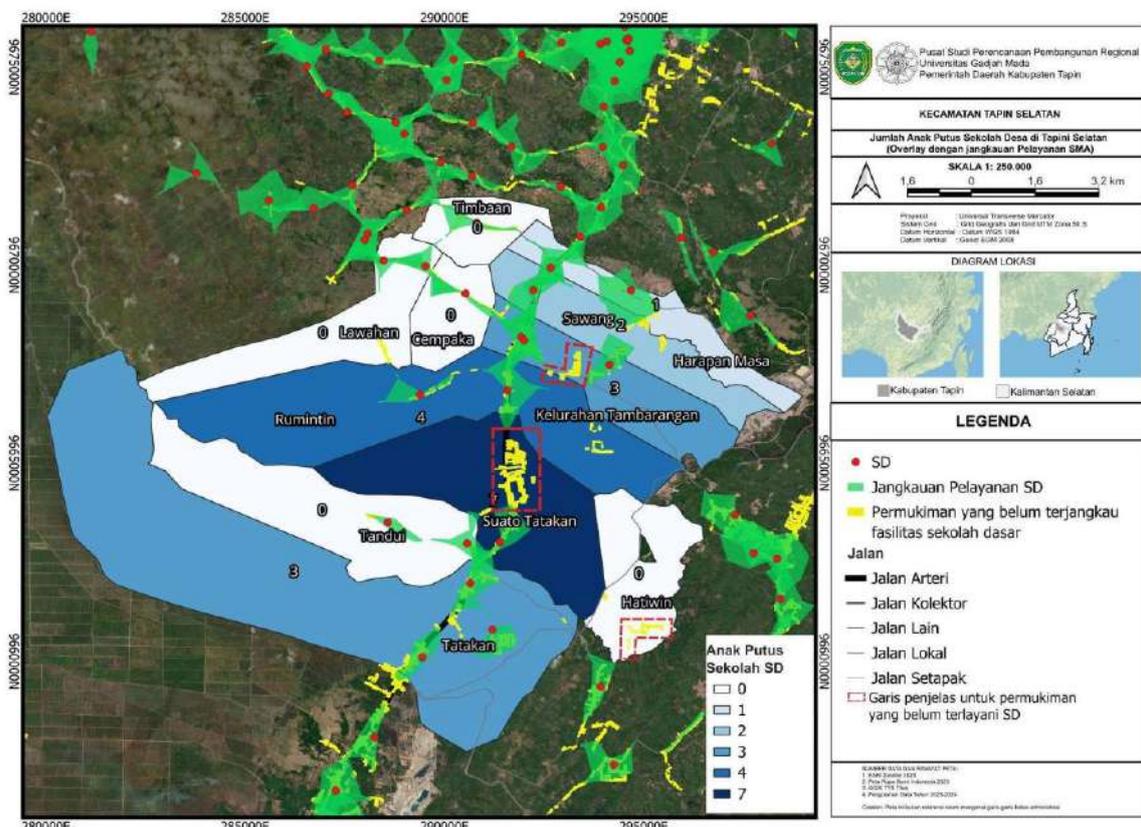
Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)



**Gambar 5.13 Peta Overlay Jumlah Anak Putus Sekolah dengan Persebaran dan Jangkauan Sekolah Dasar per Desa**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)

Untuk mengilustrasikan peran faktor spasial terhadap angka putus sekolah, dilakukan analisis yang lebih mendetail pada Kecamatan Tapin Selatan dan Bakarangan yang memiliki angka putus sekolah tinggi (20 untuk Tapin Selatan dan 36 untuk Bakarangan) serta Tapin Utara yang memiliki angka putus sekolah rendah (4 siswa) sebagai variabel kontrol. Pada tiga kecamatan tersebut dilakukan analisis keterjangkauan sekolah dengan berjalan kaki yang kemudian dioverlay dengan sebaran permukiman dan angka putus sekolah. Di Kecamatan Tapin Selatan terdapat banyak area permukiman yang belum terjangkau atau di luar area layanan sekolah dasar dengan berjalan kaki (lingkaran merah pada Gambar 5.11). Pada level desa, Desa Suato Tatakan di Kecamatan Tapin Selatan memiliki angka putus sekolah paling banyak (7 anak). Pada desa tersebut, masih banyak permukiman yang belum dapat menjangkau pelayanan SD sehingga dapat diduga bahwa kondisi jangkauan pelayanan SD menjadi salah satu penyebab mengapa angka putus sekolah tinggi.

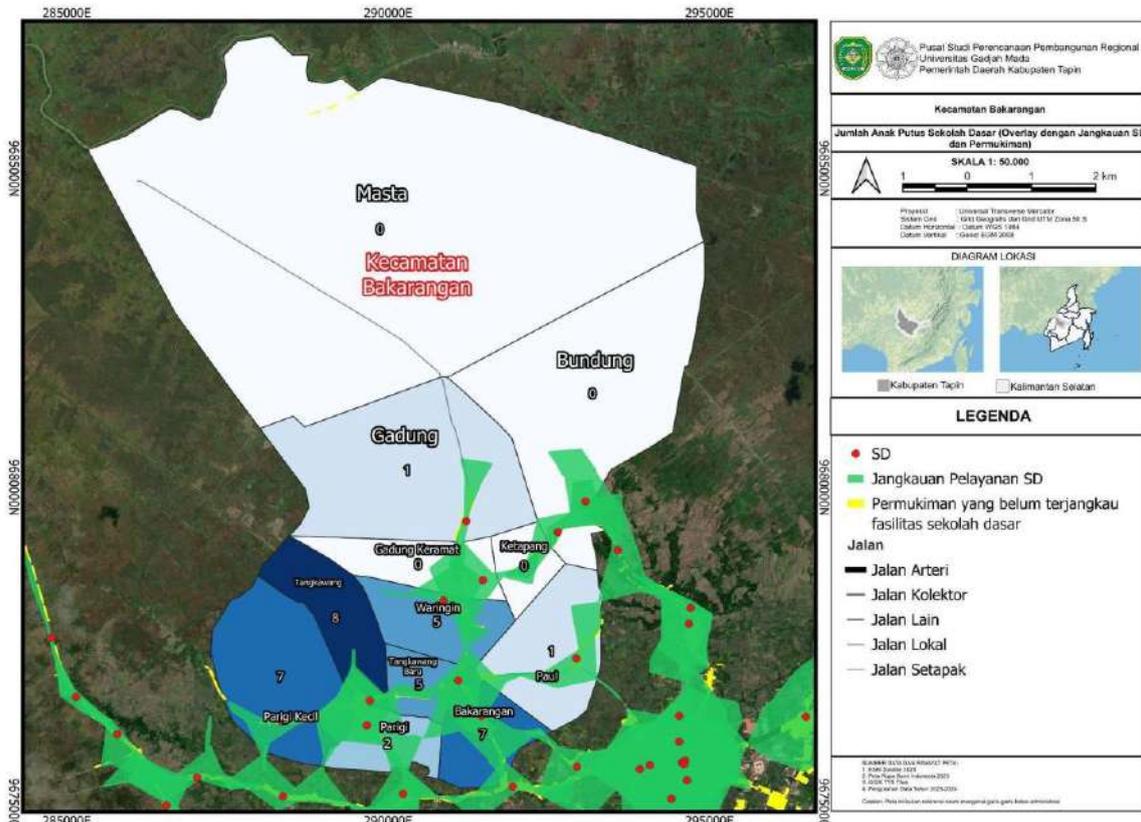


**Gambar 5.14 Peta Jumlah Anak Putus Sekolah pada Kecamatan Tapin Selatan (Overlay Jangkauan Pelayanan dengan Permukiman)**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)

Di Kecamatan Bakarangan, tingginya angka putus sekolah tidak hanya disebabkan oleh faktor spasial. Terdapat desa yang memiliki jangkauan pelayanan sekolah dasar yang baik tetapi memiliki angka putus sekolah yang tinggi, seperti yang terjadi di Desa Bakarangan (Gambar 5.12). Terdapat kemungkinan bahwa di Desa Bakarangan,

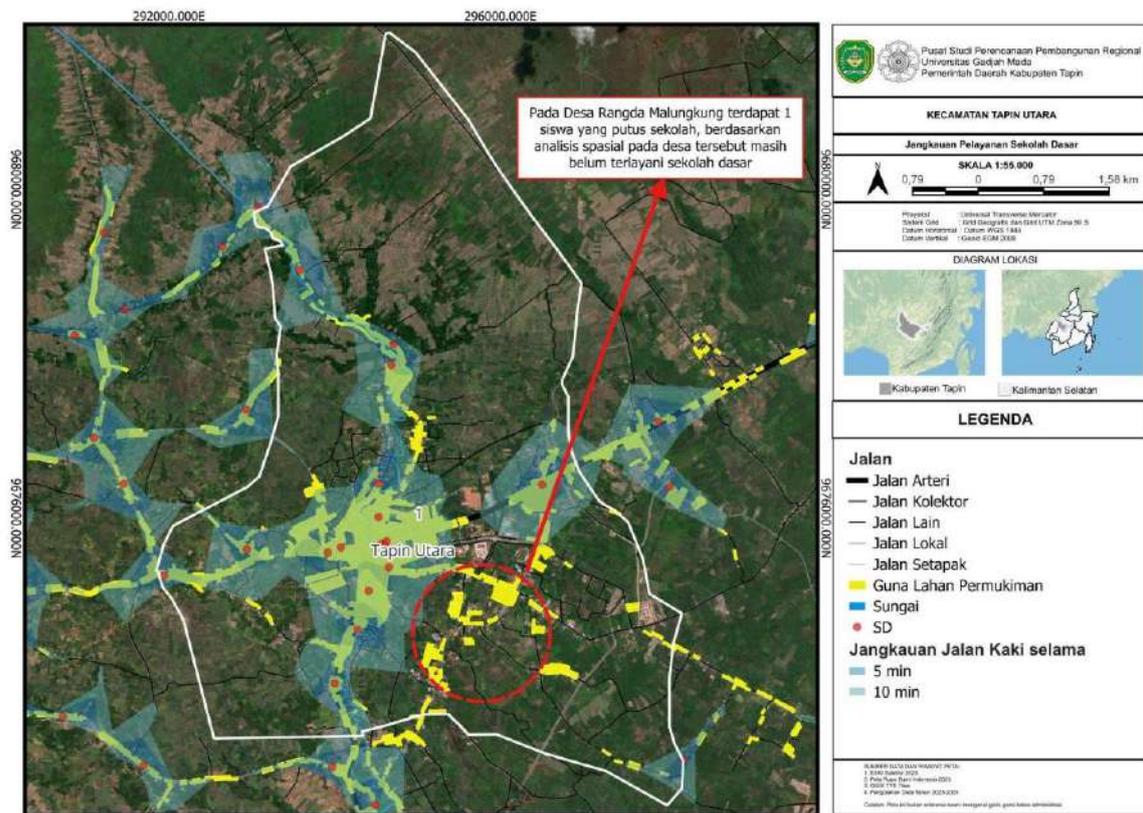
angka putus sekolah disebabkan oleh aspek non spasial seperti ekonomi, sosial, atau budaya. Di sisi lain, terdapat desa yang tidak masuk dalam jangkauan pelayanan sekolah dasar tetapi memiliki angka putus sekolah yang rendah, seperti yang terjadi di Desa Masta.



**Gambar 5.15 Peta Jumlah Anak Putus Sekolah pada Kecamatan Bakarangan (Overlay Jangkauan Pelayanan dengan Permukiman)**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)

Di sisi lain, Kecamatan Tapin Utara memiliki angka putus sekolah paling sedikit pada jenjang sekolah dasar. Tapin Utara merupakan Ibu Kota Kabupaten Tapin sehingga memiliki sarana prasarana yang lebih lengkap, termasuk kondisi jalan yang lebih baik daripada kecamatan lain. Persebaran permukiman di Kecamatan Tapin Utara juga berkumpul di pusat kota, sehingga sebagian sekolah dasar dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Sebagai gambaran, berikut peta kondisi persebaran dan jangkauan sekolah dasar di Kecamatan Tapin Utara (Gambar 5.13).



**Gambar 5.16 Peta Jangkauan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Tapin Utara**

*Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)*

Secara umum, sebagian besar permukiman di Kabupaten Tapin tidak masuk dalam area jangkauan layanan sekolah dasar dengan 5-10 menit berjalan kaki. Hal ini berdampak pada rendahnya akses menuju sekolah dasar. Selain itu, kepemilikan sepeda motor juga berpengaruh terhadap kemampuan menjangkau pelayanan pendidikan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa, sebaran sekolah, jangkauan pelayanan, kualitas dan kuantitas jalan memiliki pengaruh terhadap kemudahan masyarakat dalam mengakses pendidikan di tingkat sekolah dasar.

### 5.2.3 Analisis Spasial Anak SD Tidak Melanjutkan ke SMP/Sederajat

Anak tidak melanjutkan sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka RLS dan HLS karena berkontribusi secara langsung terhadap lama sekolah yang ditempuh oleh seorang individu. Jika seorang individu lulus sekolah dasar lalu tidak melanjutkan ke jenjang menengah pertama, maka individu tersebut hanya tercatat menempuh pendidikan sampai dengan 6 tahun saja. Di Kabupaten Tapin, jumlah anak yang lulus SD/ sederajat tetapi tidak melanjutkan ke SMP/ sederajat lebih banyak daripada anak yang putus sekolah pada jenjang SD. Kecamatan dengan jumlah lulusan SD tidak melanjutkan SMP paling banyak adalah Kecamatan Tapin Tengah, yaitu 125 anak pada tahun 2020, sedangkan yang paling sedikit tercatat di Kecamatan Salam Babaris, yaitu 3 anak (Tabel 5.10).

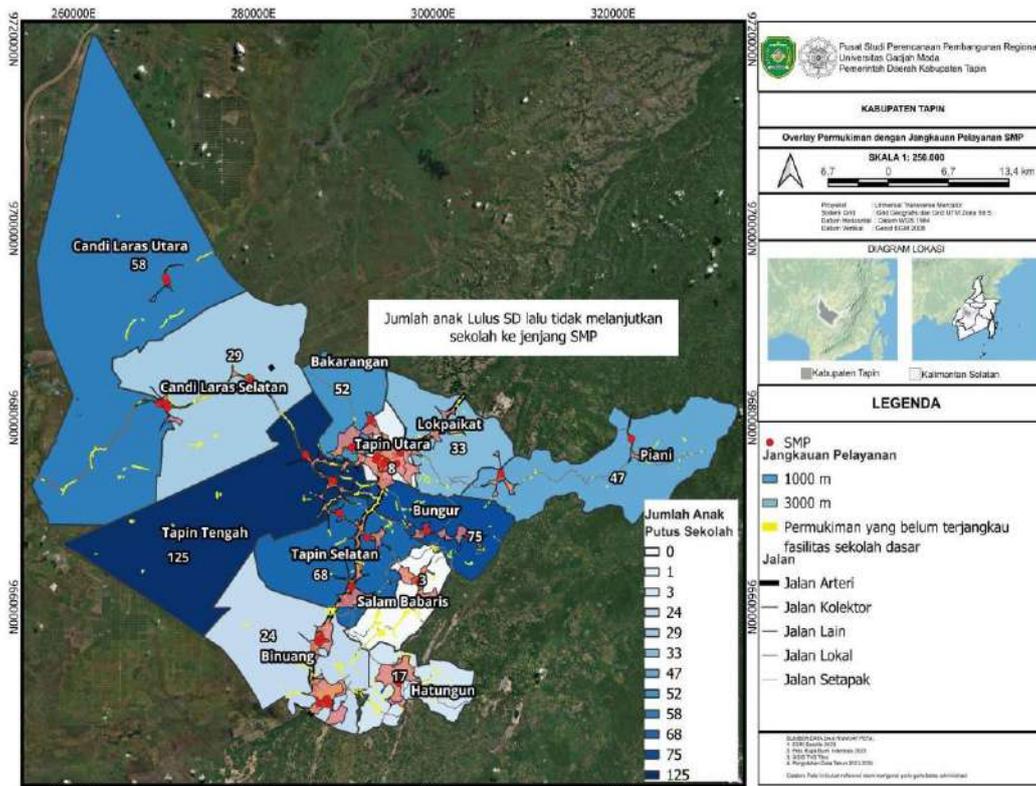
Untuk mengidentifikasi ada tidaknya pola spasial yang dapat menjelaskan mengapa terdapat lulusan SD/ sederajat tidak melanjutkan ke SMP/ sederajat, dilakukan *overlay* data jangkauan pelayanan SMP, sebaran SMP, dan jumlah anak tidak melanjutkan sekolah SMP per desa. Hasil analisis memperlihatkan masih terdapat banyak permukiman yang belum terlayani oleh jangkauan pelayanan SMP (Gambar 5.14) sehingga berdampak pada salah satu kesulitan siswa lulusan SD untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP. Namun demikian, faktor jangkauan layanan tersebut hanya berlaku di kecamatan tertentu saja, seperti Kecamatan Candi Laras Utara dan Piani. Di kecamatan lainnya, faktor jangkauan layanan secara spasial tidak berpengaruh. Sebagai contoh, di Kecamatan Salam Babaris terdapat banyak wilayah permukiman yang tidak masuk dalam jangkauan layanan SMP, namun jumlah lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP hanya sedikit (3 anak). Sebaliknya, area permukiman di Kecamatan Tapin Tengah relatif cukup terjangkau, namun jumlah anak yang tidak melanjutkan ke SMP paling banyak, yaitu 125 anak. Kondisi ini juga terlihat pada *overlay* yang dilakukan pada level desa (Gambar 5.15)

Sementara itu, jika dilihat dari aspek non spasial, alasan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP di Kabupaten Tapin didominasi oleh faktor ekonomi (540 anak) dan budaya, yaitu melanjutkan ke pesantren (113 anak). Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.10 Alasan Tidak Melanjutkan Sekolah ke SMP Tahun 2020**

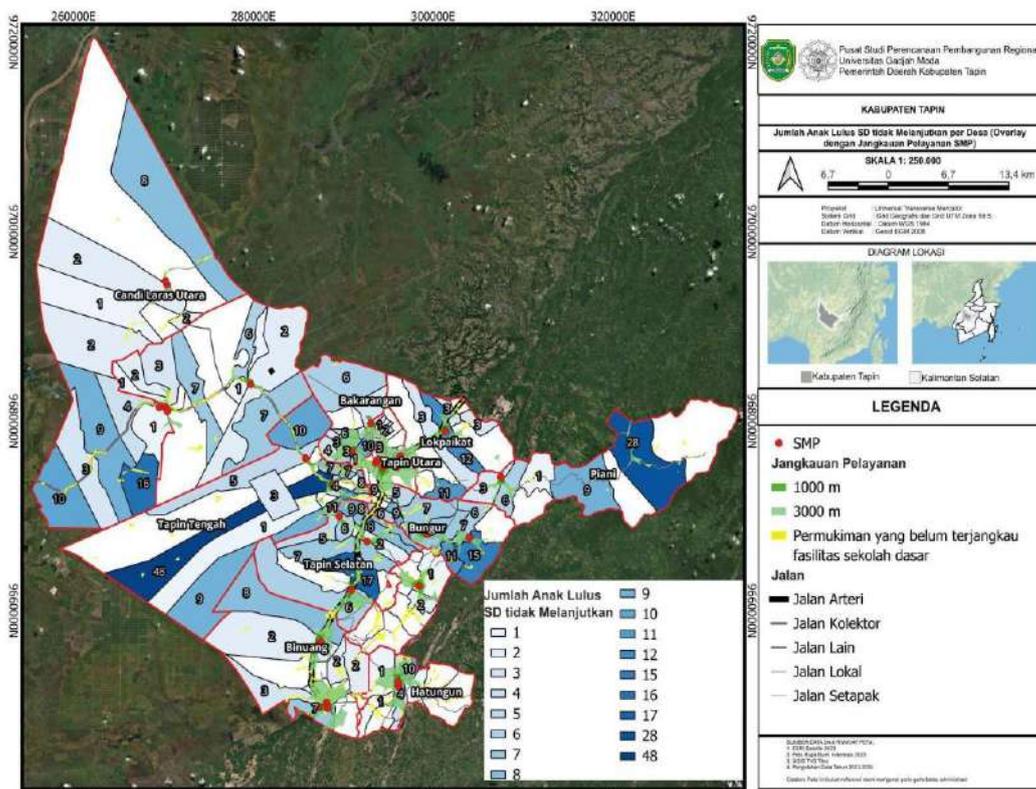
Kecamatan	Jumlah Anak Tidak Melanjutkan	Alasan Tidak Melanjutkan Sekolah						Tidak Disertai Alasan
		Faktor Ekonomi	Faktor Sosial			Faktor Budaya	Faktor Spasial	
			Menikah Dini	Motivasi Bersekolah	Disabilitas/Kemampuan Kurang			
Bakarangan	52	19	3	1	0	9	0	20
Binuang	24	11	0	0	0	0	0	13
Bungur	75	57	0	3	0	3	0	12
Candi Laras Selatan	30	Tidak disertai alasan						30
Candi Laras Utara	58	56	1	1	0	0	0	0
Lokpaikat	33	16	0	4	0	9	4	0
Hatungun	17	8	0	7	2	0	0	0
Piani	47	44	3	0	0	0	0	0
Salam Babaris	3	3	0	0	0	0	0	0
Tapin Selatan	68	32	4	7	2	23	0	0
Tapin Tengah	125	20	0	0	0	69	0	36
Tapin Utara	8	5	1	1	1	0	0	0
<b>Sekolah Dasar (SD)</b>	<b>540</b>	<b>271</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>113</b>	<b>4</b>	<b>111</b>

Sumber: Dapodik Kabupaten Tapin Tahun 2020



**Gambar 5.17 Peta Persebaran Anak Tidak Melanjutkan SMP, Overlay Jangkauan Pelayanan SMP terhadap Permukiman per Kecamatan**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)



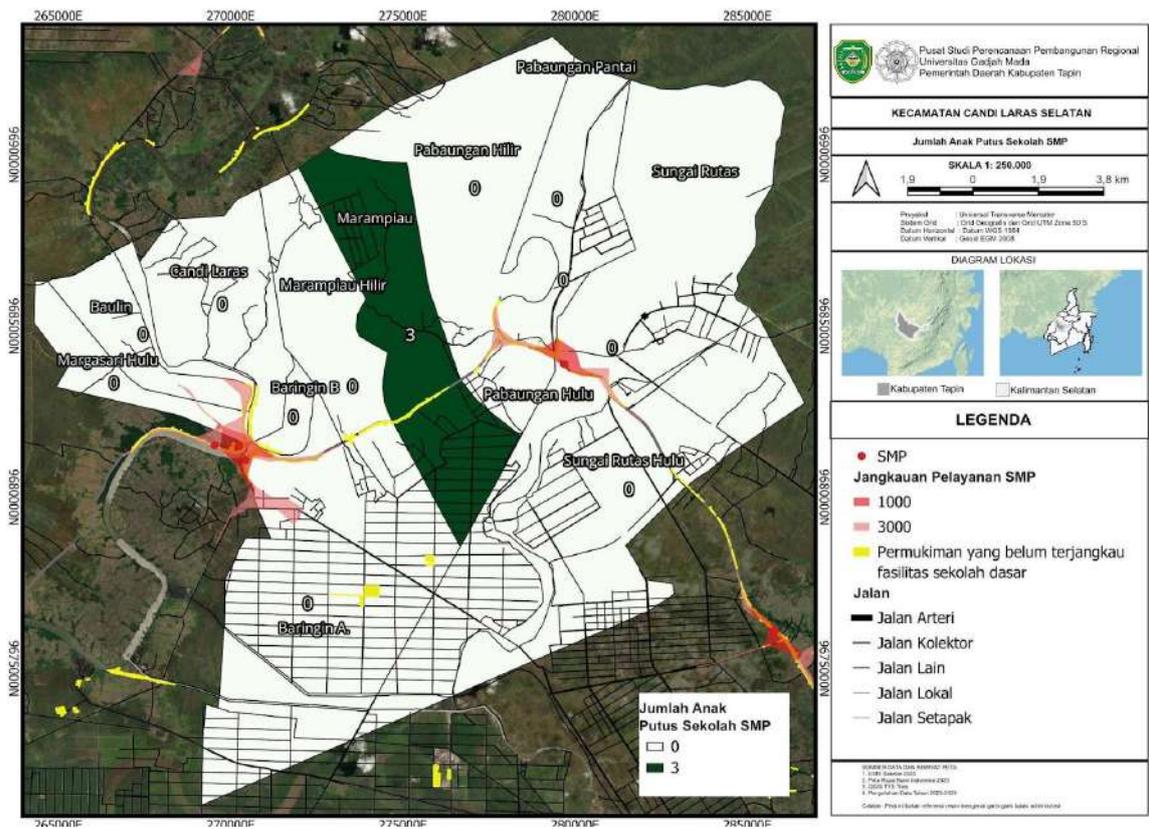
**Gambar 5.18 Peta Persebaran Anak Tidak Melanjutkan SMP, Overlay Jangkauan Pelayanan SMP terhadap Permukiman per Desa**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)

#### 5.2.4 Analisis Spasial Angka Putus Sekolah pada Jenjang SMP/Sederajat

Jika ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah (RLS), Kabupaten Tapin memiliki RLS sebesar 7,95 tahun yang mengindikasikan bahwa masyarakat yang berumur 25 tahun ke atas di Kabupaten Tapin hanya menempuh pendidikan sampai kelas 2 SMP, atau banyak yang mengalami putus sekolah. Seperti pada analisis di jenjang sekolah dasar, untuk mengetahui apakah faktor spasial berpengaruh terhadap jumlah anak putus sekolah pada jenjang SMP, dilakukan *overlay* jangkauan layanan SMP, sebaran permukiman, dan angka putus sekolah. Jangkauan layanan SMP ditetapkan dengan radius 1 km (sesuai dengan SNI 03-1733 tahun 2004, tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan) dan 3 km (menggunakan sepeda motor). Angka putus sekolah pada jenjang SMP/ sederajat hanya terdapat di Kecamatan Candi Laras Selatan (3 anak) dan Kecamatan Bakarangan (1 anak). Di kedua kecamatan tersebut, masih terdapat wilayah permukiman yang tidak masuk dalam jangkauan layanan SMP (Gambar 5.18), sehingga dapat menjadi salah satu alasan putus sekolah karena sulitnya menjangkau sekolah.

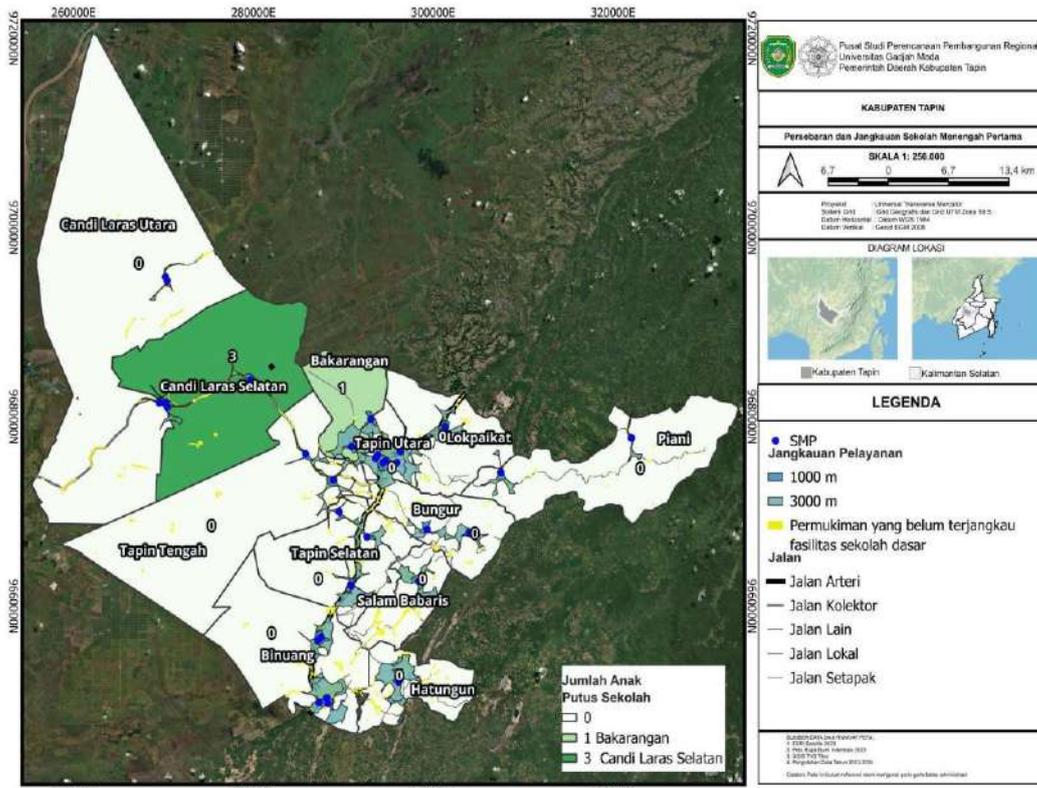
Untuk mengilustrasikan hal tersebut secara lebih mendetail, dilakukan analisis spasial pada Kecamatan Candi Laras Selatan. Di kecamatan tersebut, terdapat 4 SMP yang berlokasi di sepanjang jalan utama (Gambar 5.16) tetapi jangkauan pelayanan SMP belum dapat melayani permukiman yang ada, terutama di Desa Marampiauw, yang memiliki 3 anak putus sekolah pada jenjang SMP. Kondisi ini dapat berdampak pada keputusan anak (dan orang tuanya) untuk putus sekolah walaupun kondisi jalan di Kecamatan Candi Laras Selatan sudah cukup baik (Gambar 5.17)



**Gambar 5.19 Peta Jangkauan Pelayanan SMP pada Kecamatan Candi Laras Selatan**  
 Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)



**Gambar 5.20 Kondisi Jalan Menuju SMP di Kecamatan Candi Laras Selatan**  
 Sumber: Google Earth (2023), Google Street Map (2023) (Diolah)



**Gambar 5.21 Peta Jumlah Anak Putus Sekolah SMP per Kecamatan, Overlay antara Jangkauan Pelayanan dan Permukiman**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)

### 5.2.5 Analisis Spasial Anak SMP Tidak Melanjutkan ke SMA/Sederajat

Pada jenjang SMP/ sederajat, jumlah anak yang tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat jauh lebih banyak dibandingkan dengan angka putus sekolah. Menurut data Dapodik Kabupaten Tapin tahun 2020, terdapat 120 anak lulus SMP/ sederajat tetapi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Kondisi ini paling banyak terjadi di Kecamatan Candi Laras Utara (17 anak), disusul Kecamatan Hatungun (16 anak) dan Binuang (16 anak). Kecamatan dengan jumlah anak tidak melanjutkan ke jenjang SMA paling sedikit adalah Kecamatan Salam Babaris, yaitu 0 anak (Tabel 5.11).

Salah satu penyebab banyaknya anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA adalah rendahnya jangkauan layanan SMA.

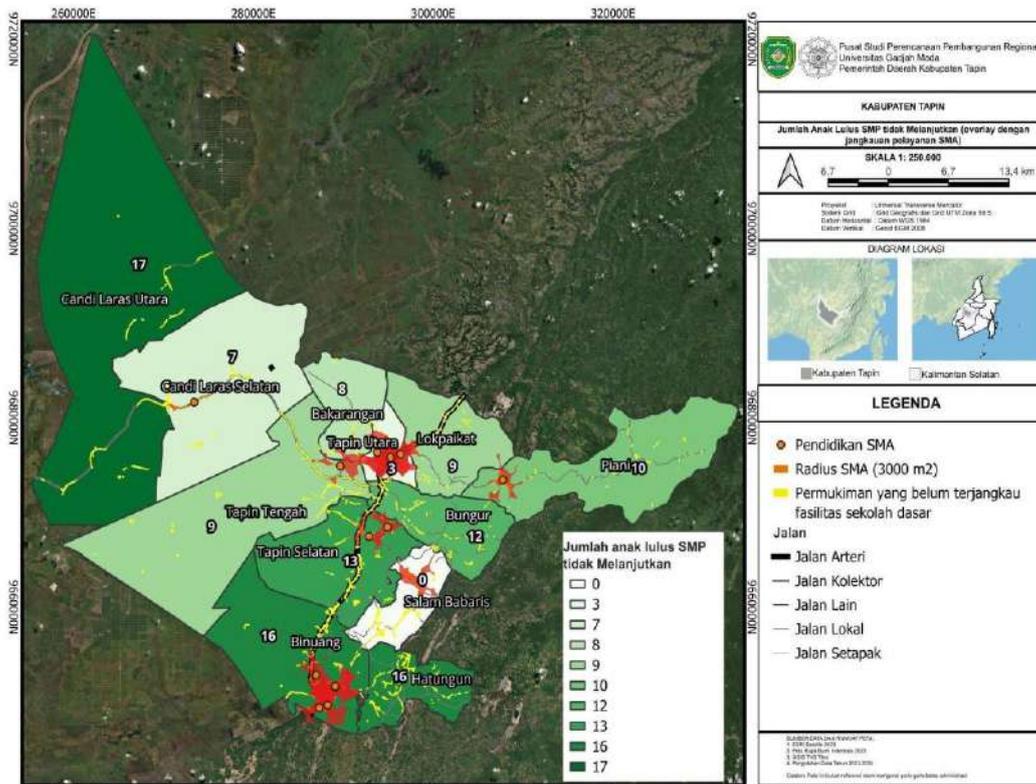
Berdasarkan *overlay* antara sebaran SMA, jangkauan layanan SMA, dan jumlah anak yang tidak melanjutkan SMA (Gambar 5.19 dan 5.20), masih banyak desa yang belum dapat dijangkau oleh layanan pendidikan SMA. Hal ini menjadi hambatan bagi individu yang lulus SMP untuk melanjutkan ke jenjang SMA. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas SMA di Kabupaten Tapin masih rendah dan dapat berdampak kepada minat siswa dalam melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, dari analisis faktor non spasial, alasan anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA di Kabupaten Tapin didominasi oleh faktor ekonomi (57 dari 120 kasus). Faktor ekonomi yang dimaksud antara lain adalah ketidakmampuan untuk memenuhi biaya sekolah dan membantu orang tua bekerja. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.11 Alasan Tidak Melanjutkan Sekolah ke SMA Tahun 2020**

Kecamatan	Jumlah TMS SMP	Alasan Tidak Melanjutkan Sekolah						Tidak Disertai Alasan
		Faktor Ekonomi	Faktor Sosial			Faktor Budaya	Faktor Spasial	
			Menikah Dini	Motivasi	Disabilitas/Kemampuan Kurang			
Bakarangan	8	0	0	0	0	0	0	8
Binuang	16	3	2	0	5	4	0	6
Bungur	12	11	0	0	0	1	0	0
Candi Laras Selatan	7	Tidak disertai alasan						7
Candi Laras Utara	17	17	0	0	0	0	0	0
Lokpaikat	9	5	0	0	0	2	2	0
Hatungun	16	6	1	7	2	0	0	0
Piani	10	5	5	0	0	0	0	0
Salam Babaris	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapin Selatan	13	6	2	3	0	2	0	0
Tapin Tengah	9	3	0	0	0	1	0	5

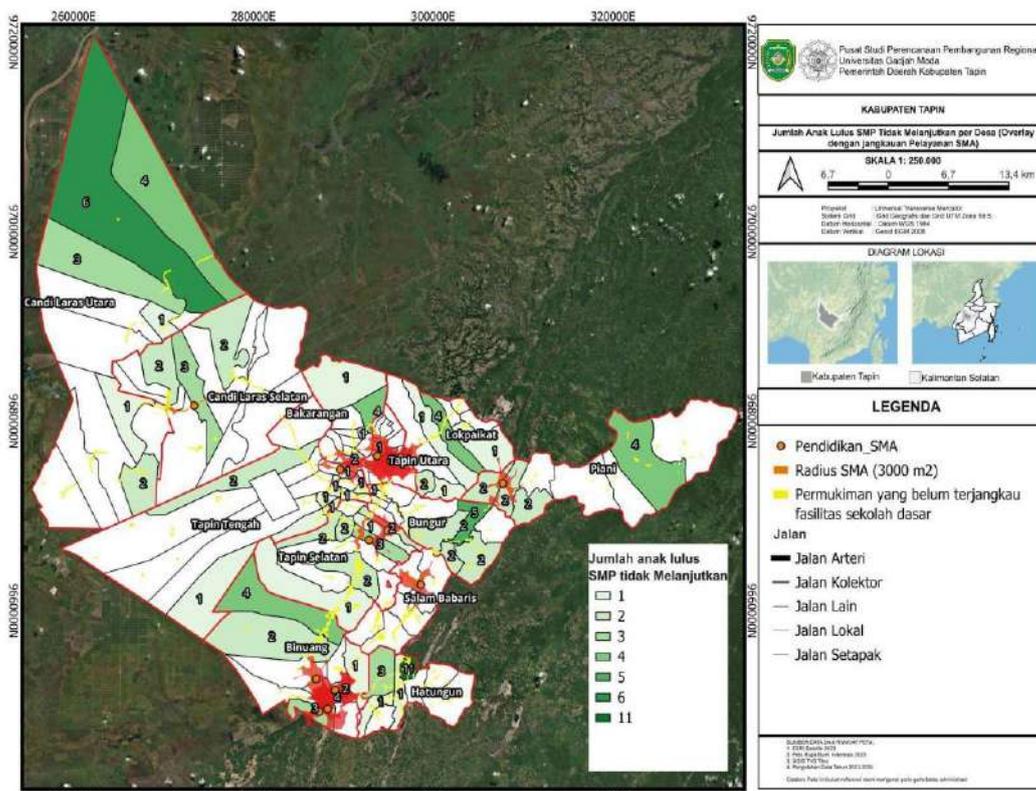
Kecamatan	Jumlah TMS SMP	Alasan Tidak Melanjutkan Sekolah						Tidak Disertai Alasan
		Faktor Ekonomi	Faktor Sosial			Faktor Budaya	Faktor Spasial	
			Menikah Dini	Motivasi	Disabilitas/Kemampuan Kurang			
Tapin Utara	3	1	0	2	0	0	0	0
<b>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>	<b>120</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>26</b>

Sumber: Dapodik Kabupaten Tapin Tahun 2020



**Gambar 5.22 Peta Persebaran Anak Tidak Melanjutkan SMA, Overlay Jangkauan Pelayanan SMA terhadap Permukiman per Kecamatan**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)



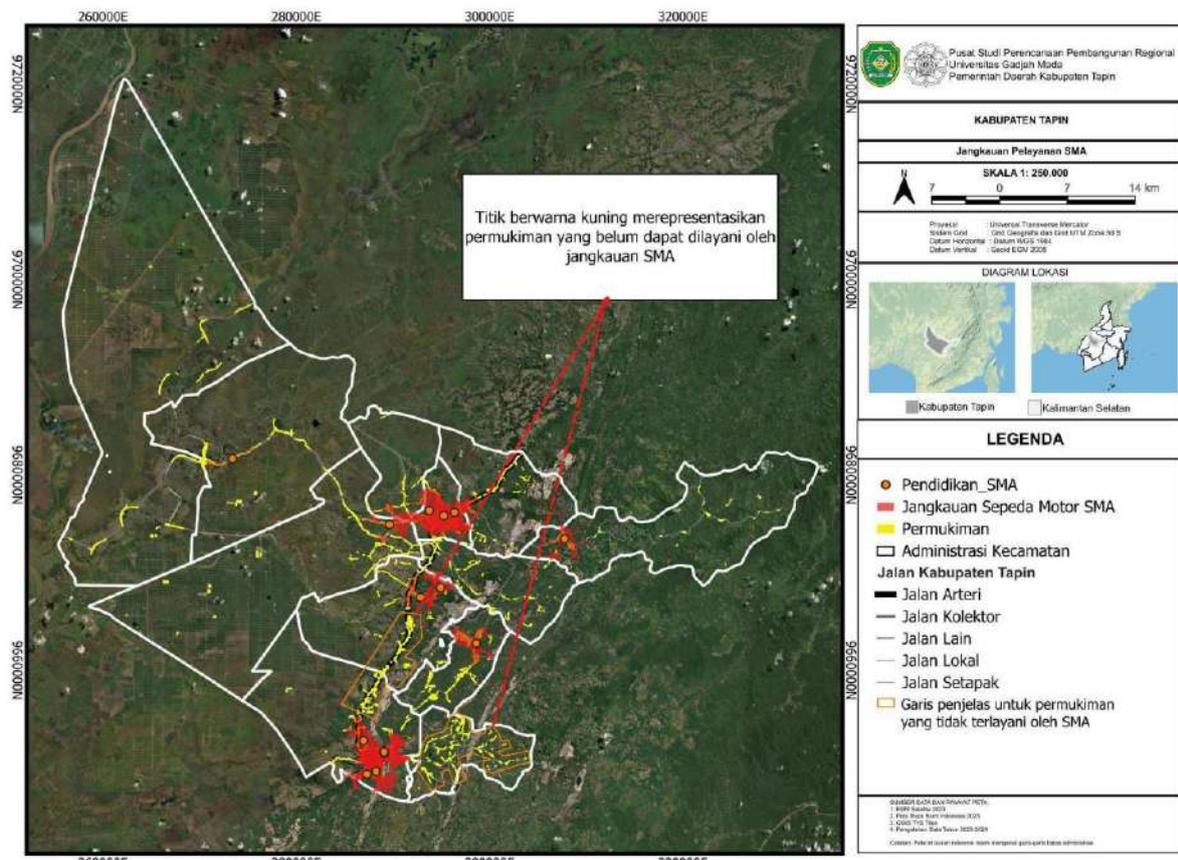
**Gambar 5.23 Peta Persebaran Anak Tidak Melanjutkan SMA, Overlay Jangkauan Pelayanan SMA terhadap Permukiman per Desa**

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)

### 5.2.6 Analisis Spasial Angka Putus Sekolah pada Jenjang SMA/Sederajat

Di Kabupaten Tapin, jumlah sekolah menengah atas masih tergolong sedikit, yaitu 14 sekolah yang terdiri dari SMA, SMK, MA, dan SMALB. Di lain sisi, Kabupaten Tapin memiliki HLS sebesar 12,04 yang mengindikasikan bahwa anak umur 7 tahun keatas di Kabupaten Tapin memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai dengan lulus sekolah menengah atas. Akan tetapi, pada kenyataannya, jangkauan layanan untuk sekolah menengah atas di Kabupaten Tapin masih rendah. Analisis jangkauan layanan SMA/ sederajat dilakukan dengan menetapkan radius pelayanan sejauh 3 km dari titik lokasi SMA, SMK, MA, SMALB. Hasilnya didapatkan bahwa sebaran SMA/ sederajat di Kabupaten Tapin masih kurang merata karena sebagian besar SMA berada di area perkotaan seperti di Kecamatan Tapin Utara (3 SMA) dan Benuang (5 SMA) atau di sepanjang jalan utama (Gambar 5.21).

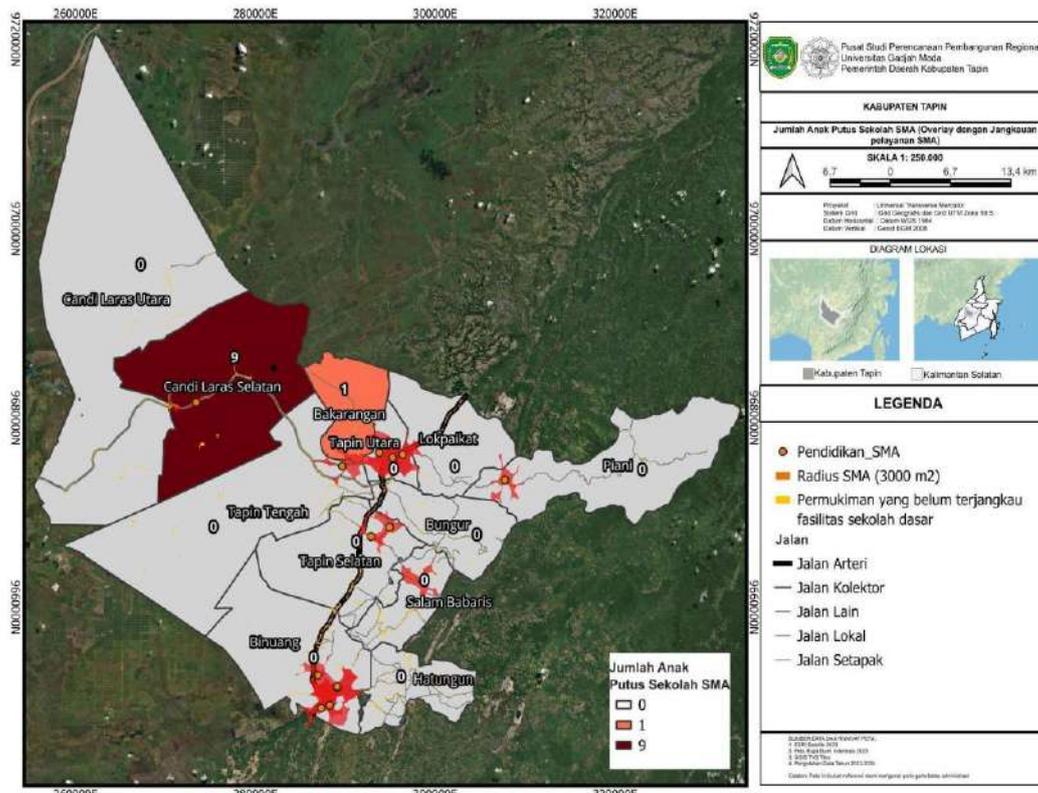
Kecamatan yang berada di pinggiran atau jauh dari area perkotaan masih sedikit yang memiliki SMA. Tercatat 5 kecamatan yang tidak memiliki SMA, yaitu Kecamatan Bungur, Lokpaikat, Hatungun, Bakarangan, dan Candi Laras Utara. Masyarakat yang kesulitan mengakses SMA akan cenderung tidak melanjutkan sekolah pada jenjang tersebut dan lebih memilih bekerja, sehingga kebijakan untuk memperluas jangkauan pelayanan SMA masih perlu ditinjau kembali.



Gambar 5.24 Peta Jangkauan Pelayanan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tapin

Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)

Namun demikian, ketika dilakukan *overlay* dengan angka putus sekolah pada jenjang SMA, tidak ditemukan adanya pola spasial tertentu (Gambar 5.22). Angka putus sekolah hanya tercatat di Kecamatan Candi Laras Selatan (9 orang) dan Bakarangan (1 orang). Meskipun kedua kecamatan tersebut tidak termasuk dalam jangkauan layanan SMA/ sederajat, kecamatan dengan karakteristik yang sama ternyata tidak memiliki angka putus sekolah (0 anak), seperti Kecamatan Candi Laras Utara dan Piani, yang cenderung berbukit.



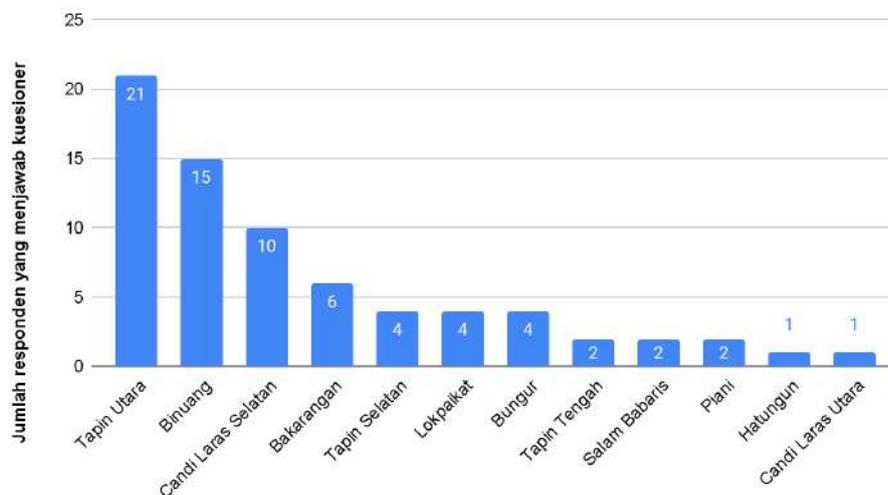
**Gambar 5.25 Peta Persebaran Anak Putus Sekolah SMA, Overlay Jangkauan Pelayanan SMA terhadap Permukiman per Kecamatan**

*Sumber: Rupa Bumi Indonesia 2023 (Diolah)*

### 5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi RLS dan HLS

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi RLS dan HLS di Kabupaten Tapin secara lebih mendalam, dilakukan analisis terhadap kuesioner yang disebarakan kepada kepala sekolah dan komite sekolah. Pertanyaan kuesioner diformulasikan dengan mengacu pada hasil FGD (*focus group discussion*) dan wawancara dengan instansi terkait dan akademisi. Pengumpulan kuesioner dilakukan selama kurang lebih 1,5 bulan. Total, terdapat 74 responden kepala sekolah (46 jenjang SD/ sederajat, 22 jenjang SMP/ sederajat, dan 6 jenjang SMA/ sederajat) dan 67 responden yang merupakan anggota komite sekolah (39 jenjang SD/ sederajat, 22 jenjang SMP/ sederajat, dan 6 jenjang SMA/ sederajat). Distribusi responden mengikuti tipologi wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan 48% sekolah yang mengisi kuesioner berada di wilayah perkotaan (Tapin Utara 21% dan Binuang 15%), sedangkan 52% sekolah lainnya merepresentasikan wilayah perdesaan (Gambar 5.23). Untuk komite sekolah, 34,3% responden memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta, 20,9% berprofesi sebagai guru, 10,4% sebagai PNS, dan 10,4% bekerja sebagai petani.

Dari sisi pendidikan anggota komite sekolah, 46,3% memiliki ijazah terakhir D4/S1, 31,3% tamat SMA/ sederajat, dan 11,9% tamat SMP/ sederajat. Mata pencaharian dan pendidikan orang tua diketahui cukup berpengaruh terhadap lama sekolah anak. Orang tua dengan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi dan memiliki pendidikan cukup tinggi cenderung mendukung pendidikan anaknya (Björklund, 1994; Noël dan de Broucker, 2002; Lin, 2021). Melihat komposisi mata pencaharian dan pendidikan anggota komite sekolah di Kabupaten Tapin tersebut, terdapat potensi orang tua untuk mendukung kegiatan sekolah anaknya.



Gambar 5.26 Jumlah Sekolah yang Mengisi Kuesioner Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Hasil analisis (2023)

Terkait akses terhadap sarana pendidikan, 34 dari 74 kepala sekolah menyatakan bahwa sebagian kecil (<50%) siswanya bertempat tinggal lebih dari 2 km. Walaupun demikian, 42 dari 74 kepala sekolah menyatakan bahwa hanya sebagian kecil (<50%) siswanya berjalan kaki ke sekolah, yang berarti bahwa sebagian besar siswa diantar atau menggunakan kendaraan bermotor untuk mengakses sekolah (Gambar 5.24).



**Gambar 5.27 Akses terhadap Sekolah Menurut Kepala Sekolah**

Sumber: Hasil analisis (2023)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh responden yang merupakan anggota komite sekolah. 33 dari 67 komite sekolah menyatakan bahwa jarak rumah ke sekolah kurang dari 1 km dan 29 dari 67 komite sekolah menyatakan bahwa jarak rumah ke sekolah antara 1 hingga 3 km. Terkait dengan sebaran fasilitas pendidikan, sebagian besar responden menyatakan bahwa terdapat TK dan SD/ sederajat pada jarak 1 km dari rumah mereka. Pada jenjang yang lebih tinggi, sebagian besar menyatakan bahwa terdapat SMP/ sederajat pada jarak 3 km dari rumah mereka dan pada jenjang SMA/ sederajat mulai menjauh hingga 5 km (Gambar 5.25). Pernyataan ini sejalan dengan hasil analisis spasial terkait sebaran sekolah yang dioverlay dengan sebaran permukiman.



**Gambar 5.28 Akses terhadap Sekolah Menurut Komite Sekolah**

Sumber: Hasil analisis (2023)

Aspek lain yang dianalisis dari kuesioner adalah fasilitas sekolah, yang diasumsikan mempengaruhi motivasi siswa untuk bersekolah. Sebagian besar (>50%)

responden, baik kepala sekolah maupun komite sekolah menyatakan bahwa fasilitas ruang kelas, perpustakaan, olahraga, dan kamar mandi sudah mencukupi (Tabel 5.12). Fasilitas yang dianggap tidak mencukupi adalah lab komputer, lab fisika/biologi/kimia, dan tempat ibadah. Sementara itu, dari segi kondisi fasilitas sekolah, hanya ruang kelas dan perpustakaan yang dinilai dalam kondisi baik oleh mayoritas responden (Tabel 5.13). Fasilitas lain seperti lab komputer, ruang kesehatan, lab fisika/biologi/kimia, lapangan olahraga, kamar mandi, dan ruang ibadah dinyatakan dalam kondisi kurang baik oleh mayoritas kepala sekolah dan komite sekolah.

**Tabel 5.12 Ketercukupan Fasilitas Sekolah**

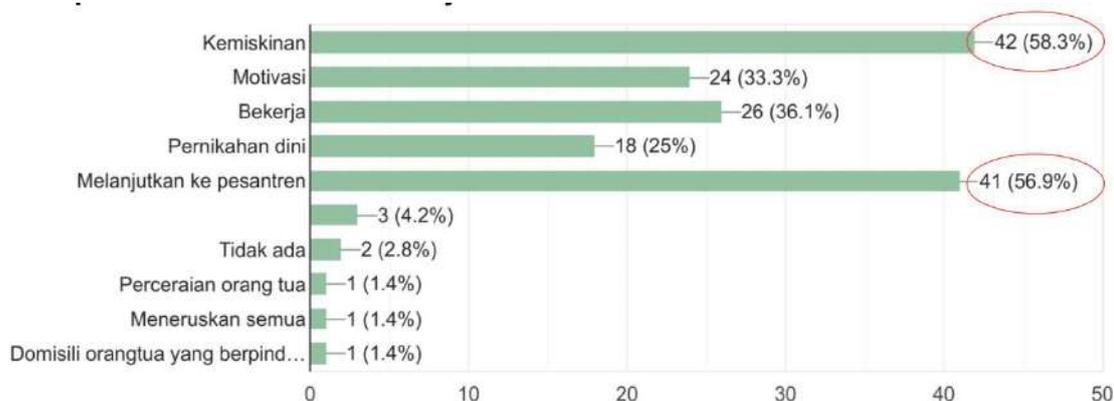
Fasilitas	Kepala Sekolah		Komite Sekolah	
	Mencukupi	Tidak mencukupi	Mencukupi	Tidak mencukupi
Ruang kelas	65	9	63	4
Laboratorium komputer	24	49	25	42
Perpustakaan	62	12	55	12
Ruang kesehatan/UKS	30	42	34	33
Laboratorium fisika/biologi/kimia	25	49	23	44
Fasilitas dan lapangan olahraga	61	13	47	20
Kamar mandi atau WC	65	9	58	9
Tempat ibadah	30	44	32	35

**Tabel 5.13 Kondisi Fasilitas Sekolah**

Fasilitas	Kepala Sekolah			Komite Sekolah		
	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang
Ruang kelas	0	65	9	41	17	9
Laboratorium komputer	20	4	36	19	2	46
Perpustakaan	34	19	17	32	19	16
Ruang kesehatan/UKS	18	11	36	24	7	36
Laboratorium fisika/biologi/kimia	17	9	38	17	3	47
Fasilitas dan lapangan olahraga	26	20	26	23	22	22
Kamar mandi atau WC	30	19	25	29	20	18
Tempat ibadah	21	7	35	23	6	38

Terkait dengan pendapat responden mengenai alasan siswa putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, sebagian besar (>50%) responden menyatakan faktor

kemiskinan (58,3%) dan melanjutkan ke pesantren (56,9%). Alasan bekerja disebutkan oleh 36,1% responden, motivasi disebutkan oleh 33,3% responden, dan pernikahan dini disebutkan oleh 25% responden (Gambar 5.26). Lebih lanjut, komite sekolah menyatakan bahwa kondisi keuangan keluarga dan jumlah anggota keluarga (banyaknya tanggungan) mempengaruhi keberlanjutan sekolah. Sejalan dengan hal tersebut, program beasiswa dan komitmen keluarga akan sangat membantu siswa untuk tidak putus sekolah dan melanjutkan sekolah.



**Gambar 5.29 Alasan Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan Sekolah**

*Sumber: Hasil analisis (2023)*

Untuk mengidentifikasi faktor mana yang paling berpengaruh, responden diminta untuk memberikan penilaian tingkat prioritas terhadap tiga isu utama yang ditengarai menyebabkan rendahnya RLS dan HLS, yaitu ekonomi (atau kondisi finansial), melanjutkan ke pesantren, dan pernikahan dini. Akan tetapi, hasil analisis menyebutkan bahwa responden memberikan tingkat kepentingan yang relatif setara antara ketiga aspek tersebut (Gambar 5.26). Namun demikian, terdapat inkonsistensi pernyataan dari kepala sekolah. Sebagian besar responden kepala sekolah menyatakan hanya sedikit atau tidak ada siswanya yang memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah, tidak ada siswa yang menikah dini, dan hanya sedikit siswa yang melanjutkan ke pesantren.



### Gambar 5.31 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Bersekolah

Sumber: Hasil analisis (2023)

Berdasarkan telaah data sekunder dan kuesioner, faktor **ekonomi** (termasuk ketidakmampuan untuk menanggung biaya penunjang sekolah, seperti transportasi, seragam, sepatu, buku, bekal) merupakan alasan yang paling sering diungkapkan ketika siswa (ataupun orangtuanya) memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Faktor lain yang juga kerap disebut adalah faktor sosial dan budaya, antara lain dengan adanya **pernikahan dini** atau memilih jalur pendidikan **pesantren**. Beberapa studi menyebutkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Tapin terjadi pada keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah sebagai strategi mengurangi pengeluaran keluarga (Kartika, dkk., 2021; Munirah, 2022). Di sisi lain, pendidikan pesantren juga kerap dipandang sebagai alternatif pendidikan yang lebih murah dibandingkan dengan menyekolahkan anak ke sekolah formal.

Keputusan untuk meneruskan atau berhenti sekolah di Kabupaten Tapin terlihat lebih dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari keluarga ataupun individu, mengingat anak pada usia sekolah belum memiliki kapasitas finansial secara mandiri. Faktor **kualitas sekolah**, seperti kelengkapan fasilitas ataupun kualitas guru, terlihat memiliki hubungan dengan motivasi sekolah. Akan tetapi, kelengkapan fasilitas **bukan** menjadi alasan siswa ataupun orang tua siswa untuk putus atau tidak melanjutkan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas sekolah dan angka putus sekolah bukanlah hubungan sebab-akibat yang bersifat langsung. Terdapat kemungkinan bahwa kualitas sekolah mempengaruhi motivasi siswa (dan orang tua siswa) untuk meneruskan sekolah (misal: prestasi akademik siswa dapat disalurkan dan diapresiasi dengan baik), jika didukung dengan kondisi ekonomi keluarga yang cukup.

#### 5.4 Strategi untuk meningkatkan RLS dan HLS

Berdasarkan model konseptual pada Gambar 5.27, dapat dirumuskan beberapa strategi untuk meningkatkan RLS serta HLS di Kabupaten Tapin. Akselerasi peningkatan RLS dan HLS dilakukan dengan peningkatan angka partisipasi sekolah serta pengurangan angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke sekolah (Gambar 5.28). Secara spasial, walaupun terdapat pola spasial antara wilayah perkotaan dan perdesaan dengan kecenderungan putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, namun pola tersebut tidak muncul di semua kecamatan (hasil analisis pada subbab 5.2). Dengan kata lain, diperlukan studi lanjutan untuk lebih mendalami aspek spasial yang mempengaruhi RLS dan HLS.



**Gambar 5.32 Strategi Akselerasi Peningkatan RLS dan HLS Kabupaten Tapin**

*Sumber: Hasil analisis (2023)*

Dari aspek ekonomi, diperlukan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan, memberdayakan kegiatan CSR (*corporate social responsibility*) terutama dari sektor tambang dan perkebunan yang cukup banyak terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan, salah satunya melalui program beasiswa orang tua asuh. Berdasarkan data kemiskinan ekstrem, Kecamatan Candi Laras Utara, Tapin Tengah, dan Binuang memiliki jumlah penerima bantuan dalam jumlah banyak dan memiliki angka tidak melanjutkan sekolah yang tinggi. Program penurunan kemiskinan yang difokuskan pada kecamatan tersebut akan dapat mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah, yang selanjutnya dapat meningkatkan angka RLS dan HLS. Di sisi lain, pemberdayaan CSR dapat menjadi alternatif untuk pemberian bantuan pendidikan. Hal ini mengingat kapasitas finansial pemerintah Kabupaten Tapin, dimana 86% realisasi anggaran pendidikan masih untuk memenuhi belanja pegawai.

Dari sisi sosial dan budaya, strategi peningkatan RLS dan HLS dapat dicapai melalui formalisasi pendidikan pesantren, orang tua asuh, dan pendidikan inklusif. Terkait pesantren, penyelenggaraan ujian formal ataupun integrasi kurikulum pendidikan formal dapat membantu menurunkan angka putus sekolah. Kolaborasi dengan pesantren ataupun tetua agama melalui program orang tua asuh diperkirakan akan dapat meningkatkan efektivitas peningkatan RLS dan HLS mengingat budaya keagamaan yang cukup kental di Kabupaten Tapin. Di sisi lain, pendidikan inklusif juga perlu diperhatikan mengingat terdapat beberapa alasan putus sekolah ataupun tidak melanjutkan sekolah yang menyatakan disabilitas, sakit, ataupun ketidakmampuan belajar.

Akselerasi peningkatan RLS dan HLS juga memerlukan intervensi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapin. Intervensi kebijakan tersebut antara lain melalui alokasi

anggaran pendidikan, penetapan target RLS dan HLS di tiap kecamatan, peningkatan akses dan mutu pendidikan (seperti perbaikan dan penambahan fasilitas serta peningkatan kualitas guru), serta akurasi pencatatan RLS dan HLS. Studi lanjutan yang lebih mendalam terkait RLS dan HLS juga diperlukan sebagai landasan argumentasi rekomendasi peningkatan RLS dan HLS yang lebih teknis dan mendetail.

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi kondisi pendidikan, analisis tipologi wilayah, dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi RLS dan HLS di Kabupaten Tapin, baik melalui analisis kualitatif dan kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa angka RLS dan HLS ditentukan oleh keputusan siswa untuk bersekolah (atau tidak) yang dipengaruhi oleh faktor spasial, ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas sekolah. Namun demikian, besaran pengaruh masing-masing faktor tersebut masih belum dapat ditentukan karena keterbatasan data ataupun sumber daya untuk mengumpulkan data secara lebih mendalam.

**Tipologi spasial berperan dalam menentukan sebaran fasilitas pendidikan** di Kabupaten Tapin. Faktor-faktor seperti lokasi, topografi, kedekatan dengan infrastruktur transportasi, dan distribusi pusat-pusat kegiatan atau permukiman mempengaruhi aksesibilitas terhadap pendidikan. Hal ini terlihat dari sebaran sekolah yang cenderung terpusat di kawasan perkotaan yang dilewati oleh jalan raya, terutama jalan Trans Kalimantan. Dengan kondisi tersebut, penduduk yang tinggal di area perkotaan memiliki akses yang lebih mudah terhadap sekolah, terutama pada jenjang sekolah yang lebih tinggi. Sementara itu, penduduk yang tinggal jauh dari pusat-pusat permukiman memiliki akses terhadap pendidikan yang lebih sulit. Meskipun demikian, **tipologi spasial tidak secara signifikan mempengaruhi RLS dan HLS**. Sebagai contoh, Kecamatan Bungur dan Tapin Selatan, yang dilalui oleh jalan Trans Kalimantan dan memiliki banyak pusat-pusat permukiman yang bersifat perkotaan, mencatat angka tidak melanjutkan sekolah yang cukup tinggi, bahkan melebihi Kecamatan Piani yang cenderung berbukit dan Candi Laras Utara yang sebagian besar berupa area perkebunan. Tidak adanya pola spasial yang signifikan mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain, di luar akses terhadap sarana pendidikan, yang mempengaruhi RLS dan HLS.

Berdasarkan analisis kuesioner kepada kepala sekolah dan komite sekolah, **faktor ekonomi, sosial (pernikahan dini), dan budaya (melanjutkan ke pesantren) ditemukan mempengaruhi RLS dan HLS**. Walaupun sekolah negeri sudah bebas biaya, masih terdapat 'biaya' lain seperti transportasi menuju ke sekolah, bekal, dan biaya kebutuhan 'sosial' anak seperti iuran karyawisata. Keluarga kurang mampu cenderung mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini terbukti dengan angka partisipasi sekolah yang menurun pada level SMA/ sederajat, yang berarti terdapat sejumlah siswa SMP yang putus sekolah ataupun tidak melanjutkan

ke SMA. Melihat struktur perekonomian yang masih didominasi kegiatan ekstraktif, terdapat kemungkinan bahwa siswa SMP yang putus sekolah ataupun tidak melanjutkan ke SMA memilih untuk bekerja di perkebunan yang umumnya tidak membutuhkan level pendidikan tertentu. Faktor ekonomi kemudian memegang peranan yang dominan dan juga mempengaruhi faktor sosial dan budaya. Faktor sosial, seperti pernikahan dini, dapat dipicu oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Sementara itu, faktor budaya, seperti melanjutkan ke pesantren juga dapat dipicu oleh alasan ekonomi. Sayangnya, analisis kuesioner tidak menunjukkan faktor mana yang paling berpengaruh. Responden umumnya menyatakan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan budaya memiliki tingkat pengaruh yang sama terhadap keputusan bersekolah (atau tidak).

Di sisi lain, ***kualitas sekolah yang meliputi kelengkapan fasilitas dan kompetensi guru mempengaruhi motivasi siswa (dan keluarganya) untuk bersekolah***. *Overlay* (tumpang susun) sebaran sekolah yang memiliki fasilitas kurang dengan tingkat partisipasi sekolah menunjukkan pola bahwa sekolah dengan fasilitas kurang cenderung memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Meskipun demikian, kelengkapan fasilitas bukan menjadi alasan utama siswa dalam mengambil keputusan bersekolah.

## 6.2. Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa limitasi analisis yang disebabkan oleh keterbatasan data. Pertama, data primer tidak mencakup observasi lapangan tetapi mengandalkan kuesioner yang didistribusikan secara *online*. Akibatnya, penjelasan terhadap beberapa data yang bersifat kontradiktif menjadi kurang mendalam. Distribusi kuesioner secara *online* juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah bias pengisian oleh responden. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan dengan data primer yang lebih lengkap, seperti survei lapangan dan wawancara kepada siswa yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Kedua, tidak semua data sekunder bisa digunakan untuk analisis. Sebagai contoh, data Podes terkait akses sekolah didominasi oleh responden yang tidak menjawab, sehingga data tersebut tidak bisa digunakan. Akibatnya, analisis kuantitatif menjadi terbatas. Ketiga, data spasial masih terbatas pada skala 1: 250.000 sehingga analisis pada level desa tidak bisa dilakukan secara mendetail. Keempat, analisis yang dilakukan terbatas pada proyeksi umum dan deskriptif, sehingga besaran pengaruh faktor ekonomi, sosial, dan budaya terhadap RLS dan HLS tidak bisa diukur secara rigid. Kajian lanjutan diharapkan dapat melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif secara lebih mendalam dengan data yang lebih detail dan lengkap.

### 6.3. Rekomendasi

Akselerasi peningkatan RLS dan HLS dapat dicapai melalui serangkaian strategi yang melibatkan aspek kebijakan pemerintah daerah, sosial budaya, ekonomi, dan spasial. Salah satu pendekatan utama adalah meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dengan merumuskan kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang memadai serta penetapan target spesifik di tingkat kecamatan maupun desa. Untuk mengurangi angka putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Dari segi sosial, budaya, dan ekonomi dapat dilakukan formalisasi pendidikan pesantren, pemberian beasiswa orangtua asuh, penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi siswa dengan disabilitas, kerjasama dengan dinas lain dalam mengentaskan kemiskinan, serta keterlibatan perusahaan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Akurasi pencatatan data juga perlu diperbaiki untuk meningkatkan RLS dan HLS di Kabupaten Tapin. Berikut rekomendasi lebih lanjut mengenai program yang dilakukan untuk meningkatkan angka RLS dan HLS:

- a. Kebijakan
  - i. Membentuk tim atau **satgas** tingkat kabupaten, kecamatan dan desa untuk mengoptimalkan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) dengan dukungan alokasi dana desa (ADD).
  - ii. Memberikan penghargaan atau "**awarding**" untuk kecamatan dan desa yang mencapai angka rata-rata lama sekolah tertinggi.
  - iii. Mewajibkan belajar sembilan tahun untuk **pemerintah desa**, mulai dari perangkat desa, hingga, RT dan RW
  - iv. **Akurasi data** penduduk usia sekolah dan usia 25-55 tahun yang belum mencapai wajib belajar sembilan tahun dengan meningkatkan peran pemerintah desa serta ketua RT dan RW
- b. Faktor Sosial Budaya
  - i. Mendorong **Pondok Pesantren** yang memiliki pendidikan formal untuk bekerja sama dengan PKBM sekitar wilayahnya serta membentuk Satuan Pendidikan madrasah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019.
  - ii. Memaksimalkan peran **Ormas dan Majelis Ta'lim** untuk mendorong anggotanya melanjutkan Pendidikan melalui Paket A, B dan C.
  - iii. Mendorong pendidikan **inklusif**
- c. Faktor Ekonomi

- i. Mendorong **dunia usaha dan industri** untuk meningkatkan taraf kehidupan karyawannya secara berjenjang.
- ii. **Optimalisasi peran lembaga pendidikan**, organisasi profesi pendidik dan dunia usaha, serta melakukan gerakan satu guru lima siswa atau satu orang tua asuh untuk lima siswa

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. M., Asani, R. N. C. P., Wattimena, C. R. J., dan Yuniasih, A. F. (2019). *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG's*, 593-601.
- Arif, M. N. R. A. (2015). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Signifikan*, 3(1), 81-94.
- Auliana, L. (2021). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Paritas Daya Beli terhadap PDRB di Kalimantan Selatan. Skripsi S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat.
- Björklund, A. (1994). The Impact of Family Background on the Returns on and Length of Schooling in Sweden. Dalam: Asplund, R. (eds). *Human Capital Creation in an Economic Perspective*, pp. 95-116. Physica: Heidelberg.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023). *Kabupaten Tapin dalam Angka Tahun 2023*. Rantau: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin.
- Faritz, M. N., dan Soejoto, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1), 16-21.
- Hadi, A. (2017). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Terhadap Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. *Media Trend*, 14(2), 148-153
- Handayani, N. S., Bendesa, I. K. G., dan Yuliarmi, N. N. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan PDRB per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3449-3474
- Kim, J., dan Jun, M. (2022). Money, a Drain of Educational Opportunity: A Microregional Study of School Dropouts in Mpigi, Uganda. *Sustainability*, 14(10), 5875.
- Lin, C. (2021). Analysis on Education Acquisition of Rural Women in China — Based on CGSS2017. *Proceedings of 6th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities*, 267 - 274
- Maulida, H. H., dan Saleh, M. (2023). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata – Rata Lama Sekolah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(1), 514-519.
- Muttaqin, T., van Duijn, M., Heyse, L., Wittek, R. (2016). The Impact of Decentralization on Educational Attainment in Indonesia. Dalam: Holzacker, R., Wittek, R., Woltjer, J. (eds). *Decentralization and Governance in Indonesia. Development and Governance*, vol 2, pp. 79-103. Springer: Cham
- Muttaqin, T., Wittek, R., Heyse, L., dan van Duijn, M. (2017). Why Do Children Stay Out Of School In Indonesia? *The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(2), 93–108.
- Muttaqin, T (2018). Determinants of Unequal Access to and Quality of Education in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1), 1-23.
- Noël, S., de Broucker, P. (2002). Intergenerational Inequities. Dalam: Hutmacher, W., Cochrane, D., Bottani, N. (eds). *Pursuit of Equity in Education*, pp. 277-296. Springer: Dordrecht.

- Nurmutiazifah, A., dan Yuniasih, A. F. (2019). Penerapan Model Regresi Data Panel: Determinan Ketimpangan Capaian Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2015-2019. *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG's*, 1294-1304.
- Pradipta, S. A., dan Dewi, R. M. (2020). Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 109-115.
- Putriana, R., dan Aji, R. H. S. (2022). Studi Atas Kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rata-rata Lama Sekolah Sebagai Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 31-47.
- Ratnasari, D., Kartika, N. Y., dan Normelani, E. (2021). Indikator yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografli Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 35-42.
- Rony, M. (2016). Analisis Determinan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2015. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 5(4).
- Riyadi, D. R., & Hendajany, N. (2023). Mean Years of Schooling Inequality and Return on Education: Analysing the Main Determining Factors. *Journal of Economics and Sustainability*, 5(1), 43–58.
- Sabrina, R., Manurung, A. I., dan Sirait, B. A. (2022). Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dari Harapan Lama Sekolah (HLS) di Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4784-4792
- Safitri L., dan Effendi, M. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk dan Investasi terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(4), 842-851
- Takyi, B. K., dan Addai, I. (2002). Religious Affiliation, Marital Processes, and Women's Educational Attainment in a Developing Society. *Sociology of Religion*, 63(2), 177-193
- Yamin, M., Suyidno, dan Mattiro, S. (2015). Kajian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar. *Laporan Penelitian Bappeda Kabupaten Banjar*

# LAMPIRAN

## Lampiran Rekomendasi

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
1.	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>			
	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Mebel PAUD</li> <li>- Pengadaan Perlengkapan PAUD</li> <li>- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD</li> <li>- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</li> <li>- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</li> <li>- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimulan penyediaan sarana prasarana pendidikan PAUD</li> <li>- Peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya penyelenggaraan Pendidikan PAUD</li> </ul>	Dinas Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan data Kependidikan PAUD</li> <li>- Pengolahan dan Penyajian Data Kependidikan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan</li> <li>- Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah</li> <li>- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependidikan</li> <li>- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependidikan dengan Instansi lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan Pendidikan PAUD secara optimal</li> <li>- Mendorong kerjasama pemanfaatan data Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan</li> </ul>	Dinas Pendidikan
	<b>Pengelolaan Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Bantuan Langsung (diluar BOS) untuk</li> </ul>	Dinas Pendidikan

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
	<b>Sekolah Dasar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Perpustakaan Sekolah</li> <li>- Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah</li> <li>- Pengadaan Mebel Sekolah</li> <li>- Pengadaan Perlengkapan Sekolah</li> <li>- Pengadaan Perlengkapan Siswa</li> <li>- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</li> <li>- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</li> <li>- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</li> <li>- Pembinaan Minat, Bakat, dan kreativitas Siswa</li> <li>- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah</li> <li>- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> <li>- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</li> <li>- Peningkatan Kapasitas</li> </ul>	<p>Seragam Sekolah, Buku Tulis, dan Bantuan Lainnya Bagi Siswa Sekolah Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama dengan pihak eksternal dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional</li> </ul>	

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar - Pencatatan data Kependidikan Sekolah Dasar - Pengolahan dan Penyajian Data Kependidikan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependidikan - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependidikan dengan Instansi lain.	- Pendataan Pendidikan Sekolah Dasar - Perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan data pada platform Rapor Pendidikan untuk memantau mutu dan capaian pendidikan, terutama peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan	Dinas Pendidikan
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Pembangunan Perpustakaan Sekolah - Pembangunan Laboratorium - Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah - Pengadaan Mebel Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Siswa - Penyediaan Biaya Personil Peserta	- Pemberian Bantuan Langsung Bisa (diluar BOS) untuk Seragam Sekolah, Buku Tulis, dan Bantuan Lainnya Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama - Monitoring dan evaluasi kinerja guru serta hasil belajar siswa	Dinas Pendidikan

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
		Didik Sekolah Menengah Pertama - Perlengkapan dasar buku teks peserta didik - Perlengkapan belajar peserta didik - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Pembinaan Minat, Bakat, dan kreativitas Siswa - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
		- Pencatatan data Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	- Pendataan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pemanfaatan Big Data untuk meningkatkan	Dinas Pendidikan

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan dan Penyajian Data Kependidikan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan</li> <li>- Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah</li> <li>- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependidikan</li> <li>- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependidikan dengan Instansi lain.</li> </ul>	efisiensi, efektivitas, dan kualitas pembelajaran	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong revitalisasi PKBM dan SKB</li> <li>- Membentuk Tim Satgas tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa untuk mengoptimalkan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) dengan dukungan alokasi dana desa (ADD)</li> </ul>	Dinas Pendidikan

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan</li> <li>- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan data Kependidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Pengolahan dan Penyajian Data Kependidikan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan</li> <li>- Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah</li> <li>- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependidikan</li> <li>- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependidikan dengan Instansi lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Pemanfaatan Big Data untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Kemenag</li> </ul>

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pesantren</li> <li>- Pemberdayaan dan Pendidikan Santri</li> <li>- Pengadaan Buku dan Perlengkapan Pendidikan Santri</li> <li>- Pengadaan Perlengkapan Sekolah</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan</li> <li>- Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren</li> <li>- Pemberian Bantuan Pembiayaan</li> <li>- Fasilitas Penyusunan Kurikulum Pesantren</li> <li>- Fasilitas Program Kejar Paket di Pesantren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pendidikan pesantren/formalisasi pesantren</li> <li>- Rekognisi Pengalaman Lampau Santri, (penyetaraan paket B dan C)</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan Pesantren</li> <li>- Monitoring dan evaluasi kinerja guru serta hasil belajar siswa</li> <li>- Peningkatan dan penjaminan mutu kurikulum pesantren sesuai dengan kurikulum nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Kemenag</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan data Kependidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Pengolahan dan Penyajian Data Kependidikan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan</li> <li>- Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan Pendidikan Pesantren</li> <li>- Revitalisasi PKBM / SKB</li> <li>- Pemanfaatan Big Data untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pembelajaran</li> <li>- Mendorong Pendidikan Inklusif</li> <li>- Bantuan Pendidikan di SLB/Sekolah Inklusif</li> </ul>	Dinas Pendidikan

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependidikan</li> <li>- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependidikan dengan Instansi lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beasiswa dan Bantuan Tunai Langsung Siswa Program Paket B dan C</li> </ul>	
	<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> </ul>	Peningkatan sistem pendataan pendidikan dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan
<b>2.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			
	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</li> <li>- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</li> </ul>	Pemberian bantuan kepada peserta didik dengan penyandang disabilitas dan kurang mampu dalam ekonomi	Dinas Sosial
<b>3.</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>			

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</li> <li>- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>- Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Pendidikan Komunitas Adat Terpencil (KAT)</li> </ul>	Pemberian bantuan dan pendampingan kepada komunitas masyarakat terpencil	Dinas Sosial Dinas Pendidikan
<b>4.</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>			
	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</li> <li>- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</li> <li>- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar</li> <li>- Fasilitasi Pendidikan Bagi Anak-Anak Terlantar</li> </ul>	Pemberian bantuan beasiswa atau bantuan tunai langsung kepada siswa kurang mampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Sosial</li> </ul>
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>			
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga</li> </ul>	Peningkatan peran keluarga dalam pendidikan anak melalui penyuluhan di tingkat dasawisma, PKK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
	<b>dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kewenangan Kabupaten/Kota - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
<b>6.</b>	<b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>			
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Penguatan sekolah ramah anak - peningkatan aksesibilitas anak penyandang disabilitas serta guru khusus yang menangani anak penyandang disabilitas di sekolah - Fasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>7.</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			
	<b>Penyediaan Layanan</b>	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Pemberian bantuan gizi sekolah serta	Dinas Kesehatan

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
	<b>Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<p>pada Usia Pendidikan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</li> <li>- Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah</li> </ul>	pendampingan/penyuluhan kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik	
<b>8.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>			
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</li> <li>- Survei Kondisi Jalan/Jembatan</li> <li>- Pembangunan Jalan</li> <li>- Pembangunan Jembatan</li> <li>- Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan</li> </ul>	Peningkatan kualitas jalan/jembatan menuju fasilitas pelayanan pendidikan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>11.</b>	<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>			
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain</li> </ul>	Peningkatan pelayanan sistem data kependudukan terutama terkait data pendidikan	Disdukcapil
<b>12.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>			

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
	<b>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</b>	- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Peningkatan peran kader di tingkat desa untuk optimalisasai PKBM dan pemanfaatan alokasi dana desa untuk mendukung pendidikan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>				
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	- Memberikan penghargaan atau "Awarding" untuk kecamatan dan desa yang mencapai angka rata-rata lama sekolah tertinggi - Akurasi data penduduk usia sekolah dan usia 25-55 tahun yang belum mencapai wajib	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</b>			
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	- Memaksimalkan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat untuk mendorong anggotanya melanjutkan Pendidikan melalui paket A, B, dan C - Meningkatkan peran kader PKK untuk memotivasi anggotanya dalam meningkatkan pendidikan dan literasi dalam keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</li> <li>- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ul>		
14.	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>			
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</li> <li>- Pemetaan Kependudukan</li> <li>- Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</li> <li>- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</li> </ul>		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15.	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana</b>			
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</li> <li>- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi mengenai pergaulan remaja dan kesehatan</li> <li>- Mendorong peran aktif guru dalam kegiatan konseling untuk peserta didik</li> </ul>	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
	serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peningkatan peran kader PKK dalam pengendalian penduduk, pembinaan KB, serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>			
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	- Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	- Sosialisasi Bersama komite sekolah dan orang tua murid tentang pentingnya peran lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter peserta didik - Stimulan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
		<p>dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</li> <li>- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</li> <li>- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</li> </ul>		
17.	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>			
	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</li> <li>- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</li> </ul>	Peningkatan kualitas akses menuju fasilitas pelayanan pendidikan	Dinas Perhubungan

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	Pelayanan angkutan sekolah gratis dengan memanfaatkan kartu pelajar	Dinas Perhubungan
18.	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>			
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</li> <li>- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</li> <li>- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</li> <li>- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</li> <li>- Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana pelayanan data dan informasi pendidikan berbasis digital</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan pengelolaan teknologi Pendidikan</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Informatika
19.	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>			

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Layanan Elektronik</li> <li>- Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas pustakawan</li> <li>- Pelayanan perpustakaan berbasis digital</li> </ul>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</li> <li>- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</li> <li>- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</li> <li>- Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan perpustakaan dan gerakan budaya baca, misal menyediakan taman baca atau ruang pojok baca di setiap kelas</li> </ul>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20.	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>			
	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Bidang Kependidikan</li> </ul>	Sertifikasi Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
	<b>Kepegawaian ASN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Bidang Kependidikan</li> <li>- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</li> </ul>		
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Kependidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Bidang Kependidikan</li> <li>- Pengelolaan Assessment Center</li> <li>- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</li> <li>- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat</li> </ul>	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Tenaga Kependidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Tenaga Pendidik</li> <li>- Pelaksanaan Evaluasi Penilaian dan Kinerja Aparatur dan Tenaga Pendidik</li> <li>- Evaluasi Hasil Evaluasi Penilaian dan Kinerja Aparatur dan Tenaga Pendidik</li> <li>- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dan Tenaga Pendidik</li> <li>- Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai</li> </ul>	Evaluasi Kinerja Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah

No	Nomenklatur Kepmen 050/2020		Kegiatan (usulan) hasil Kajian Peningkatan HLS dan RLS	Perangkat Daerah
	Nama Program	Rincian Kegiatan		
		- Pembinaan Disiplin bagi ASN dan Tenaga Pendidik		
21.	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>			
	<b>Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sosialisasi peningkatan kualitas keluarga melalui peran keluarga dalam pendidikan di lingkungan rumah	Dinas Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan KB
22.	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>			
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Memaksimalkan peran Ormas dan Majelis Ta'lim untuk mendorong anggotanya melanjutkan Pendidikan melalui Paket A, B dan C	Kemenag, Kesbangpol

## Kuesioner untuk Responden Kepala Sekolah

### Kuesioner

Selamat datang dalam penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kabupaten Tapin bekerja sama dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) Universitas Gadjah Mada. Kuesioner ini dibuat dalam rangka meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi angka Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin. Partisipasi Anda dalam kuesioner ini sangat penting bagi pembangunan daerah Kabupaten Tapin.

Kuesioner ini ditujukan kepada **Kepala Sekolah di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA di Kabupaten Tapin**. Melalui penelitian ini, kami ingin memahami lebih lanjut mengenai:

1. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tapin
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS)
3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan harapan lama sekolah (HLS)

Faktor utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu kondisi finansial, pernikahan dini, motivasi bersekolah, dan preferensi masyarakat terhadap pendidikan. **Output dari penelitian ini adalah mengetahui faktor faktor apa saja yang berpengaruh terhadap rendahnya angka rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Tapin.**

Kuesioner terdiri dari 4 bagian, yang meliputi :

1. Pengantar
2. Identitas responden
3. Profil sekolah
4. Pertanyaan penelitian

Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Anda dalam penelitian ini

**\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi**

#### IDENTITAS RESPONDEN

Bagian ini berisi informasi mengenai data diri responden

1. NAMA RESPONDEN (Boleh inisial) \*

\_\_\_\_\_

2. JENIS KELAMIN \*

*Tandai satu oval saja.*

Laki-laki

Perempuan

3. USIA \*

\_\_\_\_\_

4. PEKERJAAN RESPONDEN \*

*Tandai satu oval saja.*

Kepala Sekolah

Guru

Yang lain: \_\_\_\_\_

5. PENDIDIKAN TERAKHIR \*

*Tandai satu oval saja.*

Tidak/Belum Sekolah

Tamat SD/Sederajat

Tamat SLTP/Sederajat

Tamat SLTA/Sederajat

D1/D3

D4/S1

S2

S3

6. ALAMAT DESA/KELURAHAN RESPONDEN \*

\_\_\_\_\_

7. KECAMATAN \*

---

**PROFIL SEKOLAH TEMPAT BAPAK/IBU MENJABAT SEBAGAI GURU/KEPALA SEKOLAH**

Pada bagian ini berisi pertanyaan mengenai informasi sekolah dimana responden menjabat sebagai guru/kepala sekolah

8. JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH TEMPAT BAPAK/IBU MENJABAT \*

*Tandai satu oval saja.*

- SD/Sederajat  
 SMP/Sederajat  
 SMA/Sederajat

9. NAMA SEKOLAH \*

---

10. ALAMAT SEKOLAH (Desa/Kelurahan) \*

*contoh : Tungkap*

---

11. ALAMAT SEKOLAH (Kecamatan) \*

*Contoh : Binuang*

---

---

---

---

---

<https://docs.google.com/forms/d/17SSOEGnQWtq4sd8PNILn2JYEsCmf5s3JOWBsWzJAKA/edit#settings>

12. KETERJAUNGAUAN (JARAK DAN AKSES) SARANA PRASARANA PENDIDIKAN \*

Bagaimana perkiraan anda mengenai aksesibilitas sekolah dari rumah siswa?

Tandai satu oval saja per baris.

	Seluruhnya (100%)	Sebagian besar (lebih dari 50%)	Sebagian kecil (kurang dari 50%)	Tidak ada (0%)
<b>Proporsi siswa yang jarak tempat tinggalnya lebih dari 2 Km</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Proporsi siswa yang bersekolah dengan berjalan kaki</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13. Kondisi Ruang Kelas \*

Tandai satu oval saja per baris.

	Mencukupi	Tidak mencukupi
<b>Apakah ruang kelas yang tersedia mencukupi</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. Ketersediaan Fasilitas Sekolah \*

Tandai satu oval saja per baris.

	Ya	Tidak
<b>Lab komputer</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Perpustakaan</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Ruang kesehatan atau UKS</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Laboratorium fisika/biologi/kimia</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Fasilitas dan lapangan olahraga</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kamar mandi atau WC</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Tempat Ibadah</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. Bagaimana Kondisi Fasilitas \*

Tandai satu oval saja per baris.

	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Lab komputer	<input type="radio"/>				
Perpustakaan	<input type="radio"/>				
Ruang kesehatan atau UKS	<input type="radio"/>				
Laboratorium fisika/biologi/kimia	<input type="radio"/>				
Fasilitas dan lapangan olahraga	<input type="radio"/>				
Kamar mandi atau WC	<input type="radio"/>				
Tempat Ibadah	<input type="radio"/>				

16. Selama 5 tahun terakhir, adakah murid putus sekolah atau tidak meneruskan ke jenjang berikutnya ? \*

Tandai satu oval saja.

- Ada  
 Tidak

17. Bila ada murid yang putus sekolah atau tidak melanjutkan, menurut perkiraan anda berapa jumlah rata-rata pertahun ? \*

\_\_\_\_\_

18. Menurut perkiraan anda, apa saja penyebab dari siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan? \*

(Dapat memilih lebih dari satu jawaban)

Centang semua yang sesuai.

- Kemiskinan  
 Motivasi  
 Bekerja  
 Pernikahan dini  
 Melanjutkan ke pesantren  
 Yang lain: \_\_\_\_\_

19. Menurut Anda, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap angka putus sekolah? \*

(Urutkan mulai dari yang paling berpengaruh hingga yang paling tidak berpengaruh)

Tandai satu oval saja per baris.

	(1) Paling Berpengaruh	(2) Berpengaruh	(3) Cukup Berpengaruh	(4) Tidak Berpengaruh	(5) Paling Tidak Berpengaruh
<b>Kemiskinan</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Motivasi Bersekolah</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Bekerja</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Pernikahan Dini</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Melanjutkan ke pesantren</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

20. Menurut pendapat anda, apakah sistem zonasi mempunyai dampak terhadap angka putus sekolah? \*

*Tandai satu oval saja.*

- Ya  
 Tidak

21. Berapa jumlah murid pada tahun ini (ket. Tahun 2023) \*

\_\_\_\_\_

22. Berapa jumlah murid yang tidak lulus sekolah dalam 5 tahun terakhir? \*

\_\_\_\_\_

23. Berapa jumlah murid yang lulus tetapi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya? \*

\_\_\_\_\_

24. Berapa jumlah murid yang lulus dan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya? \*

\_\_\_\_\_

25. Dari jumlah murid yang tidak lulus sekolah, berapa yang mengikuti penyetaraan atau kejar paket? \*

\_\_\_\_\_

### **PETUNJUK PENGISIAN**

Berikut ini beberapa faktor yang diduga turut berpengaruh terhadap angka putus sekolah di Kabupaten Tapin, meliputi:

1. Minat bersekolah
2. Pernikahan Dini
3. Preferensi Pemilihan Sekolah

Perhatikan perintah kuesioner secara tepat, pertanyaan berjenis *multiple choice*, Bapak/Ibu dapat memilih satu jawaban yang paling relevan dengan kondisi sekolah saat ini tempat Bapak/Ibu menjabat.

26. MINAT BERSEKOLAH \*

Tandai satu oval saja per baris.

	Seluruhnya (100%)	Sebagian Besar (lebih dari 50%)	Sebagian Kecil (kurang dari 50%)	Tidak ada (0%)
Banyak siswa yang memiliki motivasi dan minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banyak siswa yang lebih memilih bekerja daripada bersekolah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banyak siswa yang menikah dini daripada bersekolah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banyak siswa yang memilih pondok pesantren daripada sekolah formal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<https://docs.google.com/forms/d/17SSOEGnQWtq4sd8PNILn2JYEscrmf5s3JOWBsWzJAKA/edit#settings>

27. Berapa banyak siswa di sekolah anda yang putus sekolah dikarenakan menikah dini? \*

\_\_\_\_\_

28. Penyebab siswa yang putus sekolah karena pernikahan dini? \*

Tandai satu oval saja per baris.

	Seluruhnya (100%)	Sebagian besar (lebih dari 50%)	Sebagian kecil (kurang dari 50%)	Tidak ada (0%)
<b>Kondisi Finansial</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Pergaulan</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Budaya masyarakat</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

29. Program Sekolah Mengenai Pencegahan Pernikahan Dini (2) \*

Tandai satu oval saja per baris.

	Ya	Tidak
<b>Terdapat pembelajaran mengenai Sex Education</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Terdapat sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Terdapat sosialisasi tentang bahayanya sex bebas</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

30. Pemilihan sekolah bagi siswa yang lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya \*

Tandai satu oval saja per baris.

	Seluruhnya (100%)	Sebagian besar (lebih dari 50%)	Sebagian kecil (kurang dari 50%)	Tidak ada (0%)
<b>Bekerja</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Sekolah Formal</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Pondok Pesantren Tradisional</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Pondok Pesantren (Kurikulum nasional)</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**PETUNJUK PENGISIAN**

Berikut ini akan di paparkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap angka angka putus sekolah di Kabupaten Tapin. Faktor faktor yang berpengaruh terhadap angka putus sekolah meliputi:

1. Pernikahan dini;
2. Kondisi Finansial;
3. melanjutkan ke Pesantren.

Responden diperintahkan untuk mengisi prioritas mana yang lebih berpengaruh terhadap yang lain.

Responden dapat memilih prioritas berdasarkan angka, dengan penjelasan sebagai berikut:

Angka (1) Kedua faktor sama pentingnya

(3) Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada

(5) Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya

(7) Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada

(9) Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya

(2,4,6,8) Nilai antara dua nilai pertimbangan pertimbangan yang berdekatan (Compromise values)

31. Dari faktor pernikahan dini dan kondisi finansial, lebih penting mana pengaruh faktor tersebut terhadap angka putus sekolah ? \*

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) p          (9) pernikahan dini mutlak lebih penting

32. Dari faktor pernikahan dini dan melanjutkan ke pesantren, penting mana pengaruh faktor tersebut terhadap angka putus sekolah ? \*

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) p          (9) pernikahan dini mutlak lebih penting

33. Dari faktor kondisi finansial dan melanjutkan ke pesantren, penting mana pengaruh faktor tersebut terhadap angka putus sekolah ? \*

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) k          (9) kondisi finansial utlak lebih penting

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

<https://docs.google.com/forms/d/17SSOEGnQWtq4sd8PNILn2JYEscmf5s3JOWBsWzJAKA/edit#settings>

## Kuesioner untuk Responden Komite Sekolah

# Kuesioner

Selamat datang dalam penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kabupaten Tapin bekerja sama dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) Universitas Gadjah Mada. Kuesioner ini dibuat dalam rangka meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi angka Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin. Partisipasi Anda dalam kuesioner ini sangat penting bagi pembangunan daerah Kabupaten Tapin.

Kuesioner ditujukan kepada **Komite Sekolah di Kabupaten Tapin**. Melalui penelitian ini, kami ingin memahami lebih lanjut mengenai:

1. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tapin
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS)
3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan harapan lama sekolah (HLS)

Faktor utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu kondisi finansial, pernikahan dini, motivasi bersekolah, dan preferensi masyarakat terhadap pendidikan. **Output dari penelitian ini adalah mengetahui faktor faktor apa saja yang berpengaruh terhadap rendahnya angka rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Tapin.**

Kuesioner terdiri dari 6 bagian, yang meliputi :

1. Pengantar
2. Identitas responden
3. Profil Sekolah
4. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Pertanyaan penelitian
6. Perbandingan faktor yang diduga sebagai penyebab anak putus sekolah

Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Anda dalam penelitian ini

*\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi*

### IDENTITAS RESPONDEN

Bagian ini berisi informasi mengenai data diri responden

1. NAMA RESPONDEN (Boleh inisial) \*

\_\_\_\_\_

2. JENIS KELAMIN \*

*Tandai satu oval saja.*

- Laki-laki  
 Perempuan

3. USIA \*

\_\_\_\_\_

4. PEKERJAAN RESPONDEN \*

*Tandai satu oval saja.*

- Buruh  
 Petani  
 Wiraswasta  
 Mahasiswa  
 Guru  
 Yang lain: \_\_\_\_\_

5. PENDIDIKAN TERAKHIR \*

*Tandai satu oval saja.*

- Tidak/Belum Sekolah  
 Tamat SD/Sederajat  
 Tamat SLTP/Sederajat  
 Tamat SLTA/Sederajat  
 D1/D3  
 D4/S1  
 S2  
 S3

6. ALAMAT DESA/KELURAHAN RESPONDEN \*

---

7. KECAMATAN \*

---

**PROFIL SEKOLAH TEMPAT BAPAK/IBU MENJABAT SEBAGAI KOMITE**

Pada bagian ini berisi pertanyaan mengenai sekolah dimana responden menjabat sebagai komite

8. JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH TEMPAT BAPAK/IBU MENJABAT \*

*Tandai satu oval saja.*

SD/Sederajat

SMP/Sederajat

SMA/Sederajat

9. NAMA SEKOLAH \*

---

10. ALAMAT SEKOLAH (DESA/KELURAHAN) \*

---

11. KECAMATAN \*

---

**KONDISI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

Pada bagian ini berisi pertanyaan mengenai sarana prasarana pendidikan di lingkungan sekitar responden

<https://docs.google.com/forms/d/1AwvVwqH600-WC5k7ZVvoODUyzOphRjleRJRCCk7rdsAM/edit>

## 12. JARAK FASILITAS PENDIDIKAN

\*

Bagaimana perkiraan anda terhadap jarak rumah Anda dengan sarana prasarana pendidikan?

Tandai satu oval saja per baris.

	Kurang dari 1 km	1 - 3 km	3 - 5 km	Lebih dari 5 km
Jarak rumah dengan fasilitas pendidikan tempat anak Anda bersekolah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jarak rumah dengan fasilitas pendidikan usia dini (Paud/TK/ sederajat)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jarak antara rumah Anda dengan fasilitas pendidikan sekolah dasar (SD)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jarak antara rumah Anda dengan fasilitas pendidikan SLTP sederajat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jarak antara rumah Anda dengan fasilitas pendidikan SLTA sederajat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<https://docs.google.com/forms/d/1AwvVwqH600-WC5k7ZVoODUyzOphRJleRJRcCk7rdsAM/edit>

### 13. KETERSEDIAAN FASILITAS SEKOLAH

Bagaimana pendapat anda terhadap ketersediaan fasilitas sekolah di tempat anda menjabat sebagai komite?

*Tandai satu oval saja per baris.*

	Ya	Tidak
Ruang kelas mencukupi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lab Komputer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorium IPA (Fisika, Kimia, Biologi)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Perpustakaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ruang Kesehatan/UKS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toilet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ruang dan Lapangan Olahraga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tempat Ibadah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<https://docs.google.com/forms/d/1AwvVwqH600-WC5k7ZVoODUyzOphRJleRJRCCk7rdsAM/edit>

14. **KONDISI FASILITAS SEKOLAH**

\*

Bagaimana pendapat anda terhadap kondisi fasilitas sekolah di tempat anda menjabat sebagai komite?

*Tandai satu oval saja per baris.*

	Baik	Cukup	Kurang
<b>Ruang Kelas</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Lab Komputer</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Laboratorium IPA (Fisika, Kimia, Biologi)</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Perpustakaan</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Ruang Kesehatan/UKS</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Toilet</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Ruang dan Lapangan Olahraga</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Tempat Ibadah</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. **KONDISI PENDIDIKAN DAN SARANA PRASARANA \***

*Tandai satu oval saja per baris.*

	Ya	Tidak
<hr/> <b>Terdapat perguruan/pendidikan tinggi di sekitar lingkungan/kota tempat tinggal saya</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/> <b>Dalam memilih tempat bersekolah, saya tidak terlalu mempertimbangkan kurikulum yang akan di pakai di sekolah</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/> <b>Terdapat transportasi umum yang dapat diakses oleh siswa</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**PETUNJUK PENGISIAN**

Pada bagian ini responden diharapkan untuk memilih salah satu jawaban terkait faktor faktor yang diduga menyebabkan murid putus sekolah di Kabupaten Tapin. Faktor-faktor tersebut terdiri dari kondisi finansial, pernikahan dini, minat bersekolah, serta preferensi pilihan pendidikan. Petunjuk pengisian sebagai berikut:

- Pilihlah satu jawaban pada kolom yang tersedia untuk pertanyaan sesuai dengan pendapat anda.

<https://docs.google.com/forms/d/1AwvVwqH600-WC5k7ZVoODUyzOphRJleRJRCck7rdsAM/edit>

16. KONDISI FINANSIAL ATAU KEUANGAN KELUARGA \*

Tandai satu oval saja per baris.

	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Kondisi keuangan keluarga sangat berpengaruh terhadap keputusan siswa untuk melanjutkan pendidikan	<input type="radio"/>				
Sebagian besar siswa yang putus sekolah/tidak melanjutkan pendidikan karena lebih memilih untuk bekerja	<input type="radio"/>				
Program bantuan keuangan/beasiswa pendidikan akan sangat membantu siswa untuk melanjutkan sekolah	<input type="radio"/>				
Komitmen keluarga terhadap pendidikan dapat membantu siswa dalam melanjutkan sekolah	<input type="radio"/>				
Banyaknya tanggungan anak mempengaruhi keberlanjutan sekolah	<input type="radio"/>				

<https://docs.google.com/forms/d/1AwvVwqH600-WC5k7ZVoODUyzOphRjleRJRCck7rdsAM/edit>

17. PERNIKAHAN DINI \*

Tandai satu oval saja per baris.

	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
<b>Fenomena pernikahan dini biasa terjadi</b>	<input type="radio"/>				
<b>Pernikahan dini adalah penyebab anak putus/tidak melanjutkan sekolah</b>	<input type="radio"/>				
<b>Pernikahan dini disebabkan karena kemiskinan</b>	<input type="radio"/>				
<b>Pernikahan dini disebabkan karena pergaulan</b>	<input type="radio"/>				
<b>Pendidikan formal dapat mencegah pernikahan dini</b>	<input type="radio"/>				
<b>Terdapat sosialisasi pencegahan pernikahan dini di sekolah</b>	<input type="radio"/>				

<https://docs.google.com/forms/d/1AwvVwqH600-WC5k7ZVoODUyzOphRjleRJRcCk7rdsAM/edit>



18. MINAT BERSEKOLAH \*

Tandai satu oval saja per baris.

	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Netral	Tidak Berpengaruh	Sangat Tidak Berpengaruh
Keputusan untuk bersekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dipengaruhi oleh minat siswa	<input type="radio"/>				
Minat siswa untuk bersekolah/melanjutkan sekolah dipengaruhi oleh kualitas guru	<input type="radio"/>				
Minat siswa untuk bersekolah/melanjutkan sekolah dipengaruhi oleh adanya kegiatan ekstartrikuler	<input type="radio"/>				
Minat siswa untuk bersekolah/melanjutkan sekolah dipengaruhi oleh kurikulum pendidikan	<input type="radio"/>				
Minat siswa untuk bersekolah/melanjutkan sekolah dipengaruhi oleh lingkungan atau pergaulan	<input type="radio"/>				

19. PREFERENSI PILIHAN PENDIDIKAN \*

Tandai satu oval saja per baris.

	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Orang tua berhak memutuskan pilihan pendidikan anak	<input type="radio"/>				
Pendidikan anak harus lebih tinggi dibandingkan pendidikan orangtua	<input type="radio"/>				
Pendidikan formal merupakan hal yang penting	<input type="radio"/>				
Pendidikan keagamaan lebih penting dari pendidikan formal	<input type="radio"/>				
Sekolah keagamaan/pesantren lebih terjangkau	<input type="radio"/>				
Pilihan pendidikan berdasarkan lingkungan/budaya setempat	<input type="radio"/>				

## PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini akan di paparkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap angka putus sekolah di Kabupaten Tapin. Faktor faktor yang berpengaruh terhadap angka putus sekolah meliputi:

1. Pernikahan dini;
2. Kondisi Finansial;
3. melanjutkan ke Pesantren.

Responden diperintahkan untuk mengisi prioritas mana yang lebih berpengaruh terhadap yang lain. Responden dapat memilih prioritas berdasarkan angka, dengan penjelasan sebagai berikut:

Angka (1) Kedua faktor sama pentingnya

(3) Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada

(5) Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya

(7) Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada

(9) Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya

(2,4,6,8) Nilai antara dua nilai pertimbangan pertimbangan yang berdekatan (Compromise values)

20. Dari faktor pernikahan dini dan kondisi finansial, lebih penting mana faktor tersebut terhadap angka putus sekolah \*

*Tandai satu oval saja.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1)          (9) Mutlak lebih penting

21. Dari faktor pernikahan dini dan melanjutkan ke pesantren, lebih penting mana faktor tersebut terhadap angka putus sekolah \*

*Tandai satu oval saja.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1)          (9) Mutlak lebih penting

22. Dari faktor kondisi finansial dan melanjutkan ke pesantren, lebih penting mana faktor tersebut terhadap angka putus sekolah \*

Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1)          (9) Mutlak lebih penting

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

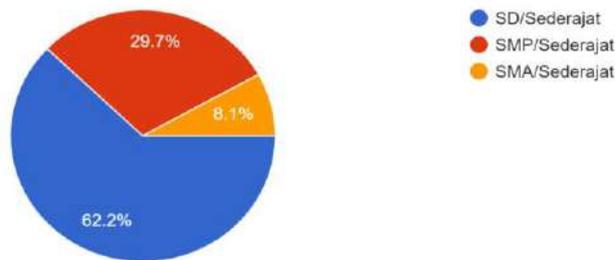
## Lampiran Hasil Survei

Terdapat 2 kategori responden yang mengisi kuesioner “Penelitian Strategi Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin”, yakni Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Respon Kepala Sekolah mewakili tenaga pendidik, sedangkan Komite Sekolah mewakili wali murid dan peserta didik. Berikut merupakan hasil rekap dari kuesioner tersebut.

### Hasil Kuesioner dengan Responden Kepala Sekolah

#### a. Jumlah Responden

Total responden berjumlah 74 meliputi responden sekolah dasar (SD) sebanyak 46 atau sekitar 62,2% dari total responden, sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 22 atau sekitar 29,7%, sedangkan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 6 responden atau sekitar 8,1%.

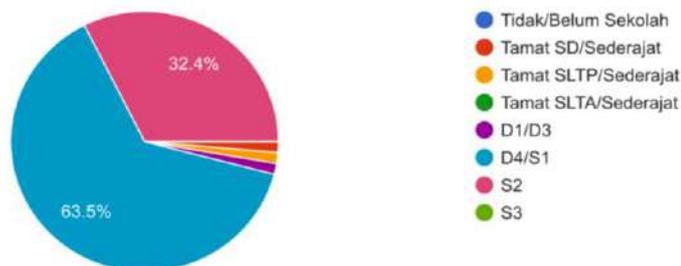


**Gambar 1**  
**Persentase Responden Kuesioner**

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

#### b. Pekerjaan dan Pendidikan Terakhir Responden

Seluruh responden adalah kepala sekolah dengan tingkat pendidikan mayoritas D4/S1 sebanyak 63,5%, diikuti tingkat pendidikan S2 sebanyak 32,4% responden. Terdapat 3 responden dengan tingkat pendidikan D1/D3, SLTP, dan SD.

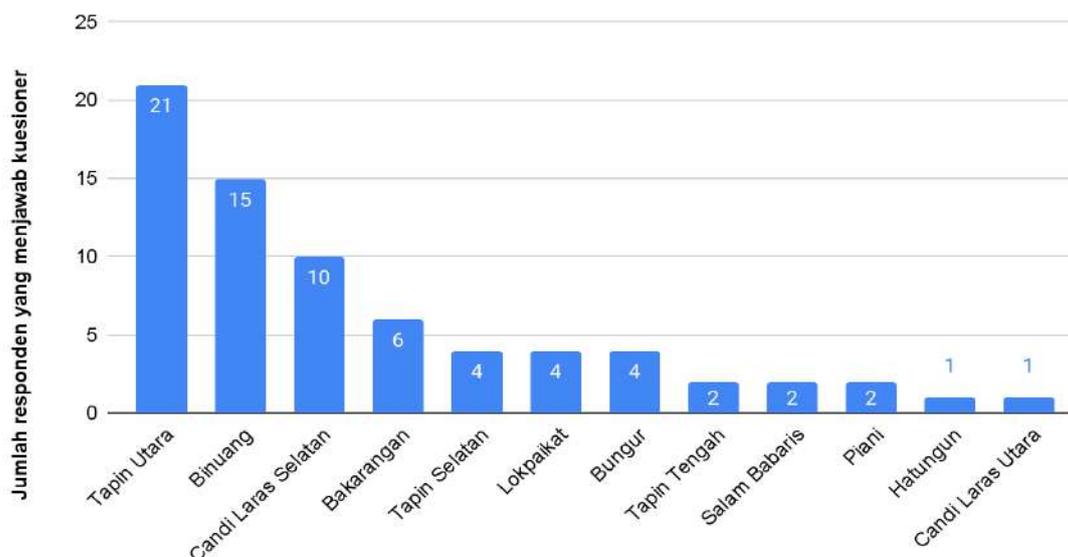


**Gambar 2**  
**Tingkat Pendidikan Responden Kuesioner**

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

c. Sekolah yang Mengisi Kuesioner

Kecamatan Tapin Utara menjadi kecamatan dengan pengisi kuesioner terbanyak yakni 21 responden lalu diikuti oleh Kecamatan Binuang sebanyak 15 responden. Hal ini selaras dengan hasil analisis spasial, dimana persebaran sekolah di Kabupaten Tapin lebih banyak berada di kawasan perkotaan seperti Tapin Utara dan Binuang. Sementara itu, Kecamatan yang paling sedikit mengisi kuesioner adalah Hatungun dan Candi Laras Utara, masing-masing 1 responden.



**Gambar 3**  
**Jumlah Sekolah yang Mengisi Kuesioner Berdasarkan Kecamatan**

*Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023*

d. Keterjangkauan (Jarak dan Akses) Sarana Pendidikan

Mayoritas responden berpendapat bahwa sebagian kecil siswa (34 responden) di sekolahnya memiliki rumah berjarak lebih dari 2 km dari sekolah. Namun ada 27 responden yang berpendapat bahwa siswa yang rumahnya lebih dari 2 km adalah sebagian besar siswanya. Sedangkan mengenai akses, mayoritas responden berpendapat bahwa sekolahnya dapat diakses dengan berjalan kaki oleh sebagian kecil siswanya (42 responden).



**Gambar 4**  
**Jarak dan akses terhadap Pendidikan : Kuesioner Kepala Sekolah**  
 Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

e. Ketercukupan dan Kondisi Fasilitas Sekolah

Masih terdapat sekolah dengan kondisi fasilitas dasar seperti ruang kelas dan toilet yang kurang baik (belum ada/tidak layak), sedangkan mayoritas fasilitas pendukung seperti laboratorium, uks, lapangan, dan tempat ibadah memiliki kondisi kurang baik (belum ada/tidak layak).

**Tabel 1**  
**Ketercukupan Fasilitas Sekolah**

Ketercukupan Fasilitas	Kepala Sekolah	
	Mencukupi	Tidak mencukupi
Ruang kelas	65	9
Lab komputer	24	49
Perpustakaan	62	12
Ruang kesehatan/UKS	30	42
Lab fisika/biologi/kimia	25	49
Fasilitas dan lapangan olahraga	61	13
Kamar mandi atau WC	65	9
Tempat ibadah	30	44

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

**Tabel 2**  
**Kondisi Fasilitas Sekolah**

Kondisi Fasilitas Sekolah	Kepala Sekolah		
	Baik	Cukup	Kurang
Ruang Kelas		65	9
Lab komputer	20	4	36
Perpustakaan	34	19	17
Ruang kesehatan/UKS	18	11	36
Lab fisika/biologi/kimia	17	9	38
Fasilitas dan lapangan olahraga	26	20	26
Kamar mandi atau WC	30	19	25

Tempat ibadah	21	7	35
---------------	----	---	----

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

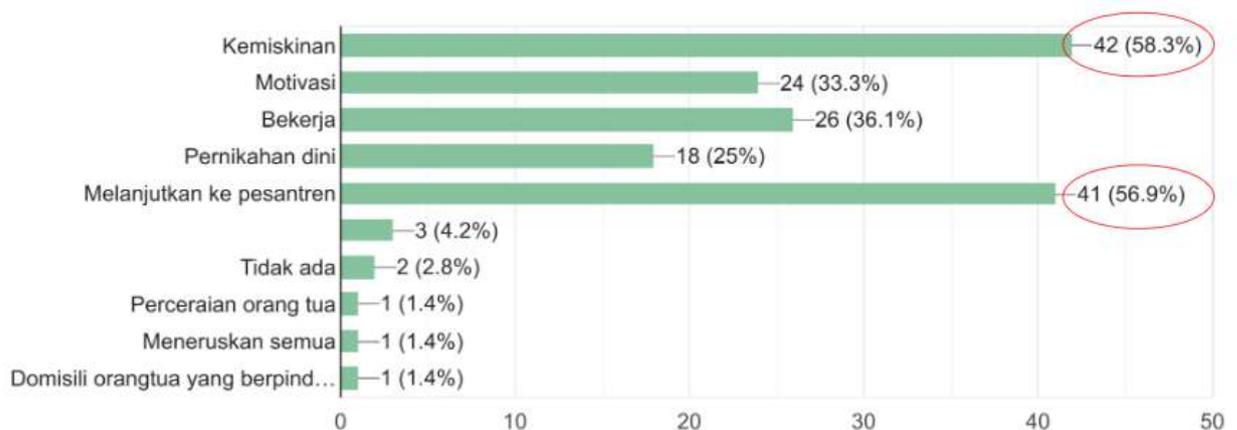
f. Murid Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan Ke Jenjang Berikutnya

Terdapat 17 dari 46 sekolah dasar (SD), 17 dari 22 sekolah menengah pertama (SMP), dan 4 dari 6 sekolah menengah atas (SMA) yang memiliki murid putus sekolah, jumlah ini sebesar 50,7% dari total responden. Alasan putus sekolah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, namun didominasi oleh faktor kemiskinan, melanjutkan ke pesantren, dan motivasi bersekolah. Selain itu, ditanyakan pula pengaruh sistem zonasi terhadap angka putus sekolah dan tidak melanjutkan tetapi tidak signifikan berpengaruh.

**Tabel 3**  
**Faktor yang Mempengaruhi Angka Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan**

Alasan Putus Sekolah	Berpengaruh	Cukup berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Kemiskinan	43	12	11
Motivasi Bersekolah	32	22	12
Bekerja	24	24	10
Pernikahan Dini	17	17	24
Melanjutkan ke Pesantren	36	15	15

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023



**Gambar 5**  
**Faktor yang Mempengaruhi Angka Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan**

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

g. Keputusan Siswa untuk Melanjutkan Sekolah

Mayoritas siswa memilih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja dan menikah dini, dan terdapat banyak siswa yang lebih memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke pesantren.



**Gambar 6**  
**Keputusan Siswa untuk Melanjutkan Sekolah**  
 Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023



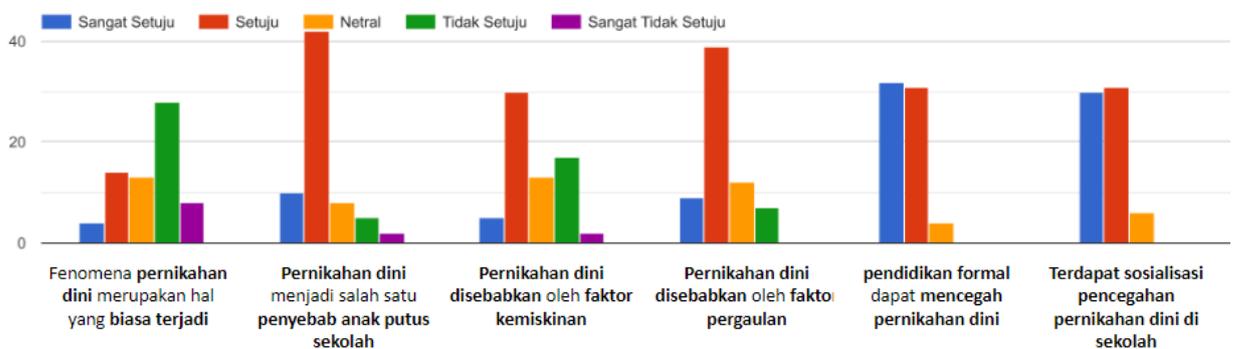
**Gambar 7**  
**Pilihan Siswa Setelah Lulus Sekolah**  
 Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

h. Pernikahan Dini dan Pendidikan

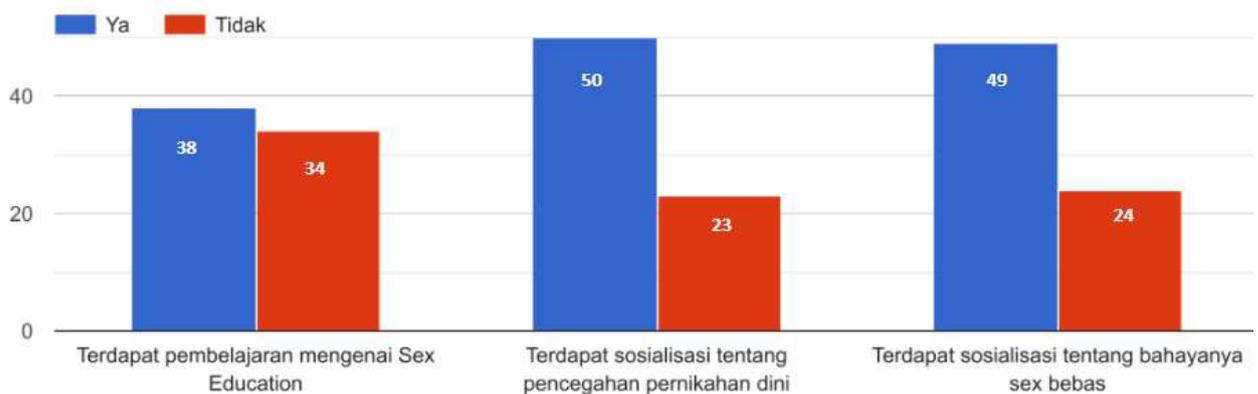
Pernikahan dini menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah/tidak melanjutkan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Menurut responden pernikahan dini kebanyakan disebabkan oleh faktor kemiskinan, pergaulan, dan bukan merupakan budaya yang biasa terjadi di masyarakat. Mayoritas responden berpendapat bahwa pernikahan dini dapat diatasi dengan pendidikan formal seperti sosialisasi dan pembelajaran di sekolah-sekolah.



**Gambar 8**  
**Faktor Penyebab Pernikahan Dini**  
 Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023



**Gambar 9**  
**Pendapat Responden Mengenai Pernikahan Dini**  
 Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023



**Gambar 10**  
**Program Sekolah Mengenai Pencegahan Pernikahan Dini**  
 Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

i. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Sekolah

Diantara pernikahan dini, kondisi finansial, dan melanjutkan ke pesantren tidak ada faktor yang signifikan lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor lainnya. Menurut responden ketiga faktor tersebut sama pentingnya.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pernikahan dini vs kondisi finansial								
Kepala	22,9%	21,4%	17,1%	0%	20%	4,3%	5,7%	4,3%	4,3%
	Pernikahan dini vs pesantren								
Kepala	14,1%	18,3%	22,5%	1,4%	28,2%	2,8%	8,5%	1,4%	2,8%
	Kondisi finansial vs pesantren								
Kepala	19,7%	16,9%	11,3%	0%	26,8%	2,8%	11,3%	4,2%	7%

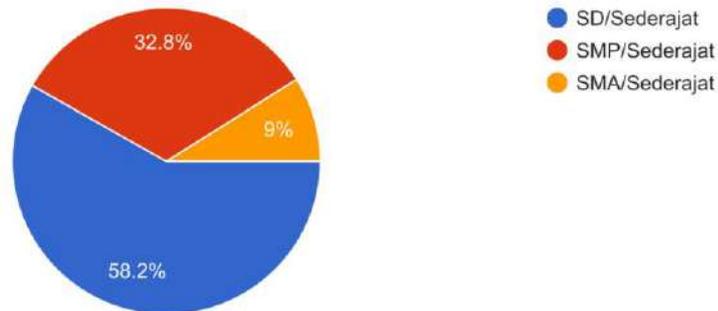
**Gambar 11**  
**Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Sekolah**  
*Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023*

## Hasil Kuesioner dengan Responden Komite Sekolah

### a. Jumlah Responden

Pada kuesioner yang disebarakan ke komite sekolah, terdapat total 67 responden yang terdiri dari (58 %) 39 komite sekolah SD, (32,8 %) 22 responden komite sekolah SMP dan (9 %) 6 responden komite sekolah SMA.

JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH TEMPAT BAPAK/IBU MENJABAT  
67 responses



**Gambar 12**  
**Jenjang Pendidikan Tempat Responden Menjabat**  
Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

### b. Pekerjaan Responden

Dari 67 responden komite sekolah memiliki profesi yang beraneka ragam, tercatat dalam kuesioner bahwa dari 67 responden, 34 % berprofesi sebagai wiraswasta, 20,9 berprofesi sebagai guru, 10,4 % berprofesi sebagai petani, 10,4 % berprofesi sebagai PNS dan 29 % lain lain.

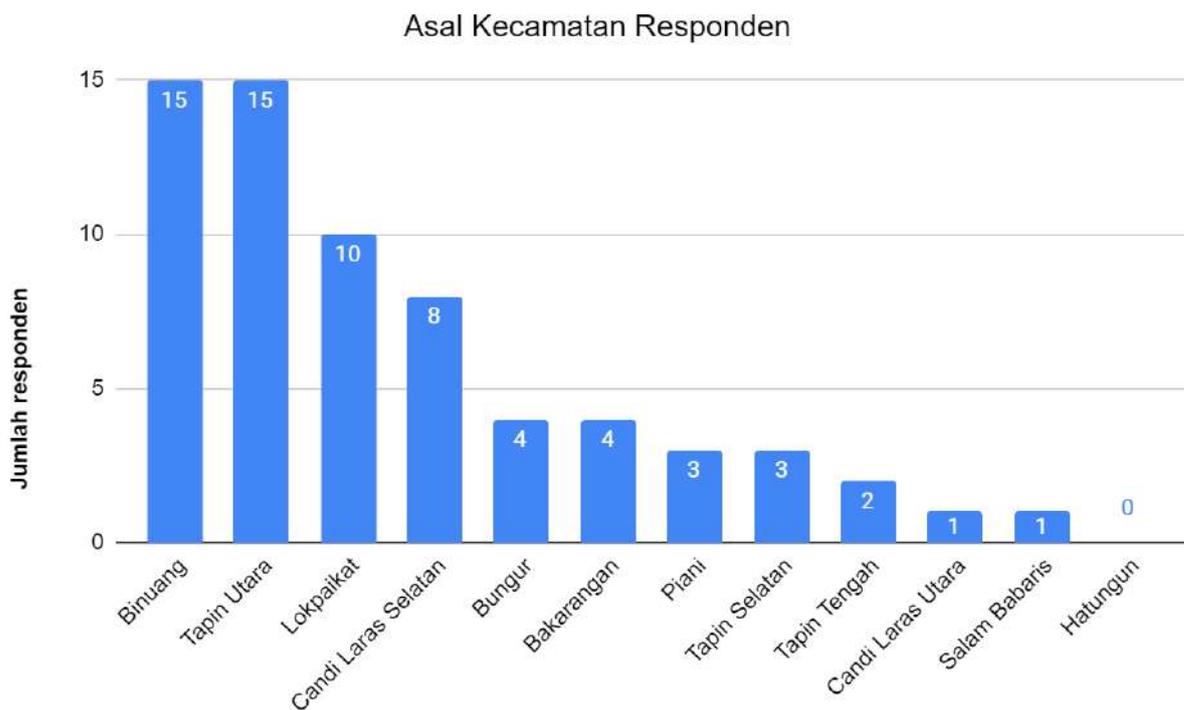
PEKERJAAN RESPONDEN  
67 responses



**Gambar 13**  
**Pekerjaan Responden**  
Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

c. Asal Kecamatan Responden yang mengisi kuesioner

Dari 67 responden yang mengisi kuesioner berasal dari 12 kecamatan di Kabupaten Tapin, terdiri dari 15 responden berasal dari Kecamatan Binuang, 15 berasal dari Kecamatan Tapin Utara, 10 responden berasal dari Kecamatan Lokpaikat, 8 responden berasal dari Kecamatan Candi Laras Selatan, 4 berasal dari Kecamatan Bungur, 4 berasal dari Kecamatan Bakarangan, 3 berasal dari Kecamatan Piani, 3 responden berasal dari Tapin Selatan, 2 berasal dari Tapin Tengah, dan 2 responden berasal dari Candi Laras Utara dan Salam Babaris.

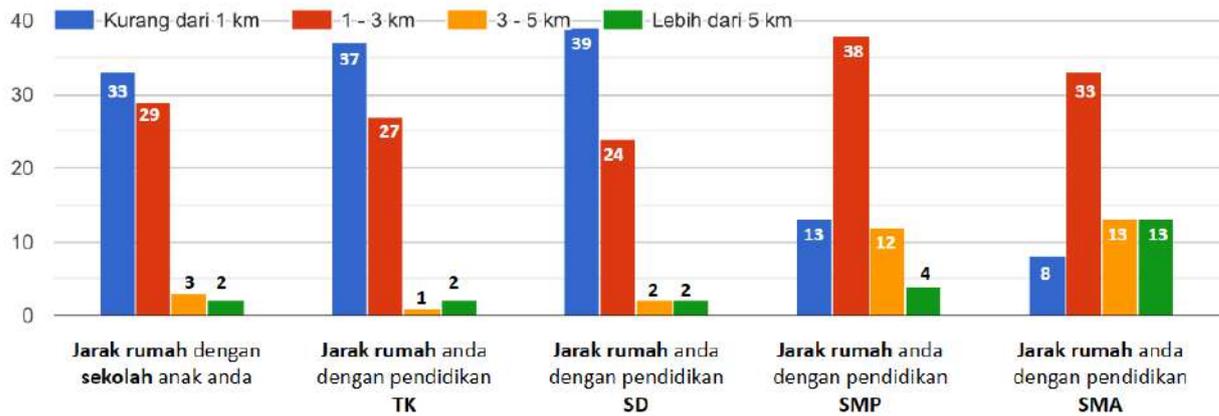


**Gambar 13**  
**Asal Kecamatan Responden**

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

d. Akses terhadap sarana pendidikan

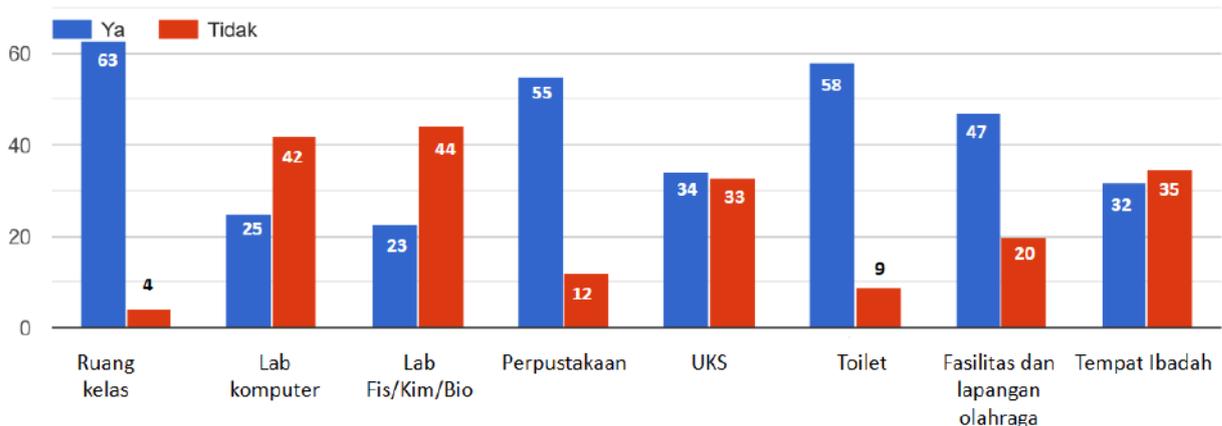
Pada Akses pendidikan mayoritas responden berpendapat bahwa jarak rumah mereka terhadap TK dan SD cenderung lebih dekat yaitu kurang dari 1 km, sedangkan jarak rumah terhadap jenjang sekolah SMP dan SMA mayoritas responden mengatakan memiliki rentang jarak 1-3 km.



**Gambar 14**  
**Akses Terhadap Sarana Pendidikan**  
 Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

e. Ketersediaan fasilitas sekolah

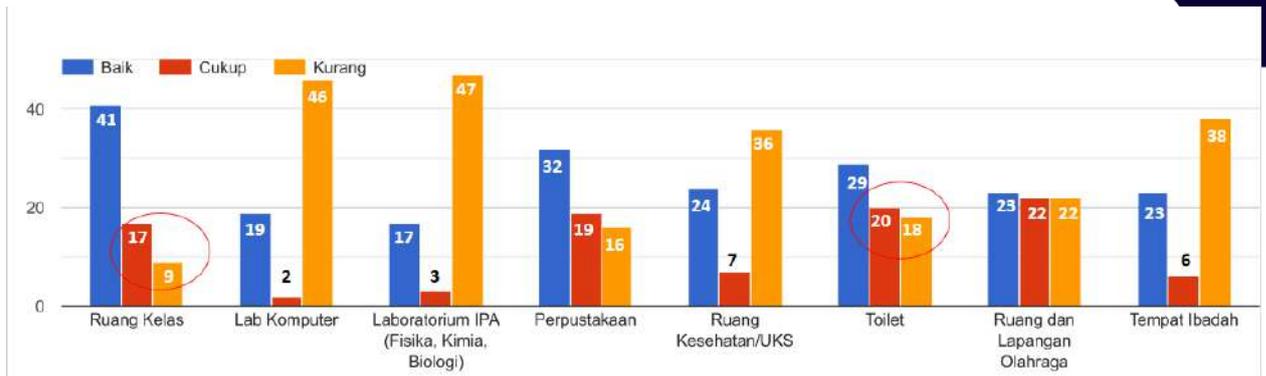
Pada aspek ketersediaan fasilitas sekolah, mayoritas responden mengatakan bahwa ruang kelas, perpustakaan, toilet dan fasilitas lapangan olahraga sudah tersedia dengan baik, sedangkan untuk fasilitas sekolah yang lebih spesifik seperti lab komputer, lab fisika/biologi/kimia banyak yang belum tersedia.



**Gambar 15**  
**Ketersediaan Fasilitas Sekolah**  
 Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

f. Kondisi fasilitas sekolah

Dalam segi fasilitas sekolah dari kuesioner teridentifikasi bahwa masih terdapat sekolah dengan kondisi fasilitas dasar seperti ruang kelas dan toilet yang kurang baik (belum ada/tidak layak). Sedangkan fasilitas pendukung seperti laboratorium, uks, lapangan, dan tempat ibadah dengan kondisi kurang baik (belum ada/tidak layak).



**Gambar 16**  
**Kondisi Fasilitas Sekolah**

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

g. Sarana prasarana pendidikan

Responden saat ditanyakan tentang ketersediaan perguruan tinggi dan transportasi umum di tempat tinggal mereka mayoritas menjawab belum ada/tidak ada. Di aspek yang lain, mayoritas responden saat ditanyakan tentang kurikulum sebagai pertimbangan dalam memilih sekolah mengatakan bahwa mereka tidak terlalu mempertimbangkan.



**Gambar 17**  
**Sarana Prasarana Pendidikan**

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

h. Kondisi Finansial

Dalam faktor finansial, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor finansial memiliki pengaruh terhadap keputusan melanjutkan sekolah, program beasiswa dapat membantu siswa dalam melanjutkan sekolah, dan keluarga dengan jumlah anak yang banyak cenderung merasa kesulitan dalam membuat anaknya melanjutkan sekolah.

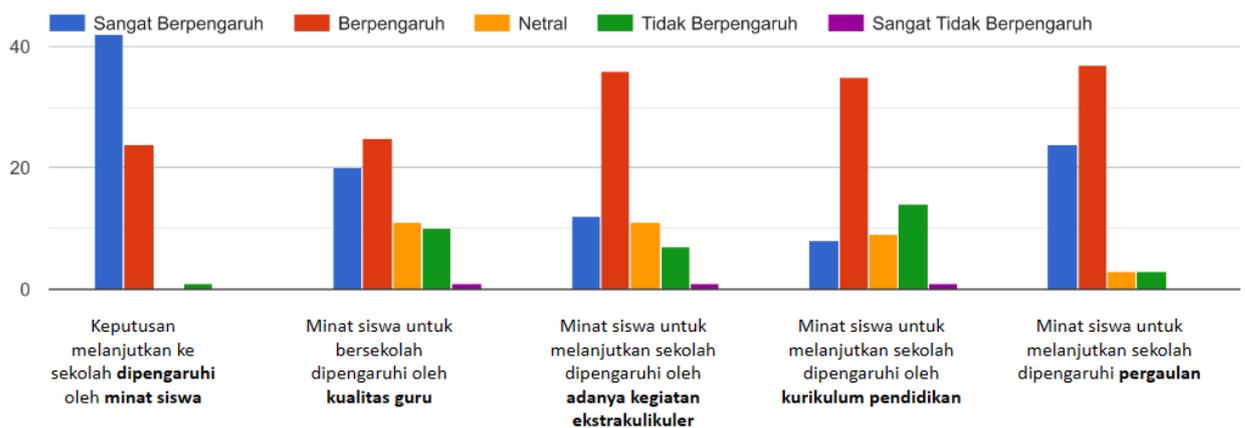


**Gambar 18**  
**Kondisi Finansial**

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

i. Minat bersekolah

Pada aspek minat sekolah, mayoritas responden mengatakan bahwa minat siswa, kualitas guru, ekstrakurikuler, kurikulum pendidikan, dan pergaulan memiliki pengaruh dalam melanjutkan sekolah.



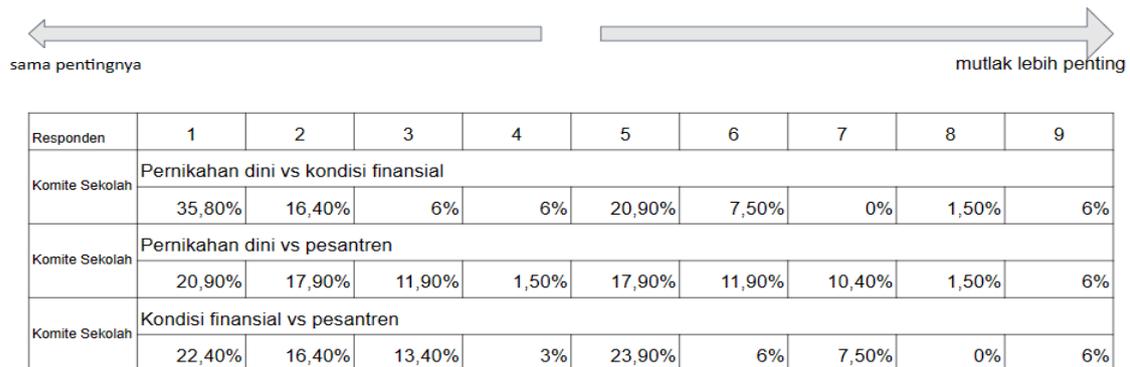
**Gambar 19**  
**Minat Bersekolah Siswa**

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023

j. Hubungan faktor finansial, melanjutkan ke pesantren dan pernikahan dini terhadap alasan siswa untuk melanjutkan sekolah

Saat responden ditanya tentang lebih penting mana antara pernikahan dini dengan kondisi finansial sebagai alasan anak putus sekolah, mayoritas responden mengatakan bahwa pernikahan dini dan kondisi finansial sama pentingnya. Selanjutnya, ketika responden ditanya tentang lebih penting mana antara pernikahan dini dengan melanjutkan ke pesantren terhadap anak putus sekolah, jawaban mayoritas responden masih sama yaitu sama pentingnya antara pernikahan dini dengan melanjutkan pesantren. Selanjutnya, saat responden ditanya tentang lebih penting mana alasan putus sekolah dikarenakan kondisi finansial terhadap melanjutkan ke pesantren, mayoritas responden menjawab

bahwa kondisi finansial menjadi alasan yang lebih kuat terhadap alasan anak putus sekolah dibandingkan dengan melanjutkan ke pesantren.



**Gambar 20**  
**Hubungan faktor finansial, melanjutkan ke pesantren dan pernikahan dini terhadap alasan siswa untuk melanjutkan sekolah**

Sumber : Kuesioner Penelitian HLS dan RLS Kabupaten Tapin, 2023



**KAJIAN  
STRATEGI**

PENINGKATAN ANGKA  
HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH  
DI KABUPATEN TAPIN

©Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Tapin